



GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PONOROGO

TAHUN ANGGARAN 2022

KERJASAMA DENGAN:
BADAN KEWIRAUSAHAAN DAN KERJASAMA
FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang diberikan sehingga penyusunan Laporan Akhir untuk Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan dokumen perencanaan penting yang berfungsi sebagai pedoman para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan diharapkan dapat menjadi panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan, harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya, dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Dokumen laporan akhir terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, dasar hukum, tinjauan teori mengenai penduduk dan kependudukan, gambaran umum wilayah perencanaan, analisis situasi dan capaian pembangunan kependudukan, serta proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan. Dokumen ini juga disertai dengan penyusunan roadmap dan program pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini disusun sebagai tahap akhir dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022.

Dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang. Kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan akhir ini.

Penyusun,
Ponorogo, Agustus 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud, Tujuan, Dan Sasaran	I-3
1.2.1 Maksud	I-3
1.2.2 Tujuan	I-3
1.2.3 Sasaran.....	I-4
1.3 Ruang Lingkup	I-5
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah	I-5
1.3.2 Ruang Lingkup Materi	I-5
1.3.3 Ruang Lingkup Pekerjaan.....	I-5
1.4 Dasar Hukum	I-6
BAB II PROFIL WILAYAH	II-1
2.1 Geografis Dan Administratif.....	II-1
2.2 Kondisi Topografi Dan Iklim.....	II-2
2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Budaya.....	II-7
2.4 Kondisi Kesehatan	II-26
2.5 Kondisi Sarana Prasarana.....	II-30
BAB III ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.....	III-1
3.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kependudukan Nasional Dan Daerah.....	III-1
3.2 Tinjauan Pencapaian Program Pembangunan Daerah	III-8
3.3 Analisis Kesenjangan Kebijakan Dan Pencapaian Program Pembangunan Kependudukan	III-20
3.3.1 Kuantitas Penduduk	III-20
3.3.2 Kualitas Penduduk	III-22
3.3.3 Kondisi Keluarga	III-32
3.3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk	III-35
3.3.5 Database Penduduk.....	III-40



BAB IV PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN	
.....	IV-1
4.1 Data Dasar Kependudukan Daerah	IV-1
4.2 Proyeksi Penduduk	IV-5
4.3 Analisis Kondisi Ideal Kependudukan	IV-9
4.4 Analisis Potensi Dan Dampak Kependudukan	IV-30
BAB V VISI MISI, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH...	
.....	V-1
5.1 Isu Strategis Kependudukan 25 Tahun.....	V-1
5.2 Visi Misi Pembangunan Kependudukan 25 Tahun	V-7
5.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan 25 Tahun	V-7
BAB VI ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	VI-1
6.1 Penetapan Target 25 Tahun.....	VI-1
6.1.1 Kuantitas Penduduk	VI-1
6.1.2 Kualitas Penduduk	VI-1
6.1.3 Pembangunan Keluarga	VI-3
6.1.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk	VI-4
6.1.5 Data dan Administrasi Kependudukan	VI-5
6.2 Program Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	VI-6
6.2.1 Kuantitas Penduduk	VI-6
6.2.2 Kualitas Penduduk	VI-6
6.2.3 Pembangunan Keluarga	VI-8
6.2.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk	VI-9
6.2.5 Data dan Administrasi Kependudukan	VI-10
BAB VII PENUTUP	VII-1
7.1 Kesimpulan.....	VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Menurut Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	II-2
Tabel 2.3	Keadaan Curah Hujan, Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 ...	II-3
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017–2021	II-7
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017–2021	II-8
Tabel 2. 6	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 (%)	II-10
Tabel 2. 7	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020	II-11
Tabel 2. 8	Tingkat Inflasi (%) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jatim dan Nasional Tahun 2016-2020	II-12
Tabel 2. 9	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Agustus 2019-2021	II-20
Tabel 2. 10	TPT Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2019-2021	II-23
Tabel 2. 11	Kondisi Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2. 12	Jumlah Penyakit Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	II-26
Tabel 2. 13	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021..	II-27
Tabel 2. 14	Jumlah Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana (Faskes KB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, 2021	II-28
Tabel 2. 15	Kualitas Rumah Tinggal	II-31
Tabel 2. 16	Jumlah dan Persebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Ponorogo	II-32
Tabel 2. 17	Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 – 2021	II-33
Tabel 2. 18	Jumlah dan Persebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Ponorogo	II-33
Tabel 2. 19	Sumber Air Bersih yang Digunakan di Kabupaten Ponorogo	II-34
Tabel 2. 20	Jumlah Air PDAM yang Disalurkan di Kabupaten Ponorogo	II-35
Tabel 2. 21	Persentase Sarana Air Minum di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	II-36
Tabel 2. 22	Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Ponorogo	II-38



Tabel 2. 23	Jumlah KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	II-39
Tabel 2. 24	Panjang Jalan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Status Jalan	II-41
Tabel 2. 25	Panjang Jalan berdasarkan Jenis Permukaan	II-41
Tabel 2. 26	Panjang Jalan berdasarkan Kondisi Jalan	II-41
Tabel 2. 27	Kondisi Penggunaan Listrik di Kabupaten Ponorogo.....	II-42
Tabel 2. 28	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir	II-43
Tabel 3. 1	Strategi dan Program Pembangunan Kependudukan Pada Dokumen-Dokumen Perencanaan.....	III-10
Tabel 3. 2	Program Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo.....	III-13
Tabel 3. 3	Ketercapaian Program Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Ponorogo	III-16
Tabel 3. 4	Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III-21
Tabel 3. 5	Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru.....	III-21
Tabel 3. 6	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ponorogo	III-22
Tabel 3. 7	APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo.....	III-23
Tabel 3. 8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf.....	III-24
Tabel 3. 9	Jumlah dan Persebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Ponorogo.....	III-24
Tabel 3. 10	Tenaga Kependidikan di Kabupaten Ponorogo	III-26
Tabel 3. 11	Jumlah dan Persebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Ponorogo	III-28
Tabel 3. 12	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Ponorogo	III-28
Tabel 3. 13	Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2020	III-30
Tabel 3. 14	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.....	III-33
Tabel 3. 15	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tertangani di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-202	III-34
Tabel 3. 16	Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	III-35
Tabel 3. 17	Jumlah PMI Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2022.....	III-37
Tabel 3. 18	Jumlah PMI Asal Kabupaten Ponorogo Yang Masih Berada di Luar Negeri Sampai Dengan Juni 2022.....	III-37
Tabel 3. 19	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan.....	III-41
Tabel 3. 20	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	III-42



Tabel 4. 1	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	IV-1
Tabel 4. 2	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur per Kecamatan Tahun 2021	IV-2
Tabel 4. 3	Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan tahun 2021	IV-3
Tabel 4. 4	Migrasi Masuk dan Keluar Menurut Jenis Kelamin	IV-4
Tabel 4. 5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ponorogo	IV-5
Tabel 4. 6	Proyeksi Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2035	IV-7
Tabel 4. 7	Proyeksi Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2036 – 2047	IV-8
Tabel 4. 8	Presentase Akseptor KB	IV-11
Tabel 4. 9	Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Tahun 2016-2020	IV-25
Tabel 4. 10	SWOT Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo	IV-30
Tabel 4. 11	Pembobotan IFAS EFAS	IV-31
Tabel 5. 1	Daftar Isu Kependudukan Lima Pilar	V-1
Tabel 5. 2	Isu Kependudukan Populer di Kabupaten Ponorogo	V-2
Tabel 5. 3	Matriks Perhitungan Analisis DEMATEL	V-2
Tabel 5. 4	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	V-4
Tabel 5. 5	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 ..	V-6
Tabel 6. 1	Program-Program Pengendalian Kuantitas Penduduk	VI-6
Tabel 6. 2	Program-Program Peningkatan Kualitas Penduduk	VI-7
Tabel 6. 3	Program-Program Pembangunan Keluarga di Kabupaten Ponorogo	VI-8
Tabel 6. 4	Program-Program Persebaran dan Mobilitas Penduduk	VI-10
Tabel 6. 5	Program-Program Pengembangan Data dan Administrasi Kependudukan	VI-10



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Batas Administrasi	II-4
Gambar 2. 2	Peta Kelerengan.....	II-5
Gambar 2. 3	Peta Curah Hujan.....	II-6
Gambar 2. 4	Indeks Gini Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020	II-13
Gambar 2. 5	Grafik TPAK Agustus 2017-2021 di Kabupaten Ponorogo (%)	II-21
Gambar 2. 6	Grafik Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2017-2021 di Kabupaten Ponorogo (ribu orang)	II-22
Gambar 2. 7	Grafik TPT Tahun 2017-2021 di Kabupaten Ponorogo.....	II-23
Gambar 2. 8	Grafik TPAK Agustus 2017-2021 di Kabupaten Ponorogo	II-24
Gambar 2. 9	Grafik Presentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2019-2021 di Kabupaten Ponorogo.....	II-25
Gambar 2. 10	Grafik Presentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal Informal Agustus 2019-2021 di Kabupaten Ponorogo.....	II-25
Gambar 2. 11	Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ponorogo, 2021	II-28
Gambar 2. 12	Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana (Faskes KB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kabupaten Ponorogo, 2021	II-29
Gambar 2. 13	Status Kepemilikan Bangunan di Kabupaten Ponorogo (Rumah Tinggal).....	II-31
Gambar 2. 14	Persentase Penggunaan Sumber Air Bersih	II-35
Gambar 2. 15	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Air PDAM yang Disalurkan di Kabupaten Ponorogo.....	II-35
Gambar 2. 16	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo	II-42
Gambar 3. 1	Ketercapaian Fasilitas Pendidikan Terakreditasi.....	III-25
Gambar 3. 2	Persentase Tenaga Kependidikan (Guru) Bersertifikat.....	III-27
Gambar 3. 3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ponorogo	III-30
Gambar 3. 4	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo	III-31
Gambar 3. 5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 -2020	III-32
Gambar 3. 6	Grafik Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 ..	III-33
Gambar 3. 7	Persentase PPKS di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021	III-35



Gambar 3. 8	Grafik Jumlah PMI Asal Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2022.....	III-37
Gambar 3. 9	Grafik Negara Tujuan PMI Asal Kabupaten Ponorogo.....	III-39
Gambar 3. 10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ponorogo.....	III-40
Gambar 4. 1	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	IV-3
Gambar 4. 2	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2047.....	IV-9
Gambar 4. 3	Proyeksi AKI di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2045.....	IV-10
Gambar 4. 4	Proyeksi AKB di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2045.....	IV-10
Gambar 4. 5	Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	IV-14
Gambar 4. 6	Proyeksi Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047 .	IV-14
Gambar 4. 7	Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2019.....	IV-15
Gambar 4. 8	Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2019	IV-15
Gambar 4. 9	Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047.....	IV-16
Gambar 4. 10	Capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ponorogo.....	IV-16
Gambar 4. 11	Proyeksi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	IV-17
Gambar 4. 12	Proyeksi Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	IV-18
Gambar 4. 13	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	IV-19
Gambar 4. 14	Proyeksi Jumlah Pernikahan Di Bawah Umur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	IV-20
Gambar 4. 15	Proyeksi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	IV-20
Gambar 4. 16	Proyeksi Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	IV-22
Gambar 4. 17	Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ponorogo	IV-22
Gambar 4. 18	Proyeksi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047 ...	IV-23
Gambar 4. 19	Proyeksi Indeks Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2047	IV-26
Gambar 4. 20	Target Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2047	IV-27
Gambar 4. 21	Grafik Kuadran IFAS EFAS	IV-32
Gambar 5. 1	Diagram Scatter Plot	V-3



Gambar 6. 1	Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	VI-1
Gambar 6. 2	Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	VI-3
Gambar 6. 3	Roadmap Pembangunan Keluarga di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	VI-4
Gambar 6. 4	Roadmap Persebaran dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	VI-5
Gambar 6. 5	Roadmap Pengembangan Data dan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047	VI-5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan berwawaskan penduduk dimana penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambahan sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambahan dan penduduk yang keluar bersifat pengurangan. Dalam pengetahuan tentang kependudukan dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut struktur umur dan jenis kelamin.

Berbagai masalah kependudukan, baik masalah kuantitas, kualitas, penyebaran penduduk serta masalah data, informasi dan administrasi kependudukan hendaknya bisa segera terurai. Mengingat penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan di semua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi. Penduduk merupakan penerima



manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan kementerian/lembaga. Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan. Berdasarkan pada harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka suatu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variable yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 pilar pembangunan



kependudukan yang selanjutnya disebut dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri. Guna menjamin tersedia dan termanfaatkannya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di seluruh tingkatan wilayah maka diperlukan panduan sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Panduan ini juga berguna sebagai bahan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah bidang kependudukan dan pegiat kependudukan dalam pelibatan seluruh pihak pada pembangunan bidang kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menyusun suatu rencana besar yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang mampu menjadi dasar dan tolok ukur pembangunan kependudukan. Untuk itu, pada tahun anggaran 2022 ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan melaksanakan “Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan” secara bertahap dan berkelanjutan.

1.2 Maksud, Tujuan, Dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud dari pekerjaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 ini adalah menyusun dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari pekerjaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Teridentifikasinya kebijakan pembangunan kependudukan nasional dan daerah, antara lain: kebijakan pembangunan kependudukan 5 pilar dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD, dll;
2. Teridentifikasinya sasaran kebijakan kependudukan daerah dan pencapaian program pembangunan bidang kependudukan daerah;
3. Tersedianya analisis program unggulan dan praktik unggulan model pembangunan bidang kependudukan;
4. Tersedianya analisis kesenjangan (gap analisis) kebijakan dan pencapaian program pembangunan kependudukan nasional dan daerah;
5. Tersusunnya proyeksi penduduk 25 tahun, melalui langkah-langkah sebagai berikut:



- a. Penyediaan data dasar kependudukan
 - b. Pembahasan asumsi-asumsi proyeksi dan justifikasi
 - c. Perhitungan proyeksi dan evaluasi data hasil proyeksi
 - d. Analisis potensi dan dampak kependudukan berdasarkan data hasil proyeksi, serta Kondisi kependudukan ideal yang diinginkan.
6. Tersusunnya rumusan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Perumusan isu strategis kependudukan 25 tahun
 - b. Perumusan visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun;
 - c. Perumusan arah kebijakan strategis 5 pilar pembangunan kependudukan 25 tahun, dibidang: Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan mobilitas penduduk, Peningkatan kualitas keluarga, dan Penataan data dan administrasi kependudukan.
7. Tersusunnya naskah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai dengan arahan sistematika penulisan dalam Panduan GDPK 5 Pilar.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari pekerjaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di tingkat daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Tersedianya acuan pelaksanaan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
3. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan rencana pembangunan bidang kependudukan
4. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukenali dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan kependudukan.
5. Mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas proses penyusunan dan pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
6. Mendorong terwujudnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan.



1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pekerjaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 ini adalah pada wilayah Administrasi Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi atau fokus pembahasan dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 adalah: Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk, Pilar Pembangunan Keluarga, Pilar Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk, dan Pilar Pengembangan Data dan Administrasi Kependudukan. Kelima pilar tersebut menjadi orientasi dalam penentuan arah kebijakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar.

1.3.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Pemetaan dan analisis data kependudukan berdasarkan struktur, aspek, dan wilayah di Kabupaten Ponorogo
2. Identifikasi kebijakan pembangunan kependudukan nasional dan daerah, antara lain: kebijakan pembangunan kependudukan 5 pilar dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD, dll
3. Identifikasi sasaran kebijakan kependudukan daerah dan pencapaian program pembangunan bidang kependudukan daerah
4. Analisis program unggulan dan praktik unggulan model pembangunan bidang kependudukan
5. Analisis kesenjangan (*gap analysis*) kebijakan dan pencapaian program pembangunan kependudukan nasional dan daerah
6. Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun, melalui langkah-langkah sebagai berikut: Penyediaan data dasar kependudukan; Pembahasan asumsi-asumsi proyeksi dan justifikasi; Perhitungan proyeksi dan evaluasi data hasil proyeksi; Analisis potensi dan dampak kependudukan berdasarkan data hasil proyeksi, serta Kondisi kependudukan ideal yang diinginkan.
7. Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Perumusan isu strategis kependudukan 25 tahun;
 - b. Perumusan visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun;



- c. Perumusan arah kebijakan strategis 5 pilar pembangunan kependudukan 25 tahun, dibidang: Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan mobilitas penduduk, Peningkatan kualitas keluarga, dan Penataan data dan administrasi kependudukan.
8. Penyusunan naskah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai dengan arahan sistematika penulisan dalam Panduan GDPK 5 Pilar.

1.4 Dasar Hukum

Referensi hukum yang dapat digunakan pada pekerjaan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 antara:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 ;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
15. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang pembangunan keadilan social dalam tatanan pemerintah
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026



BAB II

PROFIL WILAYAH

2.1 Geografis Dan Administratif

Secara geografis, Kabupaten Ponorogo memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer jalur lintas selatan dan jalan provinsi Madiun-Ponorogo-Pacitan. Ibukota Kabupaten Ponorogo berjarak 198 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo terletak Terletak pada 111°07' hingga 111°52' Bujur Timur dan 07°49' hingga 08°20' Lintang Selatan. Kabupaten Ponorogo adalah salah satu diantara 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 km², atau menempati sekitar 3,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk

Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan

Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 307 desa/kelurahan. Berikut merupakan tabel luas wilayah Kabupaten Ponorogo menurut kecamatan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Ngrayun	184,76	13,47
2	Slahung	90,34	6,59
3	Bungkal	54,01	3,94
4	Sambit	59,83	4,36
5	Sawoo	124,71	9,09
6	Sooko	55,33	4,03
7	Pudak	48,92	3,57
8	Pulung	127,55	9,30
9	Mlarak	37,20	2,71
10	Siman	37,95	2,77
11	Jetis	22,41	1,63
12	Balong	56,96	4,15
13	Kauman	36,61	2,67
14	Jambon	57,48	4,19
15	Badegan	52,35	3,82
16	Sampung	80,61	5,88
17	Sukorejo	59,58	4,34
18	Ponorogo	22,31	1,63
19	Babadan	43,93	3,20
20	Jenangan	59,44	4,33
21	Ngebek	59,50	4,34



No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
	Jumlah	1.371,781	100,00

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu 184,76 km². Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ponorogo dengan luas wilayah 22,31 km².

2.2 Kondisi Topografi Dan Iklim

2.2.1 Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah hingga pegunungan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79% terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m.

- Ketinggian < 500 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian < 500 m diatas permukaan laut meliputi 242 desa dengan luas 1.068,08 hektar.
- Ketinggian 500 – 700 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian 500–700 m diatas permukaan laut meliputi 45 desa dengan luas 184,76 hektar.
- Ketinggian > 700 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian 700 m diatas permukaan laut meliputi 20 desa dengan luas 118,94 hektar.

Berikut adalah tinggi wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2.2 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Ngrayun	553
2.	Slahung	169
3.	Bungkal	148
4.	Sambit	143
5.	Sawoo	173
6.	Sooko	440
7.	Pudak	959
8.	Pulung	492
9.	Mlarak	144
10.	Siman	133
11.	Jetis	146
12.	Balong	124
13.	Kauman	150
14.	Jambon	137
15.	Badegan	170
16.	Sampung	212
17.	Sukorejo	119
18.	Ponorogo	123
19.	Babadan	150



No.	Nama Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
20.	Jenangan	217
21.	Ngebel	713
Kabupaten Ponorogo		123

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

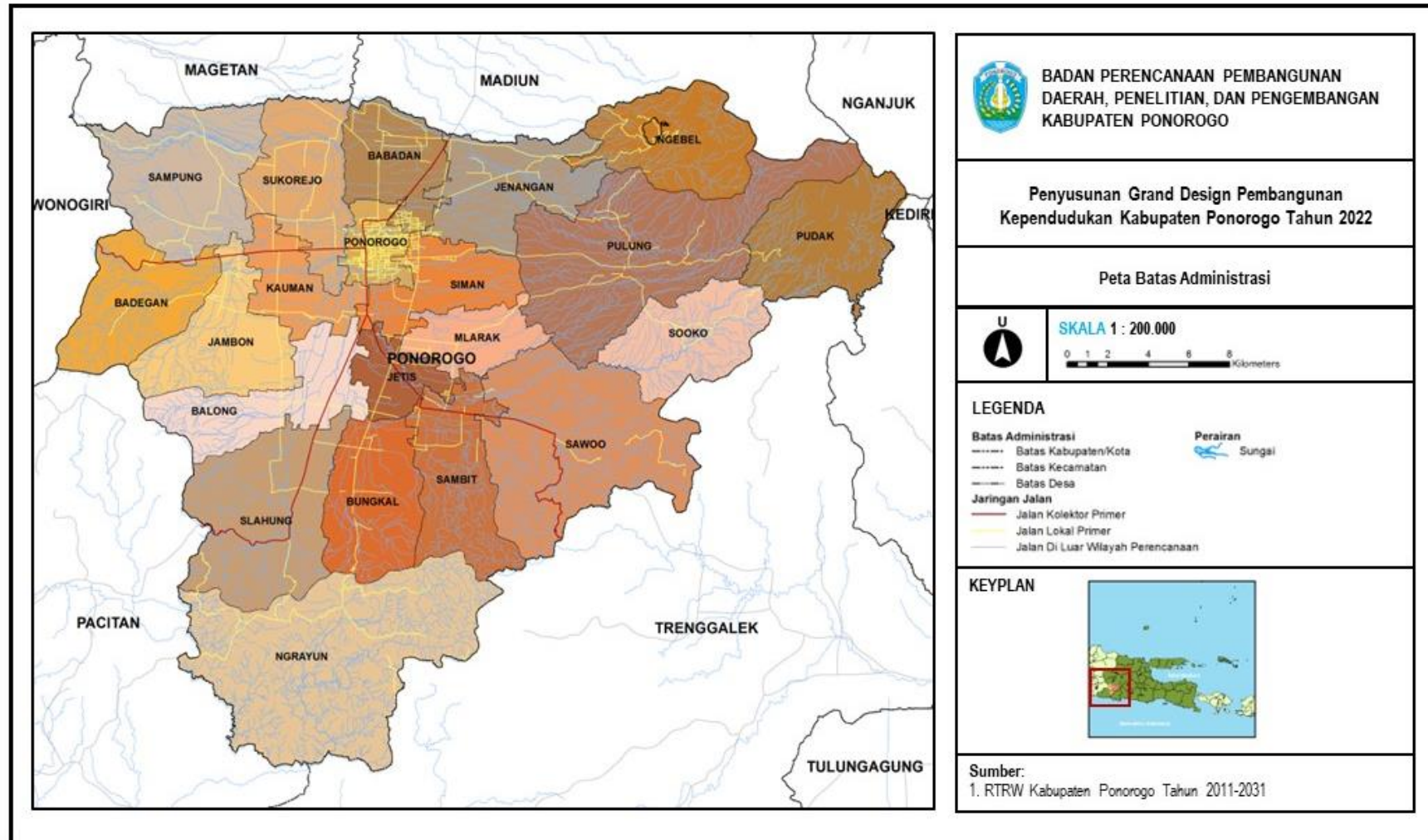
2.2.2 Iklim

Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18° s/d 31° Celcius. Curah hujan minimum 1 mm dan terbesar mencapai 311 mm. Jumlah curah hujan terbesar terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan rata-rata 19 mm. Berikut ini merupakan tabel keadaan curah hujan, suhu, dan kecepatan angin di Kabupaten Ponorogo.

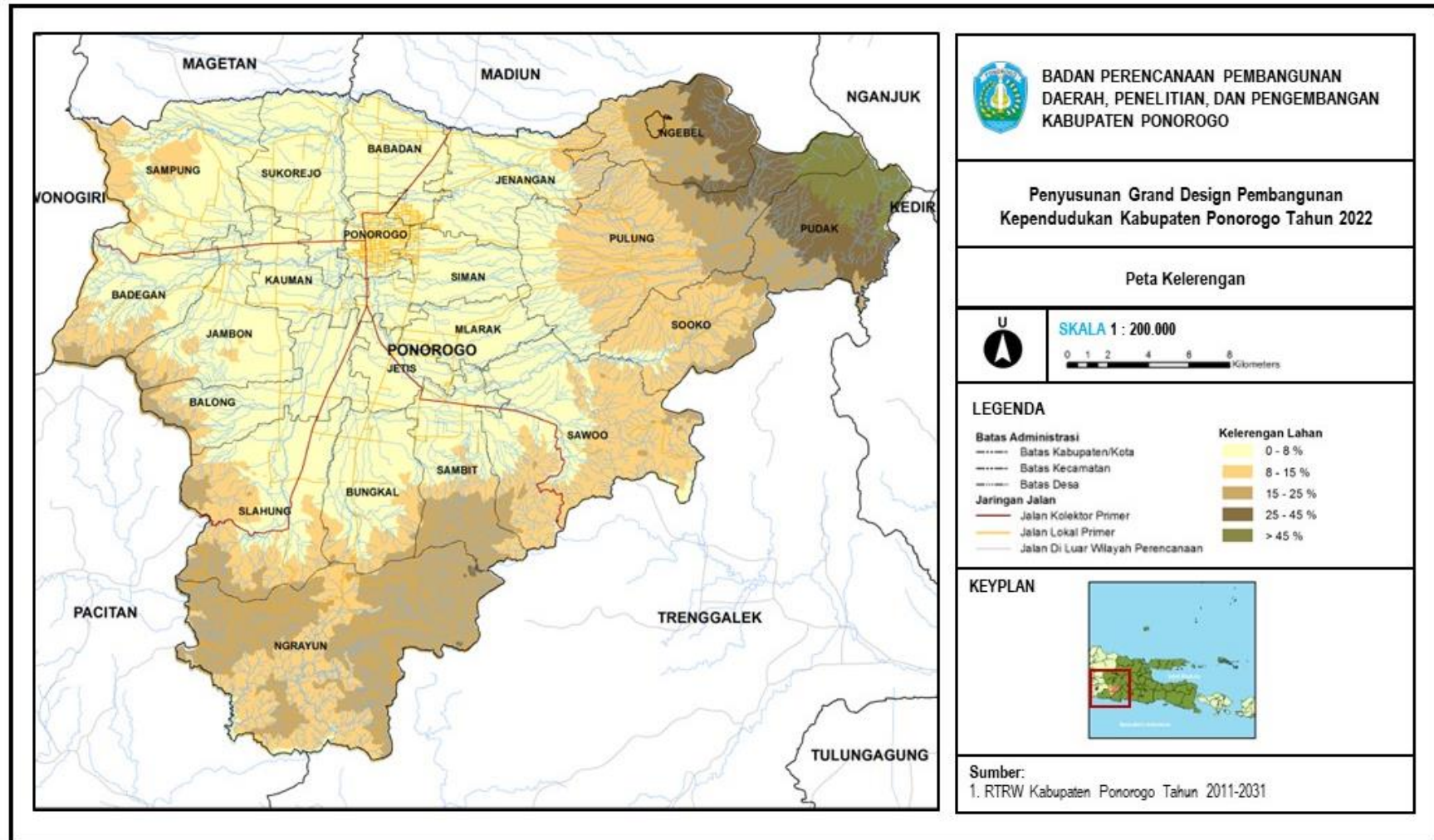
Tabel 2.3 Keadaan Curah Hujan, Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Bulan	Rata-rata Hari Hujan Per Bulan (hari)	Rata-rata Curah Hujan Per Bulan (mm)	Curah Hujan Terkecil (mm)	Curah Hujan Terbesar (mm)
Januari	21	15	1	122
Februari	18	19	1	311
Maret	19	10	1	123
April	10	22	1	118
Mei	5	9	1	75
Juni	12	14	1	72
Juli	1	8	1	25
Agustus	2	7	1	35
September	4	11	1	67
Oktober	4	10	1	54
November	22	20	1	119
Desember	17	14	1	111

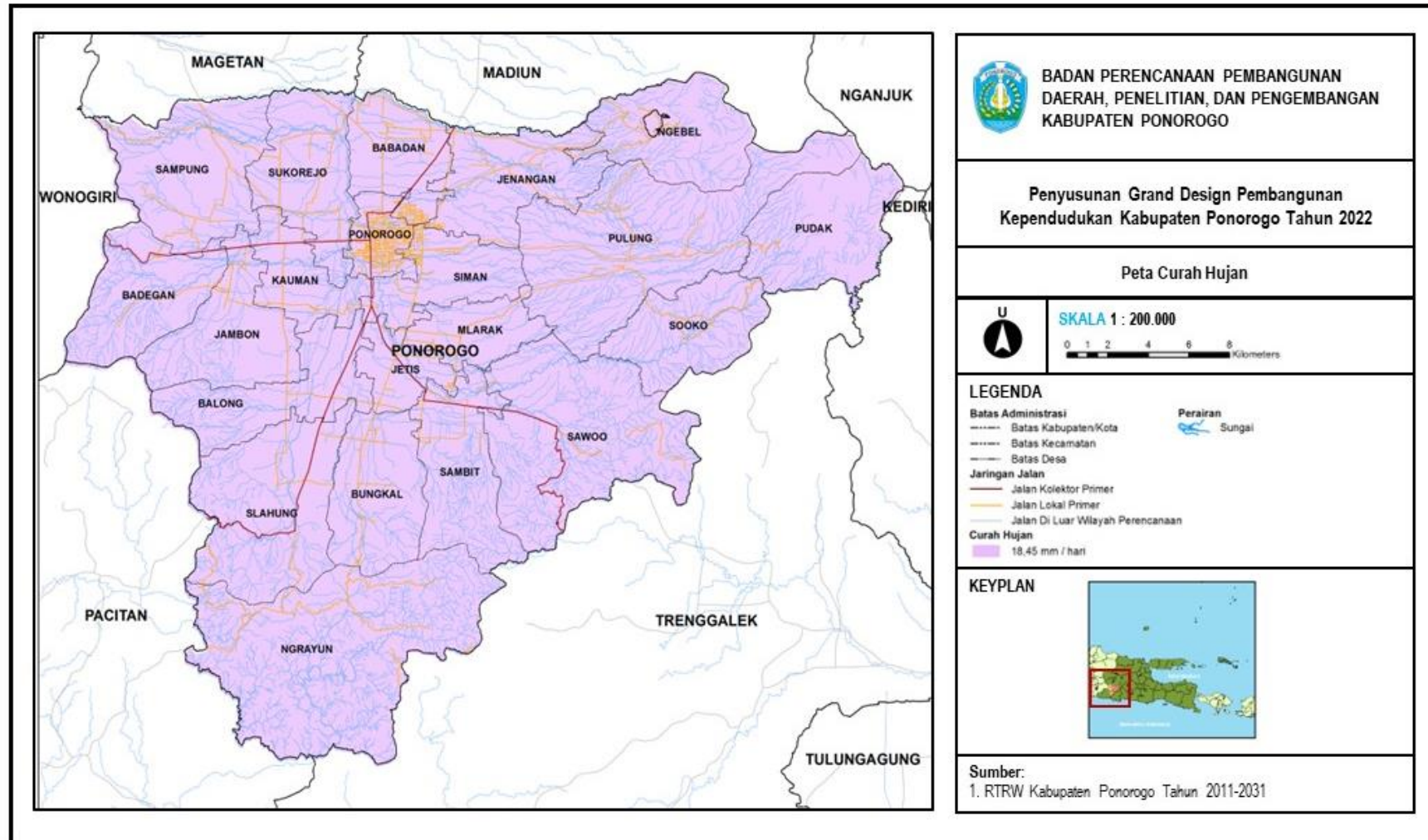
Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022



Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi



Gambar 2. 2 Peta Kelerengan



Gambar 2.3 Peta Curah Hujan



2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Budaya

2.3.1 Tingkat Perekonomian

Berikut diuraikan struktur ekonomi Kabupaten Ponorogo beserta perkembangannya.

1. Struktur Ekonomi Wilayah

Struktur ekonomi di Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 terbesar di topang oleh lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan dimana pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 27,62% dan terus mengalami penurunan hingga 24,63% pada tahun 2020.

Sektor penyumbang kedua terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah lapangan usaha sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi lebih dari 17% setiap tahunnya. Pada sektor ini ada kecenderungan mengalami peningkatan sejak tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 17,63% dan tahun 2019 menjadi sebesar 18,78% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi turun dibanding tahun sebelumnya 2019 menjadi sebesar 18,02%. Hal ini dimungkinkan karena adanya dampak pandemik Covid 19 yang mengurangi dan membatasi perdagangan dalam berbagai skala baik nasional maupun regional.

Sektor ketiga yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sektor konstruksi. Program pembangunan fisik yang di laksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah memberikan andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan PDRB di Kabupaten Ponorogo. Demikian juga dengan industri pengolahan nampaknya tidak begitu terpengaruh dengan adanya pandemi Covid, hal ini terlihat adanya peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan ini selama lima tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 6,92% atau Rp. 851.983,5 juta dan pada tahun 2020 naik menjadi 7,61% atau sebesar Rp. 1.078.554,59 juta. Untuk lebih jelas nilai kontribusi dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017–2021

No	Sektor	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.381.490,1	3.416.533,8	3.410.714,4	3.492.745,46	3.556,9
2	Pertambangan dan Penggalian	302.043,2	309.947,5	317.655,3	298.903,87	302,8
3	Industri Pengolahan	923.501,5	993.511,5	1.063.788	1.078.554,59	1.150,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.723,5	12.188,9	13.113,6	12.973,07	13,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.649,6	13.460,7	14.384,9	14.921,71	16,0
6	Konstruksi	1.211.742,5	1.306.119	1.402.805,5	1.305.182,01	1.322,8



No	Sektor	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.340.398,1	2.515.056,9	2.685.828,9	2.553.136,73	2.677,2
8	Transportasi dan Pergudangan	229.515,3	248.675,1	271.037,1	255.403,8	283,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	396.207,5	428.448,9	463.200,4	421.548,87	432,1
10	Informasi dan Komunikasi	1.149.400,9	1.230.838,2	1.328.660,3	1.424.628,72	1.515,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	410.130,1	430.798,9	448.552,7	442.635,54	443,5
12	Real Estate	342.395,8	367.902,2	390.946,9	397.387,52	405,3
13	Jasa Perusahaan	58.193,2	62.574,9	66.943,9	62.156,83	63,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	685.529,1	715,061	734.745,5	721.789,05	717,3
15	Jasa Pendidikan	1.107.340,4	1.173.006,3	1.260.806,6	1.295.241,9	1.308,7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.131,5	111.255,4	119.808,2	129.903,88	137,5
17	Jasa Lainnya	268.057	284.192,8	308.793,1	261.508,81	273,0
	Total	12.933.449,3	13.619.571,9	14.301.785,3	14.301.785,3	14.620,0

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Ponorogo tahun 2021 senilai 21.350,00 miliar rupiah. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Ponorogo. Sumbangan kategori tersebut mencapai 27,04 persen pada PDRB Kabupaten Ponorogo di tahun 2021. Laju pertumbuhan PDRB di tahun 2021 sebesar -3,19 persen.

Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017–2021

Lapangan Usaha	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.156,10	5.393,19	5.491,41	5.679,07	5.774,1
Pertambangan dan Penggalian	397,23	435,55	457,58	437,43	453,3
Industri Pengolahan	1.242,81	1.376,31	1.502,80	1.555,91	1.715,5
Pengadaan Listrik dan Gas	14,73	15,95	17,45	17,16	17,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,94	17,14	18,34	19,18	20,8
Konstruksi	1.740,23	1.895,54	2.036,23	1.905,29	1.963,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.012,14	3.374,78	3.681,75	3.555,79	3.792,5
Transportasi dan Pergudangan	307,73	343,08	383,90	364,79	413,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	550,51	609,89	673,68	619,79	667,5
Informasi dan Komunikasi	1.233,53	1.322,20	1.445,54	1.554,97	1.661,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	579,76	627,11	659,63	666,95	693,2
Real Estate	433,79	487,65	532,40	536,17	547,9



Lapangan Usaha	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Jasa Perusahaan	78,82	88,49	97,06	90,79	93,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	866,53	932,62	1.032,59	1.126,32	1.151,7
Jasa Pendidikan	1.379,00	1.513,72	1.627,86	1.778,40	1.813,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123,21	136,8	149,80	165,08	194,1
Jasa lainnya	315,75	343,97	377,11	416,18	376,9
Total	16.419,19	17.690,42	19.174,23	20.483,75	21.350,0

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Ponorogo berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2020 mencapai 20,51 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2020 mencapai Rp. 14,17 triliun. Sedangkan pada tahun - tahun sebelumnya PDRB Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah masing-masing Rp. 16.419.185,20 (2016), Rp. 17.690.420,20 (2017), Rp. 19.181.493,00 (2018), dan Rp 20.498.887,00 pada tahun 2019. Sedangkan angka PDRB Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, adalah Rp. 12.305.652,00 (2016), Rp. 12.933.449,30 (2017), Rp. 13.619.571,90 (2018) dan Rp. 14.301.785,30 pada tahun 2019.

Dampak pandemi Covid 19 yang telah melumpuhkan seluruh sendi-sendi ekonomi, dibatasinya aktivitas ekonomi di daerah, antar daerah, nasional bahkan seluruh dunia berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,90 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,43 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 7,22 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar minus 15,31 persen diikuti lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar minus 8,99 persen. Kebijakan pemerintah berupa realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dana transfer ke daerah yang di fokuskan untuk penanganan Covid 19 dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten maupun Dana Desa mendorong sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh positif dan terbesar di bandingkan sektor lainnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa program-program penanganan Covid 19 dan bantuan sosial mempunyai manfaat yang besar terhadap PDRB di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020. Di sektor pertanian merupakan sektor yang justru tumbuh dan berkembang positif dan tidak terpengaruh adanya pandemik dan pada tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 2,51 persen. Sektor lain yang masih mampu tumbuh positif tidak berkontraksi dengan adanya



Covid 19 yaitu Industri Pengolahan tumbuh 1,39 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 3,73 persen, real estate tumbuh sebesar 1,65 persen, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,22 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 2,73 persen. Laju pertumbuhan masing masing sektor lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 (%)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,80	-0,52	1,04	-0,17	2,51
2	Pertambangan dan Penggalian	2,27	6,58	2,62	2,49	-5,90
3	Industri Pengolahan	5,17	8,39	7,58	7,07	1,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,02	5,59	3,97	7,59	-1,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,61	7,72	6,41	6,87	3,73
6	Konstruksi	5,98	8,72	7,79	7,40	-6,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	7,89	7,46	6,79	-4,90
8	Transportasi dan Pergudangan	8,16	9,42	8,35	8,99	-5,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,09	8,52	8,14	8,11	-8,99
10	Informasi dan Komunikasi	7,72	7,99	7,09	7,95	7,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,23	4,76	5,04	4,12	-1,32
12	Real Estate	6,09	4,81	7,45	6,26	1,65
13	Jasa Perusahaan	5,87	6,57	7,53	6,98	-7,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,67	2,82	4,31	2,75	-1,76
15	Jasa Pendidikan	7,19	6,98	5,93	7,49	2,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	6,04	7,88	7,69	8,43
17	Jasa Lainnya	4,81	5,74	6,02	8,66	-15,31
	Total	5,29	5,10	5,31	5,01	-0,90

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB menurut ADHK, pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 8,99 persen pada tahun 2019, dan mengalami peningkatan setiap



tahunnya mulai tahun 2016 sebesar 8,16 persen dan puncaknya pada tahun 2017 mencapai 9,42 persen kemudian di tahun 2018 terjadi penurunan yaitu menjadi 8,35 persen, namun tahun 2020 berkontraksi sebesar minus 5,77 persen. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2016-2019 mengalami penurunan, pada tahun 2019 mencapai - 0,17 tetapi pada tahun 2020 justru mampu tumbuh sebesar 2,51 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 berkontraksi sebesar minus 0,90 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo tidak sebesar kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar minus 5,90 persen. Meskipun kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 2,39 persen.

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menunjukkan nilai pendapatan per kepala atau per satu orang penduduk. Analisis pendapatan per kapita merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan tersebut dipengaruhi antara lain tingkat pendidikan masyarakat, keterampilan, permodalan, sumber alam, perilaku dan budaya masyarakat. Pendapatan per kapita Kabupaten Ponorogo menurut harga berlaku tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita tingkat Provinsi Jawa Timur masih berada jauh di bawahnya.

Tabel 2. 7 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020

No.	Wilayah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ponorogo	18.898.289	20.416.764	22.000.000	23.524.894	23.528.000
2	Jawa Timur	47.473.500	51.228.450	55.437.380	59.257.090	57.555.000
3	Nasional	36.447.266	38.345.436	41.067.180	42.780.958	56.900.000

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

4. Inflasi

Inflasi adalah indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Tingginya laju inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa khususnya barang-barang kebutuhan pokok yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi penawaran.

Inflasi tahunan di Kabupaten Ponorogo (Madiun sebagai kabupaten/kota terdekat) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, puncaknya terjadi pada tahun 2017 dimana inflasi mencapai 4,78 %. Laju inflasi pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 8 Tingkat Inflasi (%) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jatim dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Ponorogo	Jawa Timur	Nasional
2016	2,25	2,70	1,36



2017	4,78	3,99	2,14
2018	2,71	2,82	1,73
2019	2,20	1,89	1,63
2020	1,54	1,44	0,94

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

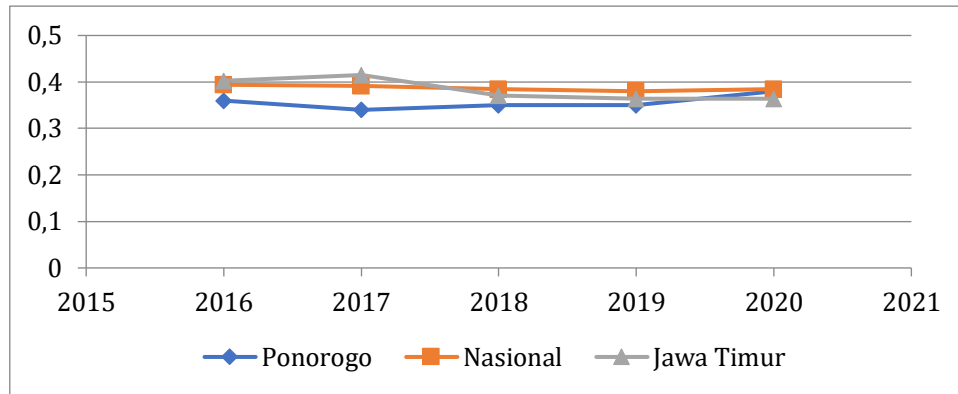
Jika dilihat dari pola inflasi tahunan selama tahun 2016–2020 Kabupaten Ponorogo (Madiun sebagai kabupaten terdekat) menunjukkan angka fluktuatif yang cenderung mengalami penurunan di dua tahun terakhir yaitu tahun 2018 dan 2019. Inflasi tahun 2018 sebesar 2,71 % mengalami penurunan menjadi sebesar 2,20% pada tahun 2019, dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,54 persen.

5. Indeks Gini

Dalam sebuah data pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat menjadi sebuah keharusan untuk menerapkan sistem perekonomian dan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kebutuhan masyarakat dan problematika yang terjadi di masyarakat merupakan landasan pembuatan kebijakan dalam kerangka mengurangi dan menutup berbagai ketertinggalan antar wilayah. Persoalan ketimpangan merupakan persoalan sosial yang terjadi sejak adanya peradaban. Ketimpangan tidak bisa dipisahkan dari dimensi keadilan dalam struktur sosial. Dalam dunia global ketimpangan terjadi: (1) Ketimpangan antar individu dalam suatu daerah; (2) Ketimpangan antar daerah; dan (3) Ketimpangan individu dalam suatu negara (nasional).

Indeks Gini adalah merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dan yang umum digunakan yaitu sejauh mana distribusi pendapatan di kalangan rumah tangga mengalami penyimpangan dari distribusi merata secara sempurna. Nilai Indeks Gini yang semakin mendekati angka Nol menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sementara itu, nilai Indeks Gini yang semakin mendekati angka 1 (satu) menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Selama 3 (tiga) tahun, Indeks Gini Kabupaten Ponorogo menunjukkan tingkat penurunan pembangunan dan pendapatan yang mengalami penurunan. Nilai Indeks Gini tahun 2016 sebesar 0,47, tahun 2017 sebesar 0,40 dan tahun 2018 sebesar 0,37 dan tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 0,47 artinya distribusi pendapatan masyarakat Ponorogo masih terdapat ketimpangan, setiap tahun gap antara orang kaya dan miskin semakin lebar. Begitu juga di tingkat provinsi maupun nasional. Indeks Gini Kabupaten Ponorogo tahun 2016–2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. 4 Indeks Gini Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, 2021

2.3.2 Potensi Daerah

Konsep potensial akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Ponorogo adalah Kawasan Pengembangan Agropolitan, agroforestry dan pariwisata. Penentuan wilayah sebagai kawasan agropolitan, agrowisata dan agroforestry didasari dengan berbagai pertimbangan di antaranya memiliki ketersediaan sarana prasarana yang memadai, produktivitas tinggi dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan, bernilai ekonomi tinggi dan juga merupakan daerah cepat tumbuh. Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (agraris). Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19.9% dari luas wilayah, belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan dan perkebunan. Adapun kecamatan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan dan agroforestry adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan Pudak

Sebagai wilayah yang berada di pegunungan lereng Gunung Wilis, Kecamatan Pudak cocok untuk budidaya tanaman hortikultura (buah dan sayur). Kondisi tersebut ditunjang dengan ketersediaan air yang melimpah dan kontur tanah yang berbukit-bukit. Selain itu wilayah ini cocok untuk perkebunan seperti cengkeh, kapuk randu, kopi, dan melinjo. Kecamatan Pudak selain menghasilkan produk tanaman pangan dan hortikultura juga dikembangkan sektor peternakan terutama sapi perah. Populasi tertinggi sapi perah berada di Kecamatan Pudak selain Kecamatan Sooko dan Kecamatan Pulung. Selain itu wilayah Kecamatan Pudak diperuntukkan untuk Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (RPKP) dan pengembangan tanaman porang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat petani di Kawasan ini. Kecamatan Pudak berada di lereng Gunung Wilis, di lereng gunung Wilis inilah yang membuat Kecamatan Pudak mempunyai potensi wisata alam yang indah. Potensi wisata yang berada di Kecamatan Pudak antara lain air terjun Coban Lawe, tanah goyang, Puncak Kahyangan, hutan pinus dan perkebunan sayur.

2) Kecamatan Ngebel



Wilayah Kecamatan Ngebel berada pada lereng Gunung Wilis dan terdapat telaga yang cukup besar. Untuk itu wilayah ini cocok untuk dijadikan potensi pengembangan perikanan kerambah air tawar. Pengelolaan perikanan air tawar dapat dilakukan dengan sistem kerambah. Di Kecamatan Ngebel karena merupakan dataran tinggi dikembangkan juga sektor perkebunan seperti cengkeh, kopi, dan melinjo, selain produk perkebunan produk hortikultura juga menjadi andalan yang mulai dikembangkan dan Kecamatan Ngebel memiliki potensi yang tinggi terutama untuk buah durian dan manggis. Di Kecamatan Ngebel banyak dikembangkan agroforestery yang bekerja sama dengan perhutani sebagai Kawasan wisata yang berbasis agro. Di Kecamatan Ngebel memiliki wisata alam berupa Telaga Ngebel yang masih sangat alami, di samping telaga ngebel telah dikembangkan wisata Pemandian Air Panas, wisata Agro Kampung Durian, wisata alam Mlokosewu dan Ngebel Adventure Park (NAV) dan masih banyak potensi wisata di wilayah Kecamatan Ngebel.

3) Kecamatan Babadan

Kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Ponorogo ini cocok untuk dikembangkan tanaman padi. Adapun desa yang dapat ditanami padi meliputi: Desa Kertosari, Cekok, Patihan Wetan, Kadipaten, Japan, Gupolo, Polorejo, Bareng, Ngunut, Sukosari, Lembah, Pondok, Babadan, Purwosari, dan Trisno. Pengembangan benih padi Kreasi Insan Petani (KIP) 700 maupun 900 selama lima tahun kedepan akan menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan produktivitas padi di Ponorogo.

4) Kecamatan Sooko

Kecamatan Sooko memiliki luas wilayah 5.532,10 ha dan berada pada ketinggian +450 m - 600 m di atas permukaan laut sehingga sangat cocok untuk perkebunan cengkeh. Selain untuk perkebunan, wilayah Kecamatan Sooko sangat cocok untuk ditanami padi organik. Hal ini dikarenakan tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan curah hujan yang mencapai 20 kali dalam satu bulan sehingga ketersediaan air sangat berlimpah. Ketersediaan air yang berlimpah juga digunakan dalam pembudidayaan perikanan air tawar. Salah satu wujudnya adalah dengan adanya Kampung Ikan di Desa Jurug Kecamatan Sooko. Pengembangan porang di Kecamatan sooko sangat cocok dan sudah dilakukan oleh petani secara mandiri. Saat ini luas lahan tanaman porang kurang lebih 193 ha.

5) Kecamatan Ngrayun

Kecamatan Ngrayun berada pada ujung selatan Kabupaten Ponorogo berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kabupaten dengan jumlah desa sebanyak sebelas desa untuk total luas wilayah 184,76 km², Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan yang berada di ketinggian 480 s/d 880 mdpl. dan mempunyai potensi tanah longsor karena berada di dataran tinggi. Potensi terbesar di Kecamatan Ngrayun adalah sektor pertanian yaitu produksi cabai dengan luasan 11 ha pada tahun 2018 menghasilkan 418 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka pada tahun 2019 Kecamatan Ngrayun terutama menghasilkan jahe 1.452.000 kg,



laos/lengkuas 17.500 kg, kencur 2.800 kg, kunyit 425.000 kg dengan luasan lahan jahe 1.872.302 m² laos/lengkuas 19,322 m² , kencur 7.364 m² , dan kunyit 986.000 m² , secara umum tanaman biofarmaka mengalami penurunan sebesar 50 %, hal ini disebabkan petani banyak yang beralih menanam porang yang saat ini mempunyai prospek menjanjikan (BPS Ponorogo). Berada di ketinggian yang cukup tinggi potensi alam Kecamatan Ngrayun dapat dikembangkan terutama pada sektor pariwisata antara lain air Jurang Gandul di Desa Baosan Lor, Watu Semaur . Watu Semaur ini terletak dipinggir jalan raya Ngrayun-Jajar tepatnya di Desa Selur, air terjun Sunggah di Desa Selur.

6) Kecamatan Pulung

Kecamatan Pulung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo Kecamatan ini berjarak sekitar 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah timur. Pusat pemerintahannya berada di Desa Pulung. Nama Pulung memiliki arti keberuntungan yang tidak terduga-duga. Kecamatan Pulung sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jenangan dan Ngebel, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pudak, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Sawoo sementara untuk di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Siman, Jenangan dan Mlarak. Adapun luas wilayah Pulung adalah 127,55 km² . Kecamatan Pulung berada di ketinggian 356 s/d 746 mdpl, dengan jumlah desa sebanyak 18 desa. Kecamatan Pulung memiliki potensi pertanian dengan luasan lahan produksi bawang merah 24 ha, cabai 74 ha, petai 14 ha dan tomat 8 ha. Untuk tanaman biofarmaka luasan lahan untuk jahe 210.000 m² , laos 80.000 m² , untuk kunyit 380 m² (BPS Ponorogo). Saat ini banyak petani yang mengembangkan tanaman porang. Sektor peternakan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Pulung baik peternakan sapi atau kambing, karena berada di wilayah dataran tinggi potensi untuk dikembangkan sapi potong maupun sapi perah.

7) Kecamatan Sambit

Kecamatan Sambit merupakan daerah yang dilalui jalan raya antar kabupaten. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian yang masih luas dan subur sebagian besar ditanami padi dan di musim kemarau lahan ditanami berbagai macam tanaman seperti melon, kedelai, jagung, kacang ijo dan aneka sayuran dan saat ini mulai dikembangkan tanaman porang. Tanaman perkebunan juga cukup potensial untuk dikembangkan diantaranya alpokat dan jambu mente . Selain itu perikanan dan peternakan lebah madu juga sangat potensial. Pada bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) terdapat pabrik tahu, genteng, batu bata candi serta sentra kerajinan tas anyaman. Kecamatan Sambit juga memiliki berbagai obyek wisata alam maupun religi diantaranya Gunung Kuik, air tejun Kedung Kuwung, Beji Banyu Panguripan, Beji Sirah Keteng serta wisata sejarah yaitu Gunung Tengger Belik Bacin di Desa Bancangan, Makam Kyai Atas Angin di Desa Maguwan serta Musium desa.

8) Kecamatan Bungkal



Kecamatan Bungkal terletak di bagian selatan Kabupaten Ponorogo sekitar 20 km dari pusat kota dengan luas wilayah 54,01 km² sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sambit, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngrayun, sebelah barat dengan Kecamatan Slahung dan Kecamatan Balong serta sebelah utara dengan Kecamatan Jetis. Desa terluas adalah Desa Munggu yang mempunyai luas wilayah mencapai 9,34 km² atau 17,29 persen dari total wilayah Kecamatan Bungkal. Sedangkan wilayah terkecil adalah Desa Kwajon dengan total luas wilayah 0,81 km². Potensi yang dimiliki Kecamatan Bungkal pada sektor pariwisata, pertanian dan peternakan. Pada sektor pariwisata terdapat mata air Beji Pager dan ekowisata Desa Kupuk, pada sektor pertanian terdapat komoditas unggulan yaitu jagung dan tebu, sedangkan pada peternakan terdapat potensi peternakan sapi pembesaran. Desa- desa di Kecamatan Bungkal memiliki potensi untuk mengembangkan tanaman porang yang saat ini banyak permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.

9) Kecamatan Slahung

Kecamatan Slahung merupakan salah satu Kecamatan di Ponorogo yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan yang berjarak 28 km dari ibukota kabupaten. Secara Geografi berada di bagian selatan Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 90,34 km² atau sekitar 7% dari luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 22 desa yaitu Tugurejo, Senepo, Slahung, Caluk, Broto, Menggare, Kambeng, Wates, Ngilo-ngilo, Duri, Ngloning, Plancungan, Jebeng, Galak, Truneng, Simo, Crabak, Mojopitu, Gundik, Nailan, Gombang dan Janti. Wilayahnya bagian selatan, barat dan timur berupa perbukitan sedangkan bagian utara berupa dataran. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut : Utara dengan Kecamatan Balong, Timur dengan Kecamatan Bungkal, Selatan dengan Kecamatan Ngrayun, Barat dengan Kabupaten Pacitan. Kecamatan ini berada di bagian selatan Kabupaten Ponorogo, dan wilayahnya berupa perbukitan sebelah selatan, barat, dan timur, sedangkan wilayah utara berupa dataran rendah. Pusat pemerintahannya berada di Desa Slahung. Interaksi masyarakat Pacitan yang dekat dengan wilayah ini sudah berlangsung sejak dulu kala, Pasar Slahung sangat dikenal oleh masyarakat Lorok di Kabupaten Pacitan. yang mempunyai luas wilayah 90,34 km² dengan rincian luas sawah 2.166 ha, luas lahan bukan sawah 2.758 ha, lahan bukan pertanian 4.110 ha, ketinggian 169 mdpl, jumlah penduduk Kec. Slahung total keseluruhan 54.921 orang dengan jumlah laki-laki 27.339 orang dan jumlah perempuan 27.582 orang. Sarana Pendidikan yang dimiliki yaitu 37 Taman Kanak-kanak (TK), 37 Sekolah Dasar (SD), 5 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 7 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 6 Madrasah Aliyah (MI). Sarana Kesehatan yang dimiliki yaitu 1 Poliklinik, 2 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu, 2 Apotek, 2 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, dan 22 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa. Dibidang pertanian terdapat tanaman Biofarmaka seperti: jahe, laos, kencur dan kunyit. Untuk tanaman buah buahan



seperti mangga, durian, jeruk, pisang dan pepaya. Tanaman perkebunan meliputi: kelapa, kakao, tebu dan tembakau. Tanaman pangan meliputi jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Di Kecamatan Slahung juga terdapat sawah irigasi teknis yang ditanami padi, bahkan di Kecamatan Slahung telah menjadi pilot project pembuatan sumur dalam yang berada di Desa Duri untuk mengairi areal sawah tadah hujan seluas 20ha. Sedangkan untuk sektor pariwisata terdapat tiga desa wisata yang dapat dikembangkan yaitu : 1. Desa Wates Di Desa Wates terdapat obyek wisata puncak Gunung Pertapan, Grojokan Kedung Olong dan Watu Bon 2. Caluk Di Desa Caluk terdapat obyek wisata Puncak Tapak Jaran, Alas Multi Gunduk dan Gunung Pringgitan 3. Desa Slahung Di Desa Slahung terdapat obyek wisata religi makam Bupati Gading serta Kirab Bupati Gading Joyo.

10) Kecamatan Badegan

Wilayah Kecamatan Badegan yang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berjarak sekitar 18 kilometer^[2] dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah barat daya. Pusat pemerintahannya berada di Desa Badegan. Kecamatan Badegan ini mempunyai 10 desa yakni Desa Karang, Karangjoho, Tanjung Gunung, Tanjung Rejo, Watubonang, Kapuran, Dayakan, Bandar Alim, Badegan, Biting. Kecamatan Badegan mempunyai luas wilayah 5.235 km² dengan rincian luas sawah 891 ha, luas lahan bukan sawah 1.705 ha, lahan bukan pertanian 2.639 ha, ketinggian 170 mdpl, jumlah penduduk Kec. Badegan total keseluruhan 29.374 orang dengan jumlah laki-laki 14.608 orang dan jumlah perempuan 14.739 orang. Potensi yang dimiliki Kecamatan Badegan pada sektor pertanian dengan komoditi buah-buahan yaitu mangga, jeruk, pisang dan pepaya, sedangkan dari tanaman biofarma adalah kencur dan kunyit dan terdapat embung yang terletak di Desa Dayakan. Disamping itu Kecamatan Badegan mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman porang yang saat ini sedang dikembangkan.

11) Kecamatan Sampung

Kecamatan Sampung merupakan wilayah di sisi tenggara Kabupaten Ponorogo dan berbatasan dengan Kabupaten Magetan, terdapat hutan lindung yang merupakan kawasan lindung dan juga mendukung pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 150 KV (lima ratus kilovolt) yang melewati wilayah di kecamatan ini. Selain itu wilayah Kecamatan Sampung juga termasuk kawasan rawan longsor dan kawasan rawan bencana alam geologi. Potensi di wilayah Kecamatan Sampung antara lain merupakan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang merupakan penghasil padi dan hasil pertanian lainnya serta kawasan peruntukan pertambangan non logam dan batuan berupa batu gamping. Kecamatan Sampung dengan potensinya akan dikembangkan wisata budaya dan buatan berupa Museum dan Monumen Reyog yang akan



terkoneksi dengan destinasi wisata lainnya seperti Telaga Sarangan. Destinasi wisata lain di masing-masing desa juga mempunyai potensi daya tarik wisata.

12) Kecamatan Sawoo

Kecamatan Sawoo merupakan wilayah di sisi barat daya Kabupaten Ponorogo dan berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, terdapat hutan lindung yang merupakan kawasan lindung, adanya pembangunan Waduk Bendo berpotensi sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun Kecamatan Sawoo juga mendukung jaringan energi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 70/20 KV (tujuh puluh kilovolt) yang melewati wilayah ini. Selain itu juga merupakan kawasan rawan longsor dan kawasan rawan bencana alam geologi. Potensi di Kecamatan Sawoo antara lain kawasan lindung pariwisata (air terjun Klentheng di Kecamatan Sawoo), kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menghasilkan padi, polowijo, ubi kayu, jagung, panili, sawo dan nangka dan hasil pertanian lainnya, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan industri rumah tangga (kerajinan peralatan rumah tangga), selain itu juga merupakan kawasan peruntukan pertambangan logam (emas), non logam dan batuan (batu gamping, batuan beku, trast). Wilayah Kecamatan Sawoo juga mempunyai potensi dan iklimnya cocok untuk sentra pengembangan porang.

13) Kecamatan Ponorogo

Kecamatan Ponorogo merupakan pusat pengembangan perkotaan Ponorogo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten dan mengembangkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama kabupaten dan melayani beberapa kecamatan disekitarnya dan sebagai pusat kawasan permukiman perkotaan. Selain itu juga terdapat pembangkit energi listrik yang disalurkan ke wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Mendukung jaringan jalan baik Nasional dan Provinsi serta rencana reaktivasi kereta api. Potensi lainnya antara lain merupakan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (industri pengolahan produk pertanian) dan kawasan peruntukan pariwisata budaya antara lain kirab pusaka, pagelaran wayang khusus, pagelaran seni Reog

14) Potensi Perikanan

Kabupaten Ponorogo tidak memiliki wilayah laut, sehingga perikanan yang dikembangkan adalah perikanan air tawar dengan produksi saat ini 1.677.658 ton, dengan jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, gurami, patin dan gabus. Produksi ikan terbesar adalah jenis ikan lele yang pada tahun 2020 produksinya mencapai 1.382,115 ton (Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020). Kecamatan Ngebel dengan memanfaatkan telaga Ngebel berpotensi untuk dikembangkan budidaya perikanan keramba air tawar.



15) **Potensi Pertanian**

Potensi pertanian komoditas tanaman pangan di Kabupaten Ponorogo terutama padi tersebar di seluruh kecamatan dengan luas panen tahun 2020 diperkirakan sebesar 65,07 ribu hektar mengalami peningkatan sebanyak 6.992,81 hektar atau 12,04 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 58,08 ribu hektar. Produksi padi pada 2020 diperkirakan sebesar 377,33 ribu ton GKG mengalami peningkatan sebanyak 55,13 ribu ton atau 17,11 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 322,21 ribu ton GKG. Sementara jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk produksi beras pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 216,76 ribu ton mengalami peningkatan sebanyak 31,67 ribu ton atau 17,11 persen dibandingkan 2019 sebesar 185,09 ribu ton (BPS Ponorogo). Komoditas hortikultura terutama sayuran paling banyak ada di Kecamatan Pudak yang tersebar di 6 (enam) desa dengan luasan lahan sebesar 340,8 hektar untuk wortel dan 254,2 hektar untuk luasan tanaman kubis. Sementara untuk jenis buah-buahan tersebar di seluruh kecamatan. Khusus di Kecamatan Ngebel mempunyai potensi untuk dikembangkan buah manggis, alpokat dan durian, untuk durian ada jenis durian Kanjeng yang dikembangkan dan sekaligus menjadi unggulan karena jenis durian asli Ponorogo. Di Kecamatan Ngrayun, Sooko, Ngebel, Sawoo, Sambit, Bungkal dan Slahung saat ini sedang dikembangkan tanaman porang sebagai diversifikasi usaha ataupun menjadi usaha pokok. Tanaman porang mempunyai prospek yang menjanjikan dengan nilai jual lebih tinggi

16) **Potensi Perkebunan**

Potensi perkebunan Kabupaten Ponorogo dengan produksi tembakau 910,31 ton (Kecamatan Bungkal, Balong Slahung), kopi 932,30 ton, cengkeh 183,002 ton kakao 760,05 ton berada di kecamatan Pudak Pulung, Sooko, Ngebel. Sementara untuk produksi tebu sebesar 6.007,99 ton dan kelapa sebesar 17.479,22 ton (Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan)

17) **Potensi Peternakan**

Potensi peternakan di Kabupaten Ponorogo saat dengan populasi kambing 254.878 ekor, domba 19.673 ekor, babi 160 ekor, untuk sapi potong 84.813 ekor yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Khususnya untuk sapi perah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan populasi sapi perah 3.574 ekor dengan produksi susu saat ini sebesar 6.920.319 liter yang terpusat di Kecamatan Pudak tersebar di 6 (enam) desa. Produksi telur sebesar 6.415.051 kg dan produksi daging sebesar 5.842.496 kg (Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan).

18) **Potensi Kehutanan**

Luas kawasan hutan wilayah Kabupaten Ponorogo saat ini 48.268,381 ha, untuk luas kawasan lindung dari klas hutan HAS, HL, KPKH, KPS, TBP sebesar 20.140,844 ha. Kerusakan hutan yang berasal dari klas hutan TK dan TKTBKP adalah 703.479 ha sementara untuk lahan kritis yang



direhabilitasi 756,9 ha (Perum Perhutani Divre Jatim Wilayah Madiun) Kawasan hutan saat ini dikembangkan untuk budidaya tanaman porang dengan bersinergi dengan LMDH, memberikan manfaat yang sangat besar baik untuk menambah kesejahteraan petani maupun melestarikan kawasan hutan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah hutan yang dominan yaitu pinus, jati, rimba campuran, sedangkan hutan nonkayu adalah daun kayu putih dan getah pinus. Seiring dengan adanya wilayah kehutanan tidak dipungkiri bahwa kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber mata air. Meningkatnya kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh penambangan yang tidak sesuai ketentuan berlaku dan sering terjadinya kebakaran hutan, banjir, berkurangnya tutupan lahan akibat penebangan hutan dan alih fungsi lahan, perubahan iklim, merupakan beberapa masalah yang memerlukan pendekatan secara bertahap untuk menyelesaikannya. Upaya yang dilakukan antara lain melalui gerakan untuk melindungi kawasan hutan

2.3.3 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

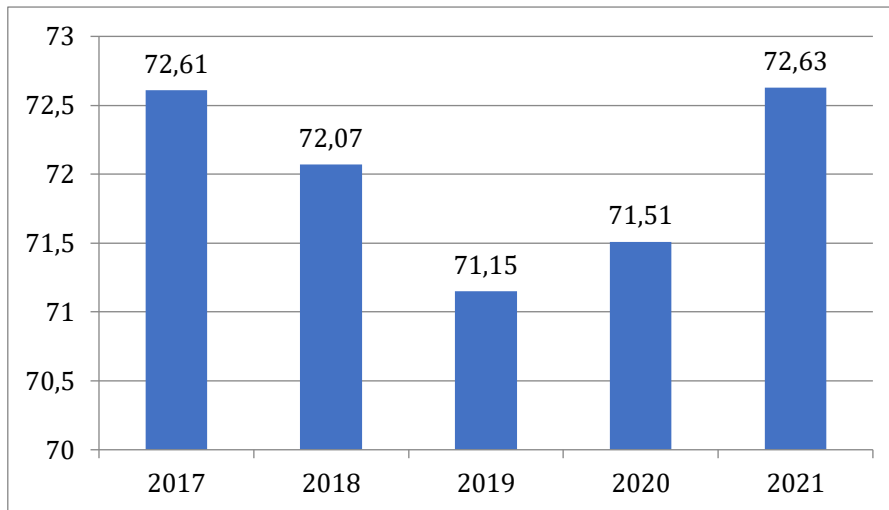
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2. 9 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Agustus 2019-2021

Jenis Kegiatan Utama	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
Penduduk Usia Kerja	715,3	718,4	721,3
Angkatan Kerja	509	513,8	523,9
Bekerja	491,1	490,9	500,9
Pengangguran	17,8	22,9	22,9
Bukan Angkatan Kerja	206,3	204,7	197,4
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3,5	4,45	4,38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	71,15	71,51	72,63



Sumber: Dokumen Ketenagakerjaan, 2021

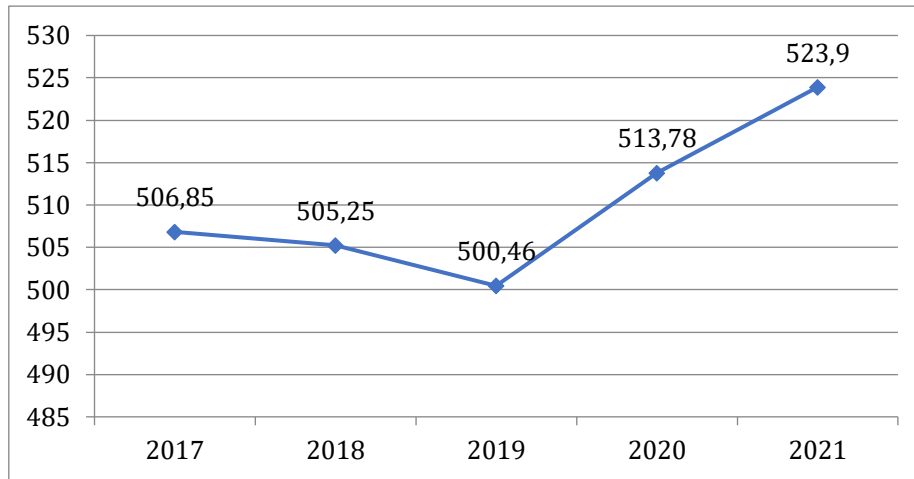


Gambar 2. 5 Grafik TPAK Agustus 2017-2021 di Kabupaten Ponorogo (%)

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Penduduk usia kerja adalah semua orang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Ponorogo pada Agustus 2021 sebanyak 721,3 ribu orang, naik 2,9 ribu orang dibanding Agustus 2020. Penduduk usia kerja cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Dari total penduduk usia kerja pada Agustus 2021 tersebut, 523,9 ribu orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,96% atau sekitar 10,1 ribu orang. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2021, sebanyak 500,9 ribu orang yang bekerja dan 22,9 ribu orang pengangguran.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo juga mengalami kenaikan. TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 72,63 persen, naik 1,11 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja. Kenaikan TPAK ini utamanya disebabkan oleh kenaikan jumlah orang yang bekerja. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.



Gambar 2. 6 Grafik Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2017-2021 di Kabupaten Ponorogo (ribu orang)
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

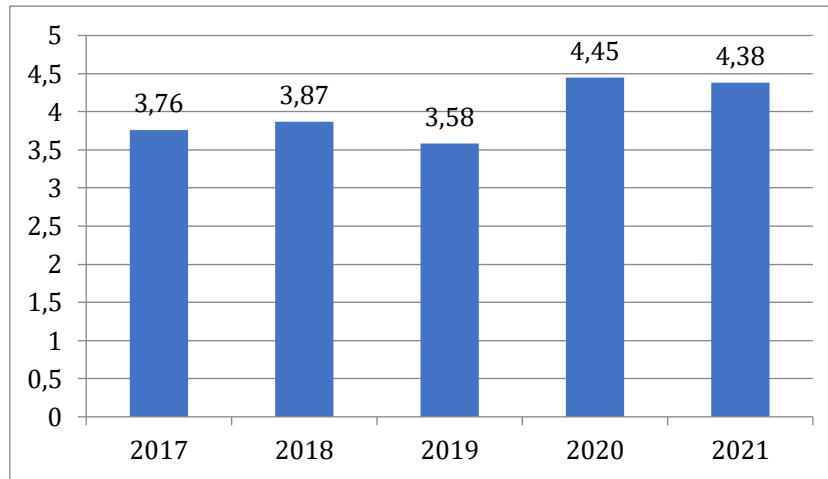
Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo pada Agustus 2020 sebesar 513,781 ribu orang, lebih rendah sekitar 13,32 ribu orang dibanding Agustus 2019. Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini menunjukkan perubahan cukup fluktuatif dengan kecenderungan naik, dampaknya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo yang fluktuatif juga pada kurun waktu tersebut.

Naiknya jumlah angkatan kerja berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo. Pada Agustus 2020 mengalami kenaikan menjadi 71,51 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 71,51 persen penduduk Kabupaten Ponorogo yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 28,49 persen sisanya memutuskan untuk folus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Banyak hal yang bisa diindikasikan sebagai pemicu tingkat pengangguran di Kabupaten Ponorogo antara lain dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara pasokan tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya.



Gambar 2. 7 Grafik TPT Tahun 2017-2021 di Kabupaten Ponorogo
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi

fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan pada penduduk perempuan namun menurun pada penduduk laki-laki. Meningkatnya TPT berarti jumlah penduduk yang menganggur semakin bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun peningkatan TPT penduduk perempuan yang cukup signifikan, namun persentasenya masih jauh lebih rendah dibandingkan TPT pada penduduk laki-laki. TPT Kabupaten Ponorogo tahun 2020 juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen.

Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan meningkatkan status pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan perguruan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Akibatnya sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Tabel 2. 10 TPT Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2019-2021

Tamat Pendidikan	2019	2020	2021
SD ke bawah	1,49	2,98	5,91
SMP	2,16	5,12	3,18



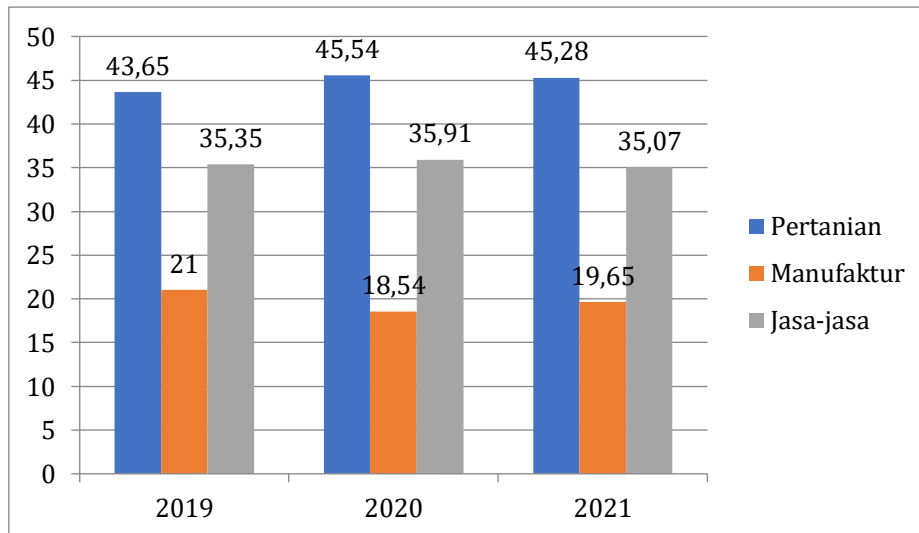
SMA	2,14	4,47	8,43
SMK	9,95	11,65	7,76
Universitas	4,26	7,69	3,53

Sumber: Dokumen Ketenagakerjaan, 2021

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, semua jenjang pendidikan TPT penduduk mengalami kenaikan pada tahun 2020. Secara keseluruhan TPT untuk jenjang pendidikan yang ditamatkan SMA ke atas mengalami peningkatan di tahun 2020. Perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh solusi permasalahan TPT di Kabupaten Ponorogo yang didorong oleh tingginya angka TPT penduduk dengan jenjang pendidikan tamatan SMA ke atas.

C. Penduduk yang Bekerja

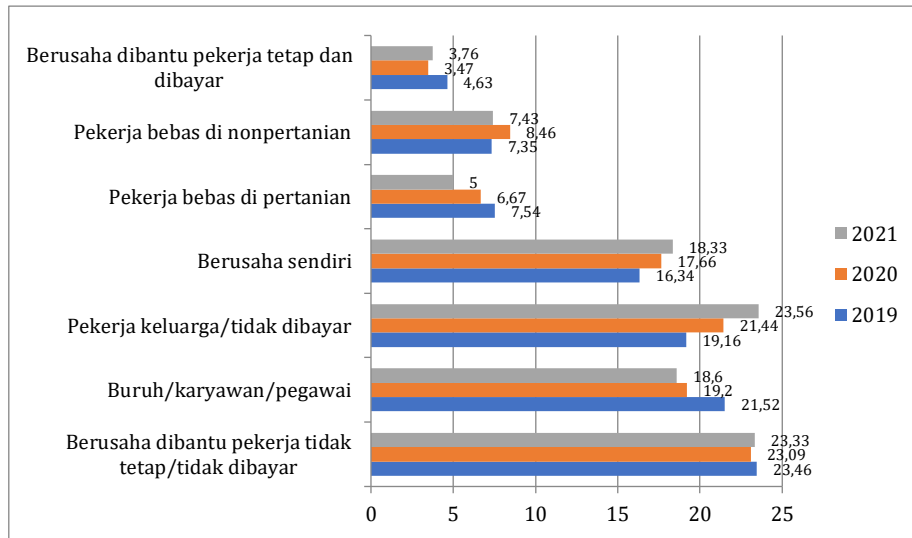
Penduduk yang bekerja merupakan cerminan angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 sebanyak 500,9 ribu, bertambah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 490,9 ribu orang.



Gambar 2. 8 Grafik TPAK Agustus 2017-2021 di Kabupaten Ponorogo

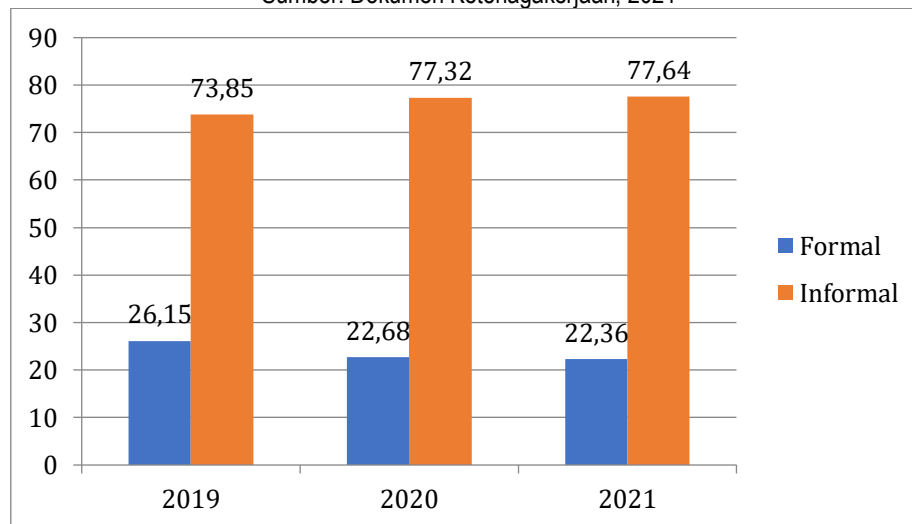
Sumber: Dokumen Ketenagakerjaan, 2021

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan Pertanian yang meliputi subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, mengalami penurunan persentase orang yang bekerja di sektor tersebut sebesar 0,26 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk lapangan pekerjaan jasa-jasa yang terdiri dari sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi, transportasi dan komunikasi, keuangan serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan juga mengalami penurunan sebesar 0,84 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Sedangkan lapangan pekerjaan industri yang terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, dan sektor konstruksi pada Agustus 2021 mengalami kenaikan persentase orang yang bekerja sebanyak 1,10 persen poin dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 2. 9 Grafik Presentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2019-2021 di Kabupaten Ponorogo

Sumber: Dokumen Ketenagakerjaan, 2021



Gambar 2. 10 Grafik Presentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal Informal Agustus 2019-2021 di Kabupaten Ponorogo

Sumber: Dokumen Ketenagakerjaan, 2021

Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal meliputi status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk bekerja di kegiatan informal. Berdasarkan identifikasi tersebut, pada Agustus 2021 terdapat sebanyak 22,36 persen orang bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 77,64 persen orang bekerja pada kegiatan informal di Kabupaten Ponorogo. Selama setahun terakhir (Agustus 2020-Agustus 2021), penduduk yang bekerja di kegiatan formal turun 0,32 persen poin seiring dengan meningkatnya persentase penduduk bekerja di kegiatan informal di Kabupaten Ponorogo. Penurunan penduduk bekerja di kegiatan formal ini disumbang oleh penurunan penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai.

2.3.4 Penduduk Miskin



Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo terus berkurang setiap tahunnya, kecuali saat tahun 2020 sedikit meningkat karena pandemi COVID-19. Tabel berikut menunjukkan garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020.

Tabel 2. 11 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
2016	266.312	102,06	11,75%
2017	279.168	99,03	11,39%
2018	297.467	90,22	10,36%
2019	313.175	83,97	9,64%
2020	326.205	86,74	9,95%

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2021

Dapat dilihat dari tabel persentase kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sebesar 9,95%. Selain itu berdasarkan data yang dihimpun dari BPS dalam periode 2016-2020 garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2016 garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo sebesar 266.312 (Rp/Kapita/Bulan) dan selalu meningkat sampai pada tahun 2020 dimana garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo sebesar 326.205 (Rp/Kapita/Bulan).

2.4 Kondisi Kesehatan

2.4.1 Jenis Penyakit Terbanyak

Berdasarkan data Indikator Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021, jenis penyakit yang ada di Kabupaten Ponorogo diantaranya yaitu:

Tabel 2. 12 Jumlah Penyakit Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus		
		L	P	L+P
1	Kasus HIV	48	47	95
2	Kasus Baru AIDS	13	11	24
3	Kasus Baru Kusta (PB+MB)	1	0	1
4	Kasus Konfirmasi COVID-19	5.409	5.863	11.272
5	Kasus Hepatitis B	0	40	37
6	Kasus Suspek Campak	7	9	16
7	Penderita Kronis Filariasis	7	15	22

Sumber: Indikator Kerja Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis penyakit terbanyak di Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2021 yaitu kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 11.272 kasus dan kasus HIV sebanyak



95 kasus. Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Akan tetapi, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS menyatakan bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). Sedangkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

2.4.2 Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ponorogo meliputi rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek. Berikut merupakan tabel jumlah fasilitas Kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2. 13 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

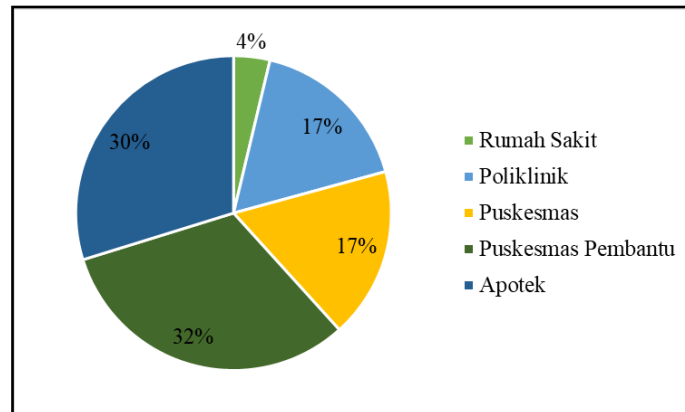
No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Ngrayun	-	2	1	3	1
2	Slahung	-	1	2	3	3
3	Bungkal	-	-	1	3	1
4	Sambit	-	-	2	2	4
5	Sawoo	-	1	2	4	1
6	Sooko	-	-	1	2	1
7	Pudak	-	1	1	2	1
8	Pulung	-	3	2	4	3
9	Mlarak	1	2	1	2	4
10	Siman	-	2	2	3	5
11	Jetis	-	1	1	2	3
12	Balong	-	2	2	4	2
13	Kauman	1	1	2	1	4
14	Jambon	-	1	2	2	1
15	Badegan	-	-	1	3	1
16	Sampung	-	-	2	3	-
17	Sukorejo	-	4	1	5	3
18	Ponorogo	5	5	2	3	10
19	Babadan	-	4	2	3	5
20	Jenangan	-	2	2	3	3
21	Ngebel	-	-	1	3	-
	Jumlah	7	32	33	60	56

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fasilitas kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jumlah



fasilitas kesehatan di Kabupaten Ponorogo paling banyak yaitu puskesmas pembantu sebanyak 60 unit, sedangkan fasilitas kesehatan rumah sakit memiliki jumlah paling sedikit yaitu 7 unit.



Gambar 2.11 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ponorogo, 2021
Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Tabel 2.14 Jumlah Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana (Faskes KB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, 2021

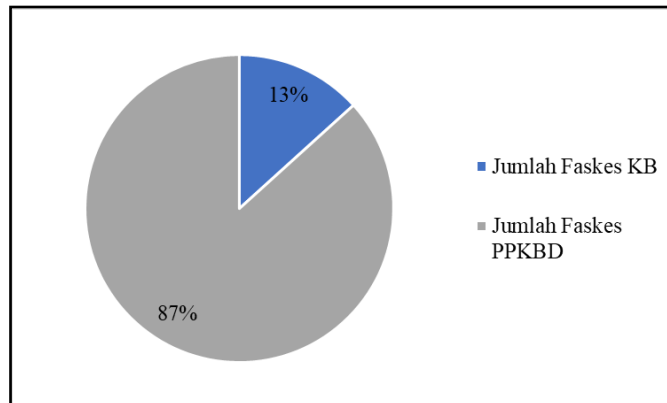
No.	Kecamatan	Jumlah Faskes KB	Jumlah Faskes PPKBD
1	Ngrayun	1	11
2	Slahung	2	22
3	Bungkal	1	19
4	Sambit	2	16
5	Sawoo	3	14
6	Sooko	1	6
7	Pudak	1	6
8	Pulung	4	18
9	Mlarak	1	15
10	Siman	2	18
11	Jetis	1	14
12	Balong	1	20
13	Kauman	2	16
14	Jambon	1	13
15	Badegan	1	10
16	Sampung	2	12
17	Sukorejo	2	18
18	Ponorogo	12	19
19	Babadan	4	15
20	Jenangan	2	17
21	Ngebek	1	8
Jumlah		47	307

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah fasilitas PPKBD di Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah paling banyak yaitu 307 unit dibandingkan dengan jumlah fasilitas KB yaitu 47 unit. Jumlah fasilitas PPKBD paling banyak terdapat di Kecamatan Slahung yaitu 22 unit, sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Sooko dan Kecamatan Pudak masing-masing



berjumlah 6 unit. Sementara itu fasilitas kesehatan KB paling banyak terdapat di Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 12 unit.



Gambar 2. 12 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana (Faskes KB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kabupaten Ponorogo, 2021
Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

2.4.3 Jumlah Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Jumlah pegawai di Dinas Kesehatan serta UPT pada tahun 2020 sebanyak 1.473 orang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural

- a. Struktural Eselon II : 1
- b. Struktural Eselon III : 5
- c. Struktural Eselon IV: 15

2. Pejabat Fungsional: 1.173

- a. Dokter umum : 59
- b. Dokter gigi : 26
- c. Perawat : 475
- d. Bidan : 419
- e. Kesehatan Masyarakat : 36
- f. Sanitarian : 24
- g. Petugas Gizi : 26
- h. Analis Laboratorium : 27



- i. Teknik Biomedik : 4
- j. Keterampilan Fisik : 4
- k. Kefarmasian : 21

3. Tenaga Dukungan Manajemen: 279

Berdasarkan data Indikator Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021, jumlah tenaga Kesehatan Kabupaten Ponorogo yaitu:

- 1. Bidan : 725 orang
- 2. Perawat : 1.529 orang
- 3. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 60 orang
- 4. Tenaga Sanitasi : 51 orang
- 5. Tenaga Gizi : 65 orang
- 6. Tenaga Kefarmasian : 311 orang

2.5 Kondisi Sarana Prasarana

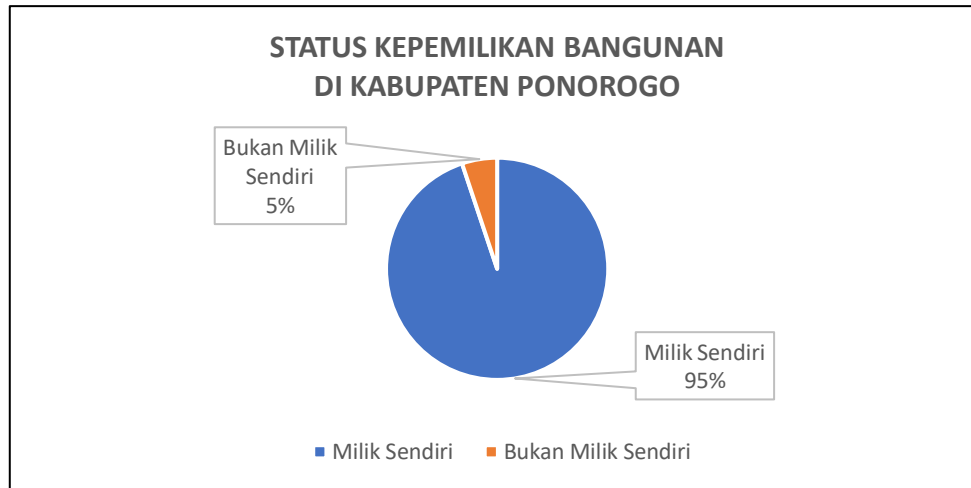
2.5.1 Perumahan dan Sarana

A. Perumahan

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km² dan jumlah penduduk sebanyak 955.839 jiwa. Perumahan menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk sekaligus faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Kondisi perumahan dapat menunjang kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Kondisi perumahan di Kabupaten Ponorogo akan diidentifikasi berdasarkan status kepemilikan bangunan dan kualitas rumah tinggal.

1. Status Kepemilikan Bangunan

Status kepemilikan bangunan pada umumnya berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Status kepemilikan bangunan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu milik sendiri dan bukan milik sendiri (sewa/kontrak, rumah milik orang tua/keluarga, rumah dinas, dsb). Berikut merupakan kondisi perumahan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan status kepemilikan bangunannya.



Gambar 2. 13 Status Kepemilikan Bangunan di Kabupaten Ponorogo (Rumah Tinggal)
Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ponorogo, 2021

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sebanyak 95% masyarakat di Kabupaten Ponorogo memiliki bangunan rumah tinggal dengan status milik sendiri, sementara 5% lainnya bukan milik sendiri. Pada tahun 2020, jumlah persentase masyarakat dengan status kepemilikan bangunan milik sendiri sebesar 93,07% dan menjadi 95% ketika tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kondisi perumahan terutama pada status kepemilikan bangunan di Kabupaten Ponorogo sebanyak 1,53%.

2. Kualitas Rumah Tinggal

Selanjutnya, kondisi perumahan di Kabupaten Ponorogo juga dapat diidentifikasi berdasarkan kualitas rumah tinggalnya. Secara umum, rumah tinggal merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi rumah tinggal masyarakat apakah telah termasuk ke dalam rumah layak huni atau belum. Penentuan kategori rumah layak huni diperoleh melalui beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti lantai, dinding, atap, luas lantai, serta fasilitas-fasilitas pendukungnya. Berikut merupakan kualitas rumah tinggal di Kabupaten Ponorogo berdasarkan dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo (2021).

Tabel 2. 15 Kualitas Rumah Tinggal

No	Kriteria	Persentase	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Lantai terluas bukan tanah	92,69	7,31
2	Jenis atap genteng	97,74	2,26
3	Dinding terluas tembok	95,76	4,24
4	Bangunan milik sendiri	95	5
5	Luas lantai $\geq 50 \text{ m}^2$	88,74	11,26
6	Fasilitas BAB hanya untuk ART	88,15	11,85

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ponorogo telah memiliki rumah tinggal yang layak huni, yaitu sekitar 93%. Sementara 7% lainnya



masih memiliki rumah tinggal yang belum layak huni. Hal tersebut diperoleh melalui jumlah rata-rata keseluruhan kriteria rumah tinggal layak huni di Kabupaten Ponorogo.

B. Fasilitas Pendidikan

Pada Tahun 2021, Kabupaten Ponorogo memiliki sarana pendidikan sejumlah 1.738 unit, yang terdiri dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebesar 127 unit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Berikut merupakan jumlah dan persebaran sarana pendidikan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan kecamatannya:

Tabel 2. 16 Jumlah dan Persebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Jumlah Per Tingkat Pendidikan (Unit)								
		1		2		3		4		
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
1	Ngrayun	40	6	49	1	9	7	2	3	1
2	Slahung	37	10	37	6	5	7	1	7	2
3	Bungkal	23	6	29	3	3	5	1	3	1
4	Sambit	26	6	23	8	4	2	1	2	1
5	Sawoo	23	9	39	4	6	7	-	3	1
6	Sooko	16	5	21	2	2	1	1	-	-
7	Pudak	8	-	8	0	1	-	-	1	-
8	Pulung	25	10	39	6	5	2	1	1	1
9	Mlarak	13	22	26	4	5	3	1	3	2
10	Siman	17	18	20	10	2	3	1	4	-
11	Jetis	7	23	20	6	4	6	2	5	2
12	Balong	23	9	27	6	4	4	2	4	2
13	Kauman	20	10	23	6	4	3	1	3	3
14	Jambon	15	16	22	8	3	4	1	3	1
15	Badegan	18	8	20	4	2	3	-	1	1
16	Sampung	23	7	31	4	4	3	1	2	1
17	Sukorejo	30	13	34	8	2	5	-	3	1
18	Ponorogo	38	21	32	8	13	9	6	11	13
19	Babadan	19	30	29	13	5	7	2	5	6
20	Jenangan	19	37	33	11	5	8	2	5	3
21	Ngebel	12	4	17	0	3	1	-	1	-
Kab. Ponorogo		452	270	579	118	91	90	26	70	42

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Ponorogo sebagai pusat aktivitas atau ibukota Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah sarana pendidikan paling banyak, yaitu 151 unit dengan jenis sarana pendidikan terbanyak ialah TK (38 unit). Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah sarana pendidikan paling sedikit adalah Kecamatan Pudak, yaitu 18 unit. Sementara itu, apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, dari tabel di atas menunjukkan bahwa SD merupakan jenis sarana pendidikan paling banyak di Kabupaten Ponorogo, yaitu sebanyak 579 unit.

C. Fasilitas Perdagangan (Perekonomian)

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026, kondisi perdagangan di Kabupaten Ponorogo memiliki potensi untuk berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah pengajuan usaha perdangan di tiap tahunnya. Pada tahun 2017, sebanyak 913



ijin usaha diterbitkan, terdiri dari pedagang besar, menengah, hingga kecil dan mikro. Selain itu, pada Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa sarana perdagangan, meliputi pasar, toko, kios, hingga warung.

Tabel 2. 17 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 – 2021

No	Jenis Sarana	Tahun (unit)			
		2018	2019	2020	2021
1	Pasar	28	28	29	28
2	Toko	210	218	227	233
3	Kios	505	505	505	715
4	Warung	1.804	1.933	2.037	2.037
Kab. Ponorogo		2.547	2.684	2.798	3.013

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing jenis sarana perdagangan di Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada jenis sarana kios tahun 2020 hingga 2021, terdapat penambahan jumlah sarana sebanyak 210 unit. Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan jumlah pada masing-masing sarana, diketahui bahwa warung merupakan jenis sarana perdagangan dengan jumlah terbanyak, yaitu 2.037 unit pada tahun 2021.

D. Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu fakto penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana kesehatan di suatu wilayah menjadi hal yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Ponorogo memiliki berbagai jenis sarana kesehatan, meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, dan apotek yang tersebar di seluruh kecamatan. Berikut merupakan jumlah dan persebaran sarana kesehatan di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 2. 18 Jumlah dan Persebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskemas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Ngrayun	-	2	1	3	1
2	Slahung	-	1	2	3	3
3	Bungkal	-	-	1	3	1
4	Sambit	-	-	2	2	4
5	Sawoo	-	1	2	4	1
6	Sooko	-	-	1	2	1
7	Pudak	-	1	1	2	1
8	Pulung	-	3	2	4	3
9	Mlarak	1	2	1	2	4
10	Siman	-	2	2	3	5
11	Jetis	-	1	1	2	3
12	Balong	-	2	2	4	2
13	Kauman	1	1	2	1	4
14	Jambon	-	1	2	2	1
15	Badegan	-	-	1	3	1
16	Sampung	-	-	2	3	-
17	Sukorejo	-	4	1	5	3



No	Kecamatan	Jumlah (Unit)				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskemas	Puskesmas Pembantu	Apotek
18	Ponorogo	5	5	2	3	10
19	Babadan	-	4	2	3	5
20	Jenangan	-	2	2	3	3
21	Ngebel	-	-	1	3	-
Kab. Ponorogo		7	32	33	60	56

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 188 unit sarana kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Dari beberapa jenis sarana kesehatan, puskesmas pembantu merupakan jenis dengan jumlah sarana terbanyak, yaitu 60 unit disusul kemudian dengan jenis sarana apotek sebanyak 56 unit. Sementara itu, apabila ditinjau dari persebarannya, diketahui bahwa Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan yang memiliki jumlah dan jenis sarana kesehatan terbanyak, yaitu 25 unit, terdiri dari 5 unit rumah sakit, 5 unit poliklinik, 2 unit puskesmas, 3 unit puskesmas pembantu, dan 10 unit apotek.

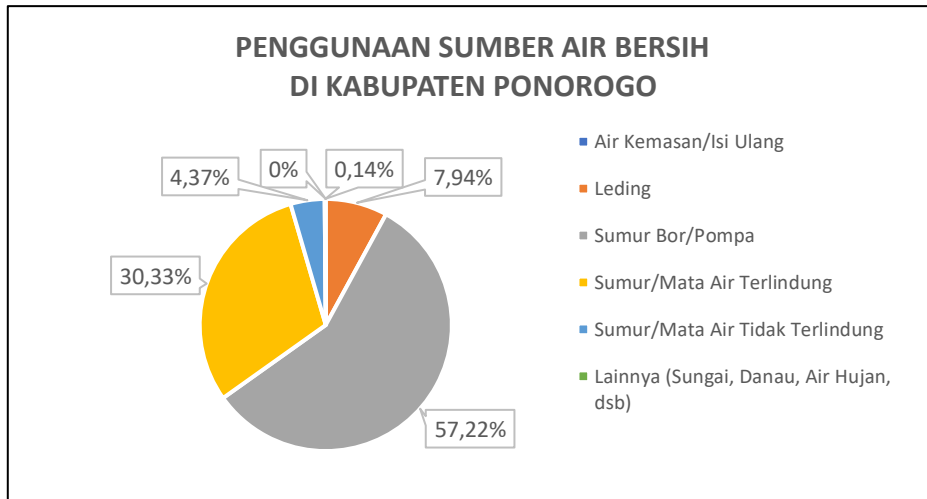
2.5.2 Air Bersih

Selain kondisi perumahan, keberadaan fasilitas sanitasi menjadi salah satu aspek penting yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya, sanitasi terdiri dari penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah. Pada tahun 2021, masyarakat Kabupaten Ponorogo sebagian besar memperoleh air bersih yang bersumber dari sumur bor, yaitu sebanyak 57,22%. Tingkat penggunaan sumur bor di Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain sumur bor, masyarakat di Kabupaten Ponorogo juga memiliki beberapa sumber air minum lainnya. Berikut merupakan persentase penggunaan sumber air minum atau air bersih di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 2. 19 Sumber Air Bersih yang Digunakan di Kabupaten Ponorogo

No	Sumber Air Bersih	Jumlah Penggunaan (%)
1	Air Kemasan/Isi Ulang	0
2	Leding	7,94
3	Sumur Bor/Pompa	57,22
4	Sumur/Mata Air Terlindung	30,33
5	Sumur/Mata Air Tidak Terlindung	4,37
6	Lainnya (Sungai, Danau, Air Hujan, dsb)	0,14

Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ponorogo, 2021



Gambar 2. 14 Persentase Penggunaan Sumber Air Bersih

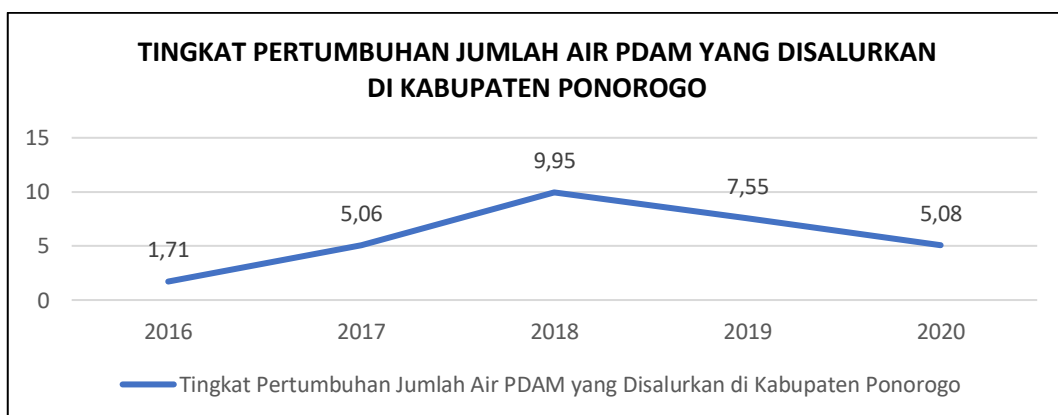
Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ponorogo, 2021

Sementara itu, penyaluran air bersih yang dilakukan melalui PDAM di Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Volume air yang berhasil disalurkan pada tahun 2020 sebanyak 3,94 juta meter kubik. Apabila ditinjau berdasarkan tingkat pertumbuhannya, terdapat kenaikan signifikan yang terjadi dari tahun 2016 hingga 2018, dan mencapai puncaknya ketika tahun 2018 sebesar 9,95%.

Tabel 2. 20 Jumlah Air PDAM yang Disalurkan di Kabupaten Ponorogo

No	Tahun	Jumlah Air PDAM yang Disalurkan (m ³)
1	2016	3.014.313
2	2017	3.166.696
3	2018	3.481.636
4	2019	3.744.445
5	2020	3.934.751

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo, 2021



Gambar 2. 15 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Air PDAM yang Disalurkan di Kabupaten Ponorogo

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo, 2021



Tabel 2. 21 Persentase Sarana Air Minum di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Sarana Air Minum	Inspeksi Kesehatan Lingkungan				Pemeriksaan			
				Jumlah Sarana Air Minum di IKL	%	Jumlah Sarana Air Minum Dengan Resiko Rendah dan Sedang	%	Jumlah Sarana Air Minum Diambil Sampel	%	Jumlah Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	%
1	Ngrayun	Ngrayun	11	11	100	8	72,7	4	36,4	2	50
2	Slahung	Slahung	153	72	47,1	47	65,3	22	14,4	18	81,8
		Nailan	33	16	48,5	16	100	16	48,5	16	100
3	Bungkal	Bungkal	135	58	43	49	84,5	18	13,3	17	94,4
4	Sambit	Sambit	126	35	27	31	88,6	13	10,3	13	100
		Wringinanom	14	14	100	10	71,4	1	7,1	1	100
5	Sawoo	Sawoo	205	43	20,7	30	69,8	17	8,2	9	52,9
		Bondrang	5	3	60	3	100	3	60	0	0
6	Sooko	Sooko	11	8	72,7	8	100	8	71,7	2	25
7	Pudak	Pudak	6	8	100	3	50	2	33,3	0	0
8	Pulung	Pulung	15	15	100	15	100	4	26,7	4	100
		Kesugihan	25	25	100	25	100	25	100	22	88
9	Mlarak	Mlarak	18	18	100	18	100	18	100	16	88,9
10	Siman	Siman	18	18	100	18	100	18	100	18	100
		Ronowijayan	94	58	59,6	58	100	56	59,6	56	100
11	Jetis	Jetis	29	29	100	29	100	29	100	25	86,2
12	Balong	Balong	144	56	38,9	51	91,1	12	8,3	11	91,7
13	Kauman	Kauman	33	33	100	33	100	16	48,5	15	93,8
		Ngrandu	16	14	87,5	14	100	14	87,5	14	100
14	Jambon	Jambon	166	135	81,3	135	100	130	78,3	130	100
15	Badegan	Badegan	58	45	77,6	45	100	13	22,4	13	100
16	Sampung	Sampung	69	58	84,1	58	100	0	0	0	0
		Kunti	12	11	91,7	11	100	11	91,7	11	100
17	Sukorejo	Sukorejo	58	68	100	14	24,1	14	24,1	10	71,4
18	Ponorogo	Po. Utara	33	205	62,1	205	100	0	0	0	0
		Po. Selatan	10	10	100	10	100	2	20	2	100



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Sarana Air Minum	Inspeksi Kesehatan Lingkungan				Pemeriksaan			
				Jumlah Sarana Air Minum di IKL	%	Jumlah Sarana Air Minum Dengan Resiko Rendah dan Sedang	%	Jumlah Sarana Air Minum Diambil Sampel	%	Jumlah Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	%
19	Babadan	Babadan	24	23	95,8	23	100	22	91,7	20	90,9
		Sukosari	19	19	100	19	100	19	100	16	84,2
20	Jenangan	Jenangan	52	53	100	36	69,2	36	69,2	12	33,3
		Setono	85	34	40	30	88,2	18	21,2	18	100
21	Ngebel	Ngebel	13	7	53,8	7	100	7	53,8	2	28,6
Kabupaten Ponorogo			1.693	1.187	70,1	1.057	89	568	33,5	493	86,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2021



2.5.3 Air Limbah

Salah satu sarana sanitasi dasar di masyarakat yang harus selalu terpenuhi ialah sistem pembuangan air limbah, terutama yang berasal dari aktivitas domestik. Pada tahun 2020, Kabupaten Ponorogo mendapat predikat kabupaten ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Berikut merupakan data mengenai karakteristik pembuangan air limbah masyarakat di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021:

Tabel 2. 22 Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Ponorogo

Kabupaten	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar		Jenis Kloset		Tempat Pembuangan Akhir Tinja	
	Sendiri	Bersama/Komunal	Leher Angsa	Lainnya	Tangki Septik/IPAL/SP AL	Lainnya
Kabupaten Ponorogo	88,82	11,18	91,94	8,06	89,04	10,96

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ponorogo telah menggunakan fasilitas tempat buang air bersama milik sendiri dengan jenis kloset leher angsa. Sementara itu, sebanyak 89,04% masyarakat telah menggunakan tangki septik dan melakukan pengolahan air limbah melalui IPAL. Sedangkan 10,96% lainnya masih membuang lumpur tinja pada lubang tanah, sungai, dan sebagainya.



Tabel 2. 23 Jumlah KK dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Sharing/Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)		Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK	Jumlah Sarana	Jumlah KK	Jumlah Sarana	Jumlah KK	Jumlah	%
1	Ngrayun	Ngrayun	17.766	816	2.448	6.726	6.726	8.592	8.592	17.766	100
2	Slahung	Slahung	9.248	148	444	3.290	3.290	5.135	5.514	9.248	100
		Nailan	7.821	0	0	24	24	7.793	7.797	7.821	100
3	Bungkal	Bungkal	13.940	340	340	43	43	10.649	13.557	13.940	100
4	Sambit	Sambit	6.249	19	170	13	325	3.118	5.754	6.249	100
		Wringinanom	8.326	0	0	4.743	5.746	1.846	2.580	8.326	100
5	Sawoo	Sawoo	18.532	413	517	6.391	7.882	9.630	10.133	18.532	100
		Bondrang	2.986	130	130	14	14	2.842	2.842	2.986	100
6	Sooko	Sooko	7.388	2.129	2.129	1.142	1.142	4.117	4.117	7.388	100
7	Pudak	Pudak	3.367	0	0	0	0	2.995	3.367	3.367	100
8	Pulung	Pulung	10.874	1.109	1.135	349	373	7.171	9.366	10.874	100
		Kesugihan	6.938	0	0	837	850	5.456	6.088	6.938	100
9	Mlarak	Mlarak	9.944	633	1.318	1.858	2.218	5.438	6.208	9.944	100
10	Siman	Siman	6.944	44	109	2	2	5.323	6.833	6.944	100
		Ronowijayan	8.590	0	0	58	58	5.960	8.532	8.590	100
11	Jetis	Jetis	10.905	307	307	1.797	1.820	6.727	8.778	10.905	100
12	Balong	Balong	16.789	448	448	549	549	15.792	15.792	16.789	100
13	Kauman	Kauman	13.131	0	0	1.464	3.459	6.225	9.672	13.131	100
		Ngrandu	4.238	12	35	82	82	4.121	4.121	4.238	100
14	Jambon	Jambon	16.919	104	602	287	949	12.273	15.368	16.919	100
15	Badegan	Badegan	14.302	97	488	257	1.286	2.506	12.528	14.302	100
16	Sampung	Sampung	9.393	638	638	1.412	1.413	7.342	7.342	9.393	100
		Kunti	4.678	66	205	1.198	1.201	3.272	3.272	4.678	100
17	Sukorejo	Sukorejo	18.430	571	828	3.134	4.506	9.545	13.096	18.430	100
18	Ponorogo	Po. Utara	12.332	28	94	0	0	10.115	12.238	12.332	100
		Po. Selatan	11.689	140	288	0	0	7.506	11.381	11.669	100
19	Babadan	Babadan	13.115	200	270	302	333	9.863	12.512	13.115	100
		Sukosari	8.986	778	778	21	21	6.699	8.187	8.986	100
20	Jenangan	Jenangan	33.753	674	674	1.825	1.825	31.034	31.254	33.753	100



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Sharing/Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSPP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)		Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK	Jumlah Sarana	Jumlah KK	Jumlah Sarana	Jumlah KK	Jumlah	%
		Setono	7.043	81	103	394	542	5.588	6.398	7.043	100
21	Ngebel	Ngebel	7.226	998	1.740	1.161	1.161	4.035	4.325	7.226	100
Kabupaten Ponorogo			341.822	10.923	16.238	39.371	47.840	228.668	277.744	341.822	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2021



2.5.4 Transportasi

Salah satu prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan perekonomian dan mobilitas masyarakat ialah tersedianya jaringan jalan dengan kondisi yang baik. Kabupaten Ponorogo memiliki total panjang jalan 1.002,58 km yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Berikut merupakan panjang jalan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan status jalannya:

Tabel 2. 24 Panjang Jalan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Status Jalan

No	Status Jalan	Panjang (km)
1	Jalan Nasional	42,76
2	Jalan Provinsi	43,71
3	Jalan Kabupaten/Kota	916,11
Total		1.002,58

Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ponorogo, 2021

Selanjutnya, jalan milik Kabupaten Ponorogo (status jalan kabupaten/kota) sepanjang 916,11 km dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi jalan dan jenis permukaannya. Berdasarkan tabel berikut, diketahui bahwa sebagian besar jalan di Kabupaten Ponorogo memiliki perkerasan berupa aspal dengan kondisi yang baik. Namun, masih terdapat ruas jalan yang mengalami kerusakan. Berdasarkan Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Tahun 2022, sepanjang 106,86 km jalan mengalami rusak dan 70,05 km jalan mengalami rusak berat. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat kegiatan perekonomian dan mobilitas masyarakat, sehingga perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Ponorogo, terutama seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan Kabupaten Ponorogo yang dapat berpotensi untuk menambah beban dan memperparah kerusakan jalan.

Tabel 2. 25 Panjang Jalan berdasarkan Jenis Permukaan

No	Jenis Permukaan	Panjang (km)
1	Aspal	777,66
2	Kerikil	54,70
3	Tanah	11,25
4	Lainnya (Paving, dsb)	72,50
Total		916,11

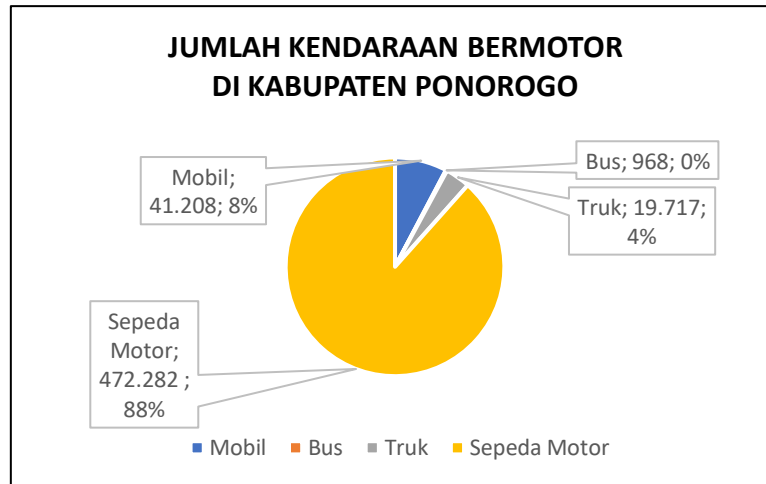
Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Tabel 2. 26 Panjang Jalan berdasarkan Kondisi Jalan

No	Kondisi Jalan	Panjang (km)
1	Baik	531,72
2	Sedang	207,48
3	Rusak	106,86
4	Rusak Berat	70,05
Total		916,11

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Selain prasarana transportasi berupa jalan, terdapat beberapa moda transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat, meliputi mobil, sepeda motor, bus, dan truk. Berikut merupakan persentase jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo berdasarkan jenisnya:



Gambar 2. 16 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sebagian besar jenis kendaraan yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo ialah sepeda motor dengan jumlah kendaraan sebanyak 472.282 unit.

2.5.5 Energi

Energi listrik merupakan kebutuhan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Berdasarkan data survei nasional tahun 2020, seluruh rumah tangga di Kabupaten Ponorogo telah menggunakan listrik. Berikut merupakan data mengenai daya terpasang, jumlah pelanggan, listrik terjual, dan produksi listrik di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 2. 27 Kondisi Penggunaan Listrik di Kabupaten Ponorogo

Bulan	Daya Terpasang (KVa)	Jumlah Pelanggan	Listrik Terjual (KWh)	Produksi Listrik (KWh)
Januari	309.955	292.888	35.495.160	35.495.160
Februari	311.895	293.319	27.972.130	27.972.130
Maret	314.815	294.477	31.699.424	31.699.424
April	318.823	296.526	30.757.204	30.757.204
Mei	320.746	297.048	33.797.833	33.797.833
Juni	323.643	298.273	31.842.436	31.842.436
Juli	325.930	299.491	32.187.616	32.187.616
Agustus	328.163	300.532	33.895.755	33.895.755
September	330.266	301.427	34.385.976	34.385.976
Oktober	333.162	302.440	36.317.134	36.317.134
November	336.387	303.693	32.278.416	32.278.416
Desember	337.591	304.699	33.260.462	33.260.462

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

2.5.6 Informasi

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, terjadi peningkatan kebutuhan untuk berkomunikasi dan mengakses berbagai informasi. Berdasarkan dokumen Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021, pada tahun 2020 tercatat bahwa rumah tangga dengan anggota keluarga yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir mencapai 79,33% dari total rumah tangga



di Kabupaten Ponorogo. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan sebesar 6,59% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 28 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir

No	Kegiatan	Jumlah (%)
1	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	81.66
2	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dsb)	63.09

Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ponorogo, 2021



BAB III

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

3.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kependudukan Nasional Dan Daerah

3.1.1 Kebijakan Pembangunan Kependudukan Nasional dan Daerah

Kebijakan mengenai pembangunan kependudukan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah baik itu dalam skala nasional, provinsi, maupun kabupaten. Penjabaran visi dan misi pembangunan di Kabupaten Ponorogo untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2021-2026 memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global, nasional, regional, dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Visi RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)” ini selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”. Keselarasan antara RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Ponorogo karena mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur “sebagai masyarakat sejahtera” sebagaimana diamanatkan dalam Undang– Undang Dasar 1945. Visi RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 juga selaras dengan visi RPJM Nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

3.1.2 Sasaran Kebijakan Pembangunan Kependudukan Nasional dan Daerah

A. RPJMN 2020-2024

Misi 3: Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.



Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Berikut merupakan sasaran, arah kebijakan, dan strategi untuk target 2024.

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, melalui:
 - a. Percepatan cakupan administrasi kependudukan
 - b. Integrasi sistem administrasi kependudukan
 - c. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, melalui:
 - a. Penguatan pelaksanaan jaminan social
 - b. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran
 - c. Perlindungan sosial adaptif
 - d. Peningkatan kesejahteraan social
 - e. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui:
 - a. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
 - b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
 - c. Peningkatan pengendalian penyakit
 - d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - e. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - b. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
 - c. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
 - d. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah
 - e. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui:



- a. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya
 - b. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 - c. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO
 - d. Peningkatan kualitas pemuda
6. Mengentaskan kemiskinan, melalui:
1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga
 2. Keperantaraan usaha dan dampak social
 3. Reforma agrarian
 4. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan social
7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui:
- a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industry
 - b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas
 - c. Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi
 - d. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
 - e. Penguatan pendamping pembangunan
 - f. Pengelolaan manajemen talenta nasional

B. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Misi 2: Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses pembangunan yang dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi, dimana hasil-hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalaam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan meninggalkan dan melibatkan seluruh kalangan yang rentan dimasyarakat. Oleh karena itu misi utama dari



pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktik pembangunan yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur.

Pembangunan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya manusia. Sesuai dengan pembangunan yang berpusat pada aktualisasi dan apresiasi secara optimal terhadap kapasitas-kapasitas kemanusiaan dari seluruh warga Jawa Timur, maka perlindungan dan jaminan atas kesehatan, pendidikan maupun kedaulatan pangan menjadi prinsip dasar pembangunan. Pemenuhan atas kebutuhan dasar diatas merupakan standar minimal dari pemenuhan atas hak ekonomi maupun sosial dari seluruh warga agar mereka bisa berpartisipasi dalam tatanan ekonomi yang terbuka (inclusive economic order). Sehingga dengan bekal warga Jawa Timur yang sehat, terdidik dan terpenuhi hajat hidupnya, mereka dapat hidup sebagai warga yang terhormat, mulia dan merdeka. Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Jawa Timur.

Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pada Misi 2 :

1. Menurunnya Angka Kemiskinan yang memiliki sasaran sebagai berikut :
 - a. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan
 - b. Meningkatnya Kemandirian PMKS.
2. Meningkatnya Kesetaraan Gender yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas Pendidikan; dan
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
4. Menurunnya Pengangguran, yang memiliki sasaran :
 - a. Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat.

Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan antikorupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur. Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) untuk meningkatkan



masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing PD tidak hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain. Dalam hubungan antar negara-masyarakat sipil dan dunia usaha, birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi berbasis complaint handling system secara terintegrasi. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pada Misi 3 :

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, yang memiliki sasaran sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
 - b. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;
 - c. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan
 - d. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.
 - a. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - b. Meningkatnya Kepedulian Sosial; dan
 - c. Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.

C. RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026

Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya

Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya; dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Angka kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Sasaran :

1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata dengan indikator sasaran: rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran: Angka Harapan Hidup
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran: IPG, IDG.

Misi ini memberikan arah pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Ponorogo yang sejahtera yang ditopang oleh pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Ketiga bidang ini merupakan fokus dari Nawa Darma Nyata kedua (pendidikan), ketiga (kesehatan), keempat (pemberdayaan perempuan) dan keenam (pemberdayaan pemuda).



Pembangunan pendidikan untuk memenuhi hak dasar pendidikan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, kritis, mandiri, berkepribadian, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Langkah yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai mana tertuang dalam Nawa Darma Nyata kedua sebagai berikut:

1. Memenuhi hak dasar pendidikan masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkompoten kreatif, kritis, mandiri, berkepribadian, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui:
 - a. Pengalokasian anggaran BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)
 - b. Pengalokasian anggaran khusus untuk peningkatan prestasi pelajar dalam berbagai ajang kompetisi
 - c. Peningkatan kesejahteraan GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap)
 - d. Fasilitasi dan memperbaiki infrastruktur dan teknologi pendidikan mulai dari usia dini, taman kanak-kanak, dasar, menengah pertama, dan pondok pesantren
3. Mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan (strategi)
4. Memfasilitasi pengembangan sekolah-sekolah kejuruan, khususnya yang berbasis agribisnis sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat/daerah

Pengembangan sektor Kesehatan yang merupakan Nawa Darma Nyata Ketiga untuk mewujudkan hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang adil dan profesional ditempuh melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Menangani dan mencegah meluasnya pandemi COVID-19 di Kabupaten Ponorogo secara cepat, tepat dan transparan
2. Memberikan jaminan kesehatan langsung, terutama bagi warga miskin yang belum tercover oleh layanan BPJS
3. Memberikan fasilitas pengobatan bagi keluarga yang mengidap kelainan jiwa, dengan membangun pusat rehabilitasi dan reaktivitas pasien-pasien penyandang kelainan jiwa
4. Fasilitasi peningkatan kompetensi dokter dan tenaga paramedis untuk memperoleh sertifikat spesialis, sharing dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
5. Menambah tenaga paramedis yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat
6. Menambah fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik desa)
7. Memperbaiki administrasi dan manajemen layanan kesehatan masyarakat miskin yang lebih optimal dengan jaminan tidak ada rumah sakit milik pemerintah yang menolak pasien miskin
8. Menggiatkan program tanaman jamu dan bahan obat-obatan herbal untuk upaya kesehatan bersifat preventif dan promotif, dengan memanfaatkan pekarangan rumah penduduk



Pembangunan manusia yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat berfokus pada perempuan dan pemuda. Pembangunan perempuan merupakan Nawa Darma Nyata Ke Empat bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen usaha mandiri (usaha rumahan)
2. Membantu aspek permodalan usaha, baik untuk usaha baru maupun usaha yang sudah berjalan
3. Membantu aspek pemasaran melalui hubungan sinergis dengan BUMDES setempat yang diarahkan untuk saluran distribusi dan pemasaran
4. Melakukan pembinaan terhadap organisasi perempuan agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan anggotanya

Pembangunan pemuda yang merupakan Nawa Darma Nyata Ke Enam bertujuan untuk meningkatkan pembinaan sektor Kepemudaan dan Olahraga melalui langkah-langkah berikut:

1. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan pemuda melalui program Smart Desa: Satu Dusun Satu Usaha Pemuda
2. Menggalakkan kegiatan kepemudaan yang positif dan produktif melalui revitalisasi dan reorientasi organisasi kepemudaan (karang taruna)
3. Memfasilitasi penggalan potensi seni, budaya dan olahraga di kalangan pemuda melalui berbagai ajang kompetisi tingkat kabupaten secara periodik dan berkesinambungan
4. Memfasilitasi penataan organisasi PSSI dan mengangkat prestasi PERSEPON sebagai tim sepakbola kebanggaan masyarakat Kabupaten Ponorogo
5. Membangun sarana dan prasarana olahraga secara bertahap dan berkelanjutan
6. Memberikan apresiasi yang layak kepada pemuda-pemudi yang berprestasi dalam bidang seni, budaya dan olahraga secara adil dan profesional

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel, dengan Indikator sasaran Maturitas SPIP, nilai SAKIP, Persentase IKM PD yang mendapatkan nilai baik, Indeks Kualitas Perencanaan, Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Opini BPK, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Desa Membangun, Persentase Penegakan PERDA, Indeks Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Persentase PD yang Mengelola Arsip secara baku dan Persentase PERDA yang ditetapkan tepat waktu.



2. Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif, dengan indikator: Angka Kejahatan

Misi ini mewujudkan pemerintahan yang responsif dan tangkas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat melalui penataan kembali manajemen kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kepegawaian. Penataan manajemen kepegawaian akan mewujudkan ASN yang handal, profesional, bermoral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Salah satu kunci keberhasilan kinerja ASN dalam mencapai tujuan adalah melalui kedisiplinan. ASN merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Misi ini merupakan perwujudan pelaksanaan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada masyarakat melalui Nawa Darma Nyata ke Sembilan yaitu:

1. Memberdayakan dan menguatkan lembaga Rukun Tetangga dengan mengalokasikan anggaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap RT per tahun.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih, efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan dan berkelanjutan melalui strategi :
 - a. Mewujudkan APBD untuk kesejahteraan rakyat.
 - b. Meningkatkan alokasi anggaran percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui sistem swakelola desa.
 - c. Membentuk birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - d. Membentuk pemerintahan yang melindungi warga secara adil.
 - e. Memberikan pelayanan umum yang ramah, cepat, mudah dan transparan.
 - f. Memudahkan segala bentuk investasi (penanaman modal) melalui proses perijinan yang cepat, sederhana, transparan, dan adil.
 - g. Mengutamakan pengisian jabatan pemerintahan pada warga Ponorogo.
 - h. Mendorong kebijakan terciptanya lapangan pekerjaan.
 - i. Mendorong kebijakan pengadaan barang dan jasa diutamakan dari masyarakat dan rekanan Ponorogo.
 - j. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan optimalisasi potensi sumber daya Kabupaten Ponorogo.
 - k. Mendorong kemandirian desa dengan Alokasi Dana Desa sebesar 27%.

3.2 Tinjauan Pencapaian Program Pembangunan Daerah

3.2.1 Program Pembangunan Kependudukan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, menyebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK umumnya dilakukan



melalui lima pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Peraturan tersebut secara jelas menggambarkan mengenai cakupan perencanaan dan peran kebijakan perkembangan kependudukan terhadap sebuah wilayah. Pada kondisi eksisting, Kabupaten Ponorogo telah memiliki beberapa kebijakan strategis mengenai pembangunan kependudukan daerah yang termuat dalam rencana pembangunan Kabupaten Ponorogo. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori program sesuai dengan lima pilar pembangunan untuk melihat sejauh mana ketercapaian program pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo. Program-program pembangunan kependudukan daerah di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 3.1 menjelaskan mengenai kesesuaian antara program-program pada dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo secara umum telah selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, serta telah berusaha menyediakan layanan dasar, baik pendidikan dan kesehatan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun di sisi lain, strategi dan program tersebut belum sepenuhnya mengakomodir beberapa strategi dan program pembangunan kependudukan pada tingkat nasional dan provinsi, terutama pada pilar data dan administrasi kependudukan. Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020 – 2024, terdapat beberapa strategi dan program yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan data kependudukan yang valid, meningkatkan integrasi data antar OPD/Instansi, serta meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya, pada Tabel 3.2 dijabarkan beberapa program Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saat ini telah berjalan dan akan dilakukan berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Ponorogo masih memerlukan adanya beberapa program tambahan guna mendukung pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo, terutama pada pilar kuantitas penduduk, kualitas penduduk, serta data dan administrasi penduduk.



Tabel 3. 1 Strategi dan Program Pembangunan Kependudukan Pada Dokumen-Dokumen Perencanaan

No	Strategi dan Program Per Pilar Kependudukan	RPJMN Tahun 2020 - 2024	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024	RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2025	RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021 - 2026	RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2031
A	Kuantitas Penduduk					
	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting					
	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan					
	Terpenuhinya Layanan Dasar Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar)					
	Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Dan Layanan Terpadu					
	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat					
	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) Dan Kesehatan Reproduksi					
	Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak, serta Pengaturan Kelahiran					
B	Kualitas Penduduk					
	Peningkatan Pengendalian Penyakit					
	Terpenuhinya Layanan Dasar Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar)					
	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat					
	Pemenuhan Dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan					
	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman					
	Akses Air Minum Perpipa					
	Terpenuhinya Layanan Dasar Pendidikan (Fasilitas Pendidikan Sesuai Standar)					
	Peningkatan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Di Semua Jenjang Dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun					



No	Strategi dan Program Per Pilar Kependudukan	RPJMN Tahun 2020 - 2024	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024	RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2025	RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021 - 2026	RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2031
	Peningkatan Profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan, Dan Penempatan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Merata					
	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah					
	Pengentasan Kemiskinan					
	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga					
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing SDM					
C	Pembangunan Keluarga					
	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh					
	Peningkatan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk					
	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda					
	Penguatan Pelaksanaan Jaminan Sosial					
	Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Dan Layanan Terpadu					
	Peningkatan Perlindungan Perempuan, Termasuk Pekerja Migran Dari Kekerasan Dan TPPO					
	Pemberdayaan Masyarakat					
	Perencanaan Keluarga Sejahtera					
D	Persebaran dan Mobilitas Penduduk					
	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Untuk Industri 4.0					
	Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi					
	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Ritel, dan Industrialisasi					
	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Dan Pengoptimalan Potensi Unggulan Daerah					



No	Strategi dan Program Per Pilar Kependudukan	RPJMN Tahun 2020 - 2024	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024	RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2025	RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021 - 2026	RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2031
	Peningkatan Ketrampilan Kerja Yang Memiliki Daya Saing Tinggi					
	Adanya Peraturan Daerah (Perda) Yang Mengatur Lembaga Penyaluran Tenaga Kerja Dan Calon Tenaga Kerja					
E	Data dan Administrasi Kependudukan					
	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan dan Perluasan Jangkauan Layanan					
	Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Masyarakat dalam Melakukan Pencatatan Data Kependudukan (Kelahiran, Kematian, Migrasi, Menikah, dsb)					
	Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Bagi Kelompok Khusus					
	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan					
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan					
	Membangun Jaringan dan Program Aplikasi Kependudukan Yang Tersambung di Setiap Kecamatan					
	Mengupayakan Penyediaan Data Kependudukan Yang Valid					

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Tabel 3. 2 Program Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo

No	Program	Indikator	OPD yang Bertanggung Jawab
A	Pengendalian Kuantitas Penduduk		
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kampung KB Aktif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru	
B	Peningkatan Kualitas Penduduk		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK, APM, dan APS	Dinas Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Telah Melakukan Sertifikasi	
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah yang Memiliki Izin	
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase RS Pemerintah Terakreditasi Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B 	Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase cakupan SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sarana dan Prasarana Air Minum yang Dibangun	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang Dibangun	
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi yang Dibangun	
9	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditangani	
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	
11	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang Dibangun Sesuai RK Dan Usulan	
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persentase Bangunan PSU dalam Kondisi Baik	Dinas Lingkungan Hidup
13	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang tertangani	
14	Program Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	Nilai Aktual PTKK	Dinas Tenaga Kerja
15	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
C	Pembangunan Keluarga		
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Menuju Kabupaten Layak Anak	



No	Program	Indikator	OPD yang Bertanggung Jawab
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Disabilitas, Permasalahan Anak, Tuna Sosial, dan Lansia	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Memiliki Kemandirian Ekonomi	
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan	
D	Penataan Persebaran Dan Pengarahan Mobilitas Penduduk		
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Perjanjian Kerja Bersama	
E	Penataan Administrasi Kependudukan		
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Valid	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	
5	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
6	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik yang Terintegrasi	

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026



3.2.2 Ketercapaian Program Kependudukan

Selanjutnya, ketercapaian program-program pembangunan kependudukan pada sub bab sebelumnya dapat dilihat melalui identifikasi kesesuaian antara realisasi dan target capaian pada masing-masing indikator kerja program. Hasil dari identifikasi capaian program dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi dan program kependudukan di masa mendatang. Berikut merupakan ketercapaian program pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo:



Tabel 3. 3 Ketercapaian Program Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Ponorogo

No	Program	Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja					OPD yang Bertanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A Pengendalian Kuantitas Penduduk														
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kampung KB Aktif	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru	66,45	66,55	67,03	67,04	67,54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
B Peningkatan Kualitas Penduduk														
1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI	104,99	105,2	93,81	95,96	96,66	97,36	98,06	98,76	99,46	100	Dinas Pendidikan	
		APK SMP/MTs	102,98	103,19	89,48	100,66	100,57	100,48	100,39	100,3	100,21	100		
		APM SD/MI	94,36	95	87,99	87,99	89,99	91,99	93,99	95,99	97,99	100		
		APM SMP/MTs	75,65	75,70	69,62	75,4	79,9	84,4	88,9	93,4	97,9	100		
		APS SD/MI	102,98	103,19	89,48	89,36	91,26	93,16	95,06	96,96	98,86	100		
		APS SMP/MTs	94,36	95	87,99	100,66	90,52	92,42	94,32	96,22	98,12	100		
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Telah Melakukan Sertifikasi	65,95	67,27	63,9	64,8	n/a	61,5	62	62,5	63	63,5	Dinas Pendidikan	
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah yang Memiliki Izin	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase RS Pemerintah Terakreditasi	n/a	n/a	n/a	90%	90%	91%	92%	93%	94%	94%		Dinas Kesehatan
		Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B	n/a	n/a	n/a	79,42%	79,45%	80%	80%	81%	81%	81%		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase cakupan SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	n/a	n/a	n/a	90%	90%	90%	95%	95%	95%	95%		



No	Program	Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja					OPD yang Bertanggung Jawab	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Manusia Kesehatan													
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sarana dan Prasarana Air Minum yang Dibangun	n/a	n/a	n/a	83,13%	93%	95,03%	96,25%	97,49 %	98,73 %	99,12 %	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang Dibangun	n/a	n/a	n/a	n/a	9,5%	23,8%	33,3%	42,85 %	52,38 %	57,14 %		
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi yang Dibangun	n/a	n/a	n/a	90,80%	91%	92%	94%	96%	98%	100%		
9	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditangani	n/a	n/a	n/a	9,20%	9,40%	9,50%	8,60%	9,70%	9,80%	9,90%		
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	n/a	n/a	n/a	29,75%	28,81%	28,81%	28,81%	28,81 %	28,81 %	28,81 %		
11	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang Dibangun Sesuai RK Dan Usulan	n/a	93%	93,55%	94,17%	95,15%	95,54%	96,13%	96,60 %	97,12 %	97,12 %		
12	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani	n/a	n/a	n/a	2,99%	1,99%	0,96%	0,95%	0,97%	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup	
13	Program Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	Nilai Aktual PTKK	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja	



No	Program	Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja					OPD yang Bertanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
C Pembangunan Keluarga													
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Sejahtera	n/a	n/a	n/a	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Menuju Kabupaten Layak Anak	n/a	n/a	n/a	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Disabilitas, Permasalahan Anak, Tuna Sosial, dan Lansia	1,60%	1,65%	2,69%	1,22%	1,22%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,44%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Memiliki Kemandirian Ekonomi	n/a	n/a	n/a	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
D Penataan Persebaran Dan Pengarahan Mobilitas Penduduk													
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Perjanjian Kerja Bersama	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E Penataan Administrasi Kependudukan													



No	Program	Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja					OPD yang Bertanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92,63%	100%	98,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	89,83%	90%	93,58%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Valid	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	n/a	n/a	n/a	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
6	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik yang Terintegrasi	n/a	n/a	n/a	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026



3.3 Analisis Kesenjangan Kebijakan Dan Pencapaian Program Pembangunan Kependudukan

Analisis *gap* atau yang dikenal dengan analisis kesenjangan merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan antara kondisi eksisting dengan target kinerja program pembangunan kependudukan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan program pembangunan kependudukan di masa mendatang. Analisis ini dilakukan berdasarkan kategori program yang mengacu kepada lima pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan (database penduduk).

3.3.1 Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan program pembangunan kependudukan. Pengelolaan kuantitas penduduk dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berkualitas (KB). Kebijakan penurunan mortalitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penurunan kematian ibu dan anak. Kabupaten Ponorogo telah memiliki beberapa program kependudukan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan kuantitas penduduk. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing program.

A. Program Pengendalian Penduduk

Peningkatan kuantitas penduduk yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada beberapa aspek kehidupan seperti lingkungan, ekonomi, keamanan, dll. Maka perlu sebuah program pengendalian penduduk yang sesuai pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dengan indikator program yaitu Persentase Kampung KB Aktif. Program Keluarga Berkualitas (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan kuantitas penduduk. Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berencana meliputi:

1. Pendewasaan usia perkawinan;
2. Pengaturan kehamilan yang diinginkan
3. Pembinaan kesertaan keluarga berencana
4. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan
5. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana

Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa Kampung KB Aktif telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh kampung di Kabupaten



Ponorogo telah aktif mengikuti program KB. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya pemerintah untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program KB mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Ponorogo. Target kinerja dari program ini di tahun 2021-2026 juga 100% sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh dan dapat dipertahankan di seluruh kampung Kabupaten Ponorogo.

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,164	0,124	0,093	0,076	1,01
Total Fertility Rate (TFR)	2,25	2,08	2,09	2,05	2,17
Presentase Akseptor KB	76,61%	66,71%	66,62%	67,03%	66,75%
Unmeet Need	7,66	13,89	13,74	13,42	13,15
Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	53,01	51,68	51,95	50,68	50,68

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Salah satu arah kebijakan dari program Keluarga Berkualitas (KB) yaitu Pembinaan Keluarga Berencana. Pada awal pengenalan program pada masyarakat perlu dilakukannya pembinaan supaya dalam prosesnya sesuai dengan yang diharapkan dan program KB berhasil. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026, indikator program ini yaitu Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru. Berikut merupakan capaian kinerja program pembinaan keluarga berencana.

Tabel 3. 5 Presentase Cakupan Pelayanan KB Baru

Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	66,45	66,55	67,03	67,04	67,54

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan presentase cakupan pelayanan KB baru di Kabupaten Ponorogo, namun pada tahun 2019-2020 terjadi kemunduran dalam peningkatan presentasinya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya pada tahun tersebut Indonesia sedang mengalami beberapa masalah karena hadirnya pandemic COVID-19. Namun pemerintah dan stakeholder terkait cepat menyesuaikan keadaan sehingga pada tahun 2021 angka peningkatan sudah kembali seperti sedia kala. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan target capaian indikator Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru pada tahun 2022 sebesar 100%, maka dapat dilihat bahwa terdapat *gap* yang cukup tinggi antara capaian kinerja dengan target kinerja, sehingga perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB baru di Kabupaten Ponorogo, seperti meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana, mengadakan kegiatan pembinaan untuk keluarga berencana, pemerataan pelayanan pembinaan keluarga berencana, dan sebagainya.



3.3.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan program pembangunan kependudukan. Berdasarkan dokumen Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, disebutkan bahwa peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting yang dibentuk oleh tiga dimensi (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) dan berfungsi untuk mengukut keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Ponorogo telah memiliki beberapa program kependudukan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas penduduk. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing program kependudukan di Kabupaten Ponorogo yang termasuk ke dalam kategori variabel IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingginya kebutuhan dan permintaan jasa pendidikan menuntut adanya penyediaan fasilitas sekaligus penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Pada dokumen kebijakan rencana pembangunan Kabupaten Ponorogo, baik pada jangka panjang, menengah, dan pendek, terdapat beberapa program mengenai peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo, meliputi:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Masing-masing program tersebut memiliki indikator yang digunakan sebagai acuan keberhasilan kinerja pelaksanaan program. Secara umum, indikator-indikator tersebut terdiri dari:

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS maka semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Berikut merupakan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 3. 6 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ponorogo



Angka Partisipasi Sekolah	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
SD/MI	103,3	102,98	103,19	89,48
SMP/MTs	103,12	103,26	103,47	88,62

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan angka partisipasi sekolah yang cukup signifikan di Kabupaten Ponorogo, terutama pada tingkat pendidikan SMP/MTs dari 103,47 pada tahun 2018 menjadi 88,62 pada tahun 2019. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, tenaga kependidikan, dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan target capaian indikator angka partisipasi sekolah pada tahun 2022 sebesar 93,16 untuk SD/MI dan 92,42 untuk SMP/MTs, maka dapat dilihat bahwa terdapat *gap* yang cukup tinggi antara capaian kinerja dengan target kinerja, sehingga perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Ponorogo, seperti meningkatkan akses pada fasilitas pendidikan, menyediakan prasarana/ruang pendukung pelayanan pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga kependidikan, dan sebagainya.

2. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Sementara, Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APM pada umumnya selalu lebih rendah dibanding dengan APK karena pembilangnya yang lebih kecil sementara penyebutnya sama. Semakin tinggi nilai APK dan APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Berikut merupakan nilai APM dan APK di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 3. 7 APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
SD/MI	94,28	87,99	89,99	102,61	95,96	96,66
SMP/MTs	80,71	75,4	79,9	100,54	100,66	100,57

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 terdapat peningkatan nilai APM dan APK pada seluruh jenjang pendidikan, baik pada SD/MI ataupun SMP/MTs. Selanjutnya apabila ditinjau dari target kinerja APM dan APK pada tahun 2022, diketahui bahwa capaian kinerja telah melebihi target kinerja yang ada, sehingga yang perlu



dilakukan ialah upaya pengelolaan untuk mempertahankan kondisi tersebut sekaligus mengoptimalkan APM dan APK.

3. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf. Berikut merupakan angka melek huruf di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun:

Tabel 3. 8 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf

Kelompok Umur	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
15-19	100%	100%	100%	100%
20-29	99,51%	99,79%	100%	99,63%
30-39	99,47%	98,69%	99,83%	97,89%
40-49	98,46%	98,57 %	97,49%	98,03%
50-59	90,78%	91,92%	87,79%	85,91%
60-69	74,95%	80,06%	69,99%	71,26%
70+	48,61%	48,45%	46,19%	56,90%

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2022

Upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan angka melek huruf cukup berhasil. Hal tersebut dapat dilihat melalui peningkatan yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2020. Hampir seluruh kelompok umur mengalami peningkatan, kecuali kelompok umur 70 ke atas. Sementara itu, pada tahun 2021, kelompok umur 15 hingga 59 tahun mengalami penurunan. Di sisi lain terdapat peningkatan pada kelompok umur 60 tahun hingga 70 tahun ke atas. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya beberapa upaya untuk meningkatkan angka melek huruf, seperti peningkatan inovasi pendidikan untuk buta aksara, peningkatan dukungan pemerintah terhadap penyediaan sarana pendukung berupa fasilitas ruang baca yang dapat diakses oleh masyarakat, meningkatkan gerakan literasi masyarakat, dan sebagainya.

4. Sarana Pendidikan

Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan ialah dengan penyediaan sarana fisik pendidikan yang memadai. Secara umum, fasilitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo telah tersebar di seluruh kecamatan. Berikut merupakan jumlah dan persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 3. 9 Jumlah dan Persebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Ponorogo

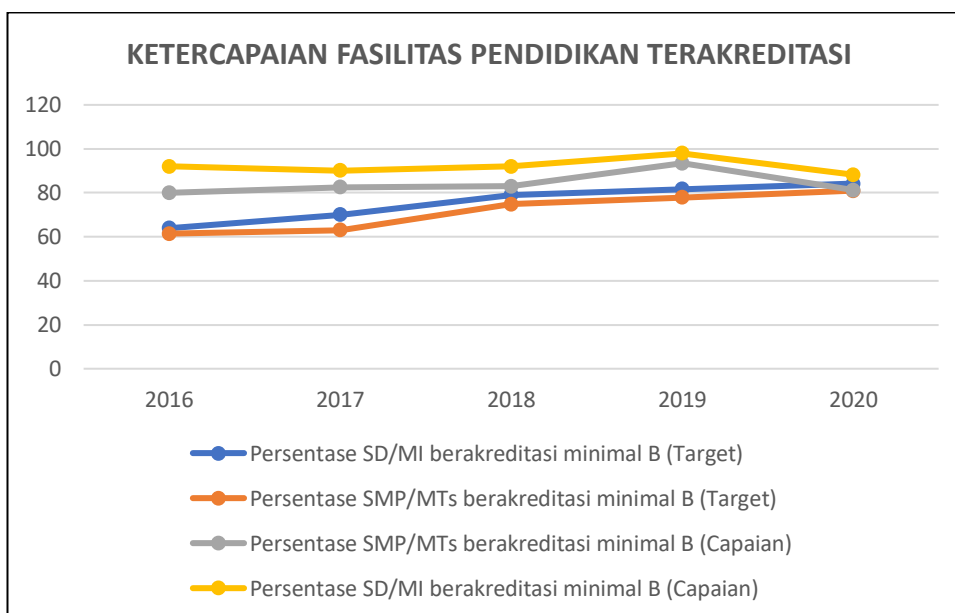
No	Kecamatan	Jumlah Per Tingkat Pendidikan (Unit)								
		1		2		3		4		
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
1	Ngrayun	40	6	49	1	9	7	2	3	1
2	Slahung	37	10	37	6	5	7	1	7	2
3	Bungkal	23	6	29	3	3	5	1	3	1
4	Sambit	26	6	23	8	4	2	1	2	1
5	Sawoo	23	9	39	4	6	7	-	3	1



No	Kecamatan	Jumlah Per Tingkat Pendidikan (Unit)								
		1		2		3		4		
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
6	Sooko	16	5	21	2	2	1	1	-	-
7	Pudak	8	-	8	0	1	-	-	1	-
8	Pulung	25	10	39	6	5	2	1	1	1
9	Mlarak	13	22	26	4	5	3	1	3	2
10	Siman	17	18	20	10	2	3	1	4	-
11	Jetis	7	23	20	6	4	6	2	5	2
12	Balong	23	9	27	6	4	4	2	4	2
13	Kauman	20	10	23	6	4	3	1	3	3
14	Jambon	15	16	22	8	3	4	1	3	1
15	Badegan	18	8	20	4	2	3	-	1	1
16	Sampung	23	7	31	4	4	3	1	2	1
17	Sukorejo	30	13	34	8	2	5	-	3	1
18	Ponorogo	38	21	32	8	13	9	6	11	13
19	Babadan	19	30	29	13	5	7	2	5	6
20	Jenangan	19	37	33	11	5	8	2	5	3
21	Ngebel	12	4	17	0	3	1	-	1	-
Kab. Ponorogo		452	270	579	118	91	90	26	70	42

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Ponorogo sebagai pusat aktivitas atau ibukota Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah sarana pendidikan paling banyak, yaitu 151 unit dengan jenis sarana pendidikan terbanyak ialah TK (38 unit). Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah sarana pendidikan paling sedikit adalah Kecamatan Pudak, yaitu 18 unit. Sementara itu, apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, dari tabel di atas menunjukkan bahwa SD merupakan jenis sarana pendidikan paling banyak di Kabupaten Ponorogo, yaitu sebanyak 579 unit.



Gambar 3. 1 Ketercapaian Fasilitas Pendidikan Terakreditasi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Ponorogo, 2021



Jumlah fasilitas pendidikan yang terakreditasi merupakan salah satu tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Kualitas fasilitas pendidikan dapat berpengaruh terhadap kualitas murid dan tenaga kependidikan. Pada Gambar 3.1 digambarkan mengenai ketercapaian fasilitas pendidikan terakreditasi di Kabupaten Ponorogo, dapat dilihat bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo cukup berhasil dalam mendorong akreditasi fasilitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut sesuai dengan trend capaian kinerja fasilitas pendidikan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja pada tahun 2016 hingga 2019 berada cukup jauh di atas rata-rata, sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian kinerja. Meskipun begitu, capaian kinerja pada tahun 2020 masih berada di atas target kinerja.

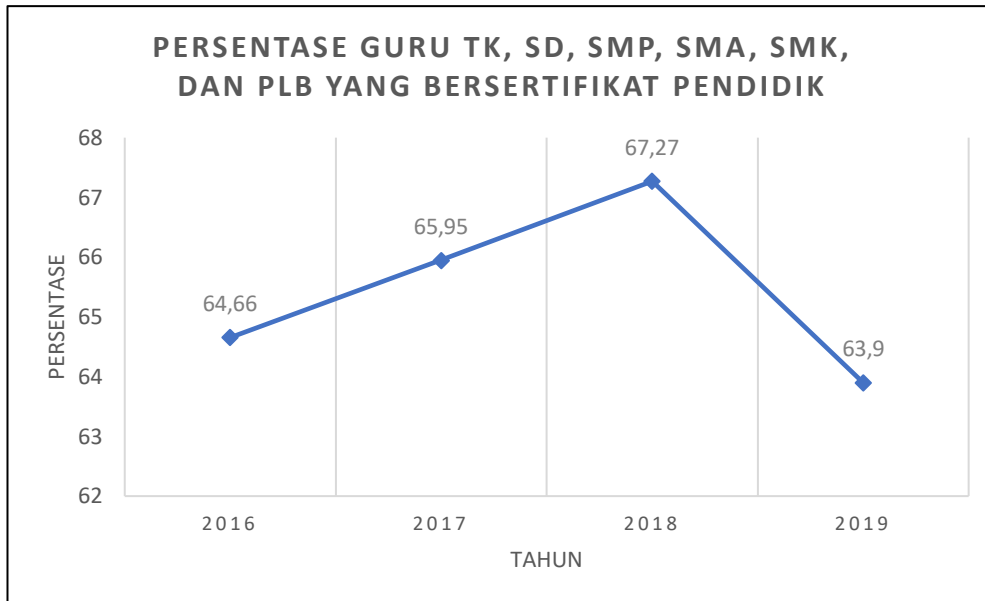
5. Tenaga Kependidikan

Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan ialah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan yang memadai. Berikut merupakan jumlah tenaga kependidikan di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 3. 10 Tenaga Kependidikan di Kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Jumlah Per Tingkat Pendidikan (Orang)								
		1		2		3		4		
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK
1	Ngrayun	120	10	424	8	128	71	32	10	16
2	Slahung	108	35	322	58	69	94	41	90	69
3	Bungkal	84	21	264	33	67	55	17	21	4
4	Sambit	90	18	194	68	68	22	27	18	9
5	Sawoo	80	24	289	37	94	57	-	24	52
6	Sooko	56	14	175	18	33	19	16	-	-
7	Pudak	23	-	71	-	17	-	-	6	-
8	Pulung	85	27	327	50	93	29	40	27	5
9	Mlarak	55	67	231	84	75	105	9	67	48
10	Siman	74	63	195	116	34	62	74	63	-
11	Jetis	31	75	182	76	75	107	30	67	14
12	Balong	66	39	231	84	90	58	38	39	26
13	Kauman	78	31	212	52	92	50	26	29	28
14	Jambon	58	51	198	84	47	89	55	51	4
15	Badegan	46	25	152	31	64	25	-	25	67
16	Sampung	54	28	248	59	59	69	27	28	13
17	Sukorejo	116	42	304	101	52	51	-	29	6
18	Ponorogo	200	109	446	161	379	208	195	189	354
19	Babadan	64	99	256	146	78	182	68	150	159
20	Jenangan	70	93	258	133	101	87	40	93	188
21	Ngebel	26	12	127	-	43	7	-	12	-
Kab. Ponorogo		1.584	883	5.106	1.399	1.758	1.447	735	1.038	1.062

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022



Gambar 3. 2 Persentase Tenaga Kependidikan (Guru) Bersertifikat
Sumber: Bappeda Kabupaten Ponorogo, 2021

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan persentase tenaga kependidikan yang telah memiliki sertifikasi, maka sebanyak 63,9% tenaga kependidikan di Kabupaten Ponorogo telah bersertifikat. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 67,27%. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 hingga 2018 jumlah persentase tenaga kependidikan bersertifikat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,3%.

C. Kesehatan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penduduk ialah melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan disertai dengan tenaga kesehatan yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Upaya tersebut diarahkan agar tempat pelayanan kesehatan mudah dikunjungi dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pada dokumen kebijakan rencana pembangunan Kabupaten Ponorogo, baik pada jangka panjang, menengah, dan pendek, terdapat beberapa program mengenai peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Ponorogo, meliputi:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Masing-masing program tersebut memiliki indikator yang digunakan sebagai acuan keberhasilan kinerja pelaksanaan program. Secara umum, indikator-indikator tersebut terdiri dari:

1. Sarana Kesehatan



Pada tahun 2021, terdapat 188 unit sarana kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Dari beberapa jenis sarana kesehatan, puskesmas pembantu merupakan jenis dengan jumlah sarana terbanyak, yaitu 60 unit.

Tabel 3. 11 Jumlah dan Persebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskemas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Ngrayun	-	2	1	3	1
2	Slahung	-	1	2	3	3
3	Bungkal	-	-	1	3	1
4	Sambit	-	-	2	2	4
5	Sawoo	-	1	2	4	1
6	Sooko	-	-	1	2	1
7	Pudak	-	1	1	2	1
8	Pulung	-	3	2	4	3
9	Mlarak	1	2	1	2	4
10	Siman	-	2	2	3	5
11	Jetis	-	1	1	2	3
12	Balong	-	2	2	4	2
13	Kauman	1	1	2	1	4
14	Jambon	-	1	2	2	1
15	Badegan	-	-	1	3	1
16	Sampung	-	-	2	3	-
17	Sukorejo	-	4	1	5	3
18	Ponorogo	5	5	2	3	10
19	Babadan	-	4	2	3	5
20	Jenangan	-	2	2	3	3
21	Ngebel	-	-	1	3	-
Kab. Ponorogo		7	32	33	60	56

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

2. Tenaga Kesehatan

Sementara itu, untuk jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Ponorogo sebanyak 1.473 orang yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan tenaga dukungan manajemen. Perawat merupakan jenis tenaga kesehatan dengan jumlah paling banyak di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026, sumber daya manusia merupakan salah satu kelemahan dalam sistem penyediaan layanan kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Kurangnya tenaga-tenaga fungsional tertentu, meliputi dokter gigi, laboratorium, asisten apoteker, gizi, dan sebagainya, serta masih perlunya peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga fungsional dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar. Berikut merupakan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 3. 12 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Ponorogo

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah (Orang)
A	Pejabat Struktural	
1	Struktur Eselon II	1
2	Struktur Eselon III	5
3	Struktur Eselon IV	15



B	Pejabat Fungsional	
1	Dokter Umum	59
2	Dokter Gigi	26
3	Perawat	475
4	Bidan	419
5	Kesehatan Masyarakat	36
6	Sanitarian	24
7	Petugas Gizi	26
8	Analisis Laboratorium	27
9	Teknik Biomedik	4
10	Keterampilan Fisik	4
11	Kefarmasian	21
C	Tenaga Dukungan Manajemen	279
Total		1.473

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

3. Masyarakat

Keberhasilan pembangunan kesehatan juga dipengaruhi oleh peran serta atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya kesehatan. Salah satu wadah yang menampung peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan adalah Posyandu Balita, POSBINDU, Posyandu Lansia, UKK, POSKESTREN dan UKBM lainnya. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026, sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo terdapat 1.129 posyandu balita; 268 Posyandu Lansia dan 309 POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu).

D. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak dapat dilihat melalui daya beli masyarakat yang meliputi jumlah tenaga kerja, jumlah pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan sebagainya. Terdapat beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, meliputi:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Masing-masing program tersebut memiliki indikator yang digunakan sebagai acuan keberhasilan kinerja pelaksanaan program. Secara umum, indikator-indikator tersebut terdiri dari:

1. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan telah teratasi. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan mempengaruhi output produksi.



Tabel 3. 13 Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2020

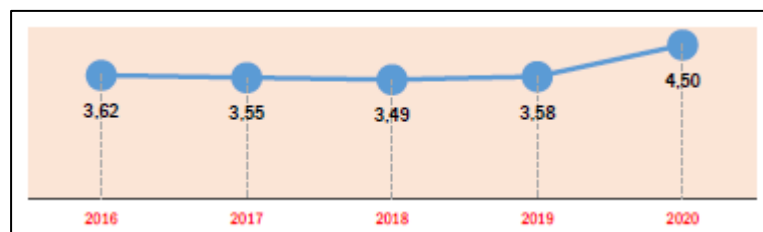
Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja		Pengangguran	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2016	488661	471.947	96,38	17.714	3,62
2017	494111	476.556	96,45	17.555	3,55
2018	498586	481.188	96,51	17.399	3,49
2019	503077	485.830	96,57	17.247	3,43
2020	513781	490.912	95,54	22.869	4,46

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2021

Berdasarkan dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja semakin meningkat setiap tahun. Sedangkan angka pengangguran semakin menurun setiap tahunnya. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat yang disebabkan jumlah penduduk usia produktif meningkat, namun jumlah penduduk bekerja bertambah dan angka pengangguran berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo mampu mengelola ketenagakerjaan dengan baik dengan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dapat menekan angka pengangguran.

2. Jumlah Pengangguran Terbuka

Dalam urusan tenaga kerja, tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selalu menjadi indikator keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, TPT Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh peningkatan angka partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2020 TPT mengalami peningkatan sebesar 0,92 persen, dari tahun 2019 sebesar 3,58 persen menjadi 4,50 persen pada tahun 2020. Adanya peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 menjadi akibat dari dampak penanganan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sehingga aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Hal tersebut menjadi penyebab utama adanya peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.



Gambar 3. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ponorogo

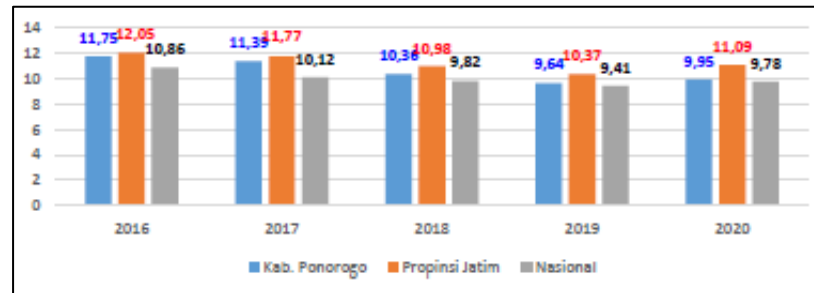
Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026

3. Jumlah Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Kemiskinan terjadi



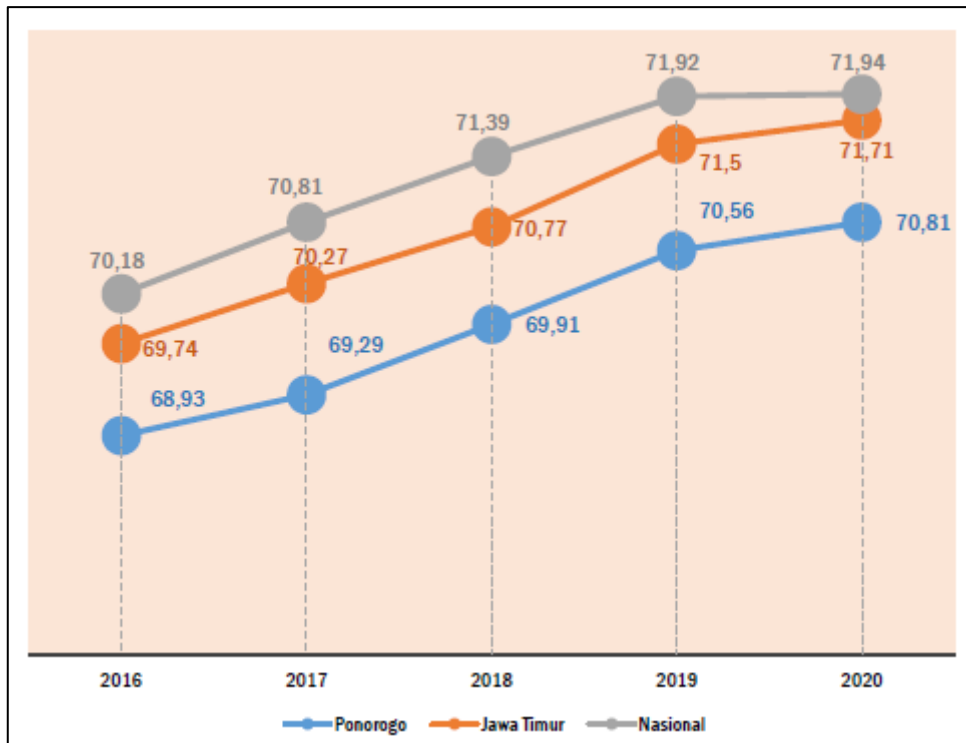
karena rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan dan juga rendahnya pendapatan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo selama lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 karena dampak adanya pandemik Covid-19. Penurunan jumlah penduduk miskin tidak hanya terjadi di Kabupaten Ponorogo tetapi terjadi di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.



Gambar 3. 4 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo
Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

Ketiga aspek yang telah dibahas sebelumnya, meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak merupakan faktor pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan melalui kemampuan daya belinya, kesehatan, pendidikan. Pembangunan manusia dinilai berhasil apabila penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak.

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, IPM Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan, meskipun masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional. Peningkatan nilai IPM menjadi 70,81 pada tahun 2020 menjadikan Kabupaten Ponorogo mengalami perubahan kategori dari kabupaten/kota berkategori IPM sedang menjadi kabupaten/kota berkategori IPM tinggi. Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Ponorogo sebesar 0,57 % selama kurun waktu lima tahun mulai tahun 2016 sampai 2020, yang menunjukkan adanya perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo.



Gambar 3. 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 -2020

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

Meskipun jika dilihat dari data selama lima tahun tren IPM Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 ini masih berada di urutan ke-23 pada tingkat Provinsi Jawa Timur. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM di lakukan terus menerus utamanya pada indeks pendidikan yang masih di bawah rata-rata nasional maupun tingkat Provinsi Jawa Timur melalui kejar paket A, B dan C. Di samping itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat banyak di lakukan dengan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat di berbagai bidang di seluruh wilayah baik di pedesaan maupun di perkotaan. Melalui program Pendidikan hebat, Kesehatan hebat dan UMKM hebat akan dapat meningkatkan IPM Kabupaten Ponorogo di tahun mendatang.

3.3.3 Kondisi Keluarga

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Ponorogo telah memiliki beberapa program kependudukan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan kuantitas penduduk. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing program.

Informasi mengenai struktur perkawinan penduduk pada kurun waktu dan wilayah tertentu bermanfaat bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam upaya

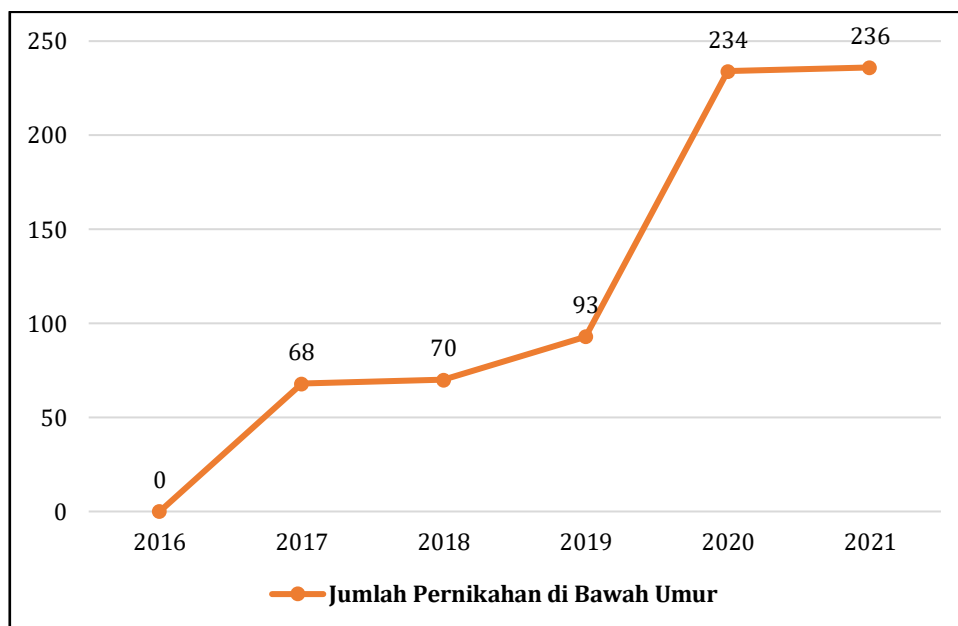


meningkatkan kualitas keluarga. Perkawinan dibawah umur (usia muda) menjadi salah satu permasalahan meskipun angka atau tingkat perkawinan di bawah umur tidak tinggi akan tetapi terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pernikahan di bawah umur mengakibatkan kesiapan dalam menikah masih belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa mengakibatkan kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Sehingga perkawinan di bawah umur akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, hal tersebut dikarenakan ketika memutuskan untuk menikah di usia yang tergolong dibawah umur maka sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan yang terbatas. Berikut merupakan tabel jumlah pernikahan di bawah umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.

Tabel 3. 14 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Tahun	Total
2016	0
2017	68
2018	70
2019	93
2020	234
2021	236

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026



Gambar 3. 6 Grafik Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Berdasarkan gambar diatas diketahui pernikahan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur antara lain karena rendahnya perekonomian di dalam keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan yang rendah, kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, serta faktor budaya atau adat-istiadat (misal: perjodohan yang dilakukan oleh orang tua sejak kecil). Jika ditinjau berdasarkan kondisi kinerja Tahun 2021 sebesar 236 dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun



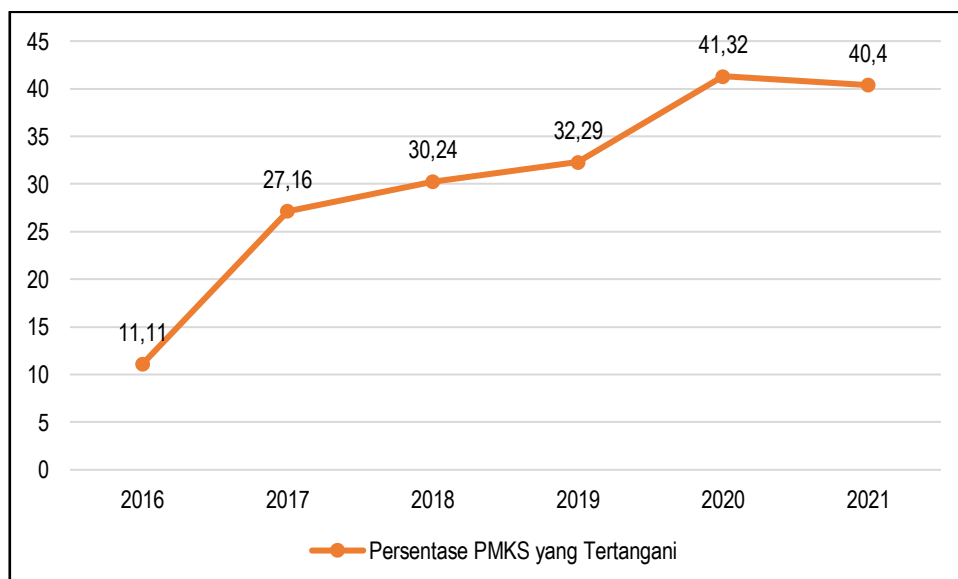
2021 sebesar 200 maka diperlukan beberapa upaya untuk menurunkan jumlah pernikahan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai batasan usia menikah dan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur, sosialisasi kepada masyarakat terkait wajib pendidikan 12 tahun, serta meningkatkan kualitas pendidikan.

Masalah kemiskinan juga berpengaruh terhadap kualitas sebuah keluarga. Kemiskinan ialah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat diakibatkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan memberikan dampak yang sangat kompleks dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Berikut merupakan tabel persentase PPKS yang tertangani di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.

Tabel 3. 15 Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tertangani di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Tahun	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2016	11,11
2017	27,16
2018	30,24
2019	32,29
2020	41,32
2021	40,4

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026





Gambar 3. 7 Persentase PPKS di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Berdasarkan gambar diatas diketahui persentase PPKS yang tertangani di Kabupaten Ponorogo menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, tetapi mengalami penurunan di Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2021 sebesar 34,29% maka penurunan tersebut masih jauh diatas target kinerja atau masih melebihi dari target kinerja pada Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi PPKS salah satunya yaitu kemiskinan. Dalam menangani masalah kesejahteraan sosial maka perlu melakukan usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan, sehingga diperlukan pemahaman mendalam para pendamping sosial tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS khususnya dalam menyelenggarakan pendampingan kepada masyarakat.

3.3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan ketika merumuskan arah dan kebijakan dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah.

A. Persebaran

Persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Berdasarkan data kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Ponorogo dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.461,18 jiwa per km², sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pudak dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 188,61 jiwa per km². Berikut ini merupakan persebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 3. 16 Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Ngrayun	60,20	6,30%	325,82
2.	Slahung	53,72	5,62%	594,68
3.	Bungkal	38,42	4,02%	711,41
4.	Sambit	39,90	4,17%	666,91
5.	Sawoo	61,27	6,41%	491,33
6.	Sooko	24,08	2,52%	435,28
7.	Pudak	9,23	0,97%	188,61
8.	Pulung	51,93	5,43%	407,16
9.	Mlarak	35,29	3,69%	948,52
10.	Siman	48,38	5,06%	1.274,91
11.	Jetis	31,43	3,29%	1.402,50
12.	Balong	47,38	4,96%	831,72



No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
13.	Kauman	46,74	4,89%	1.276,65
14.	Jambon	46,09	4,82%	801,79
15.	Badegan	33,24	3,48%	635,00
16.	Sampung	40,12	4,20%	497,67
17.	Sukorejo	57,98	6,07%	973,18
18.	Ponorogo	77,22	8,08%	3.461,18
19.	Babadan	70,90	7,42%	1.613,84
20.	Jenangan	61,11	6,39%	1.028,01
21.	Ngebel	21,22	2,22%	356,59
Total		955,84	100,00%	696,79

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh faktor demografi berdasarkan kepadatan penduduk. Kesenjangan sosial akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Adapun beberapa dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata diantaranya yaitu:

1. Munculnya masalah sosial seperti permukiman kumuh di daerah yang penduduknya padat
2. Terjadinya kesenjangan dalam hal pembangunan, perekonomian, dan akses pendidikan akibat persebaran yang tidak merata. Sehingga menimbulkan terpusatnya kegiatan ekonomi pada daerah tertentu.
3. Kurangnya tenaga kerja di wilayah penduduk dengan tingkat kepadatan rendah, dan tingginya angka pengangguran di wilayah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam
5. Terjadinya kemacetan di wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi.

Berdasarkan beberapa dampak yang ditimbulkan akibat persebaran penduduk yang tidak merata diatas, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya yaitu:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan di daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.
2. Pengurangan pertumbuhan penduduk dengan memberlakukan program Keluarga Berkualitas (KB).
3. Melakukan program transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang memiliki penduduk padat menuju daerah yang jarang penduduknya.
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur sehingga gap antara daerah dengan padat penduduk dan daerah dengan jarang penduduk semakin kecil.

B. Mobilitas

Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Pergerakan tersebut bersifat sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap. Berdasarkan data jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kecamatan Ponorogo,

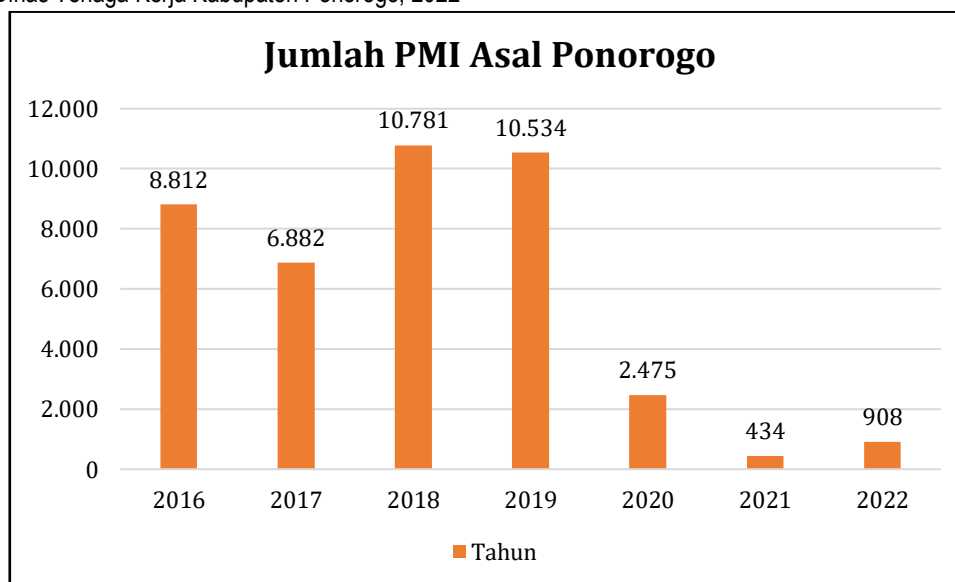


diketahui jumlah PMI meningkat dari Tahun 2016-2018, kemudian menurun dari Tahun 2019-2021. Penurunan jumlah PMI menunjukkan tren penurunan sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Kemudian pada Tahun 2022 jumlah PMI mengalami peningkatan lebih dari 100% yaitu menjadi 908 jiwa. Berikut ini merupakan tabel jumlah PMI Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2022.

Tabel 3. 17 Jumlah PMI Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2022

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2016	2.666	6.146	8.812
2017	1.876	5.006	6.882
2018	3.004	7.777	10.781
2019	2.918	7.616	10.534
2020	759	1.716	2.475
2021	75	359	434
2022	-	-	908
Jumlah	11.298	28.620	40.826

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2022



Gambar 3. 8 Grafik Jumlah PMI Asal Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2022

Berikut merupakan data jumlah PMI asal Kabupaten Ponorogo yang masih berada di luar negeri sampai dengan Juni Tahun 2022.

Tabel 3. 18 Jumlah PMI Asal Kabupaten Ponorogo Yang Masih Berada di Luar Negeri Sampai Dengan Juni 2022

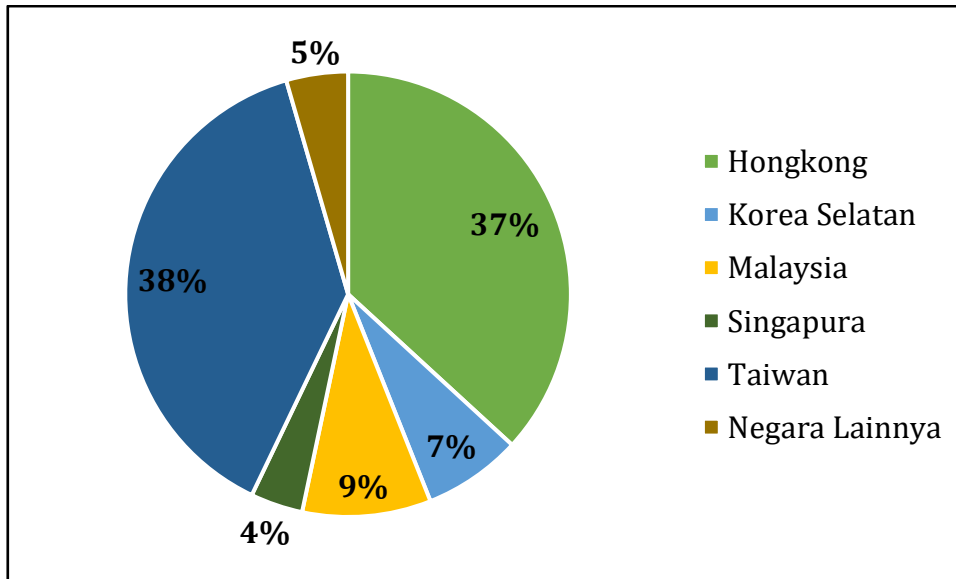
No	Negara	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Afghanistan	2	-	2
2	Afrika Selatan	1	-	1
3	Aljazair	2	-	2
4	Amerika Serikat (US)	30	4	34
5	Australia	1	-	1
6	Bahrain	1	5	6
7	Belanda	1	-	1
8	Brazilia	1	-	1
9	Brunai Darussalam	419	101	520
10	Canada	7	4	11



No	Negara	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
11	Denmark	1	-	1
12	Gabon	7	-	7
13	Hongkong	151	14.429	14.580
14	Inggris	-	2	2
15	Italia	2	1	3
16	Jepang	29	22	51
17	Korea Selatan	2.668	162	2.830
18	Korea Utara	1	-	1
19	Kuwait	4	31	35
20	Lithuania	-	1	1
21	Macao	-	30	30
22	Malagasi	1	-	1
23	Malaysia	3.002	698	3.700
24	Maldivest	-	3	3
25	Malta	1	-	1
26	Mauritius	1	-	1
27	Oman	-	42	42
28	Papua New Guini	5	-	5
29	Polandia	21	1	22
30	Portugal	2	-	2
31	Qatar	12	32	44
32	RRC	4	-	4
33	Saudi Arabia	282	428	710
34	Seychelles	2	1	3
35	Singapura	28	1.477	1.505
36	Solomon Islands	2	1	3
37	Spanyol	2	-	2
38	Syria	-	2	2
39	Turki	1	-	1
40	Taiwan	5.584	9.619	15.203
41	Thailand	-	1	1
42	Timor Leste	1	-	1
43	Trinidad	2	-	2
44	United Emirate Arab (UEA)	13	199	212
45	Uruguay	1	-	1
46	Vietnam	1	-	1
47	Yaman Selatan	-	1	1
Jumlah		11.298	28.620	39.593

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PMI asal Kabupaten Ponorogo didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Hal tersebut mencerminkan telah terjadinya emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan. Saat ini perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga dan mengurus anak akan tetapi juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Faktor yang melatarbelakangi perempuan bekerja ke luar negeri menjadi diantaranya yaitu tingkat pendidikan yang rendah serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat.



Gambar 3. 9 Grafik Negara Tujuan PMI Asal Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan tabel diatas diketahui negara tujuan PMI asal Kabupaten Ponorogo didominasi oleh negara tujuan Taiwan sebesar 38%, Hongkong sebesar 37%, Malaysia sebesar 9%, Korea Selatan sebesar 7%, Singapura 4% dan Negara lainnya sebesar 5%.

Mobilitas penduduk dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik. Salah satu faktor pendorong yaitu daerah asal, dimana daerah asal sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi dorongan dari daerah asal meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar pendorong dalam melakukan mobilitas penduduk untuk bermigrasi meninggalkan tempat tinggal mereka. Pada umumnya mobilitas penduduk dilakukan karena seseorang ingin merubah taraf hidup menjadi lebih baik.

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu faktor pendorong datangnya para imigran untuk melakukan mobilitas penduduk. Volume migrasi dalam salah satu wilayah tertentu berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan dari suatu wilayah tertentu yang merupakan daya tarik bagi penduduk dari berbagai jenis pendidikan.

3. Faktor Transportasi

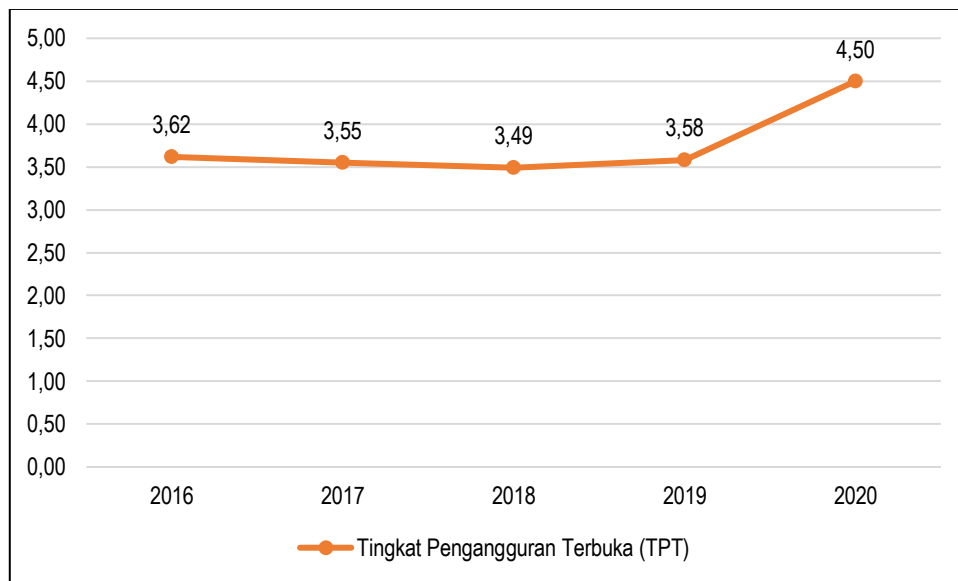
Tersedianya sarana transportasi merupakan salah satu pendorong mobilitas. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya alat transportasi yang lengkap masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses keluar daerah untuk meningkatkan ekonomi disuatu daerah dan mempermudah orang-orang untuk bekerja atau bersekolah. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat desa akan semakin sering untuk melakukan perjalanan ke kota dengan ongkos murah.

Sedangkan faktor penarik mobilitas penduduk diantaranya:



- a. Tersedianya lapangan pekerjaan.
- b. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
- c. Kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan.
- d. Keadaan lingkungan yang menyenangkan.
- e. Kemajuan di tempat tujuan

Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat mobilitas penduduk yaitu dengan pemerataan lapangan pekerjaan diseluruh wilayah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah yang dimiliki.



Gambar 3. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ponorogo
Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026

Terjadinya pengangguran pada umumnya disebabkan karena ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Angka pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Ponorogo menunjukkan kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,5 % atau sebanyak 77.000. Peningkatan tersebut disebabkan akibat dampak pandemik Covid 19. Dampak pengangguran di bidang pembangunan diantaranya yaitu dapat menurunkan pendapatan nasional, pendapatan perkapita masyarakat, sumber utama kemiskinan, hingga pemborosan sumber daya, dan potensi yang ada. Masalah pengangguran sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu wilayah atau negara. Berdasarkan hal tersebut maka masalah pengangguran perlu diatasi kedepannya dikarenakan dapat menyebabkan masalah kemiskinan jangka panjang dan terjadi kesenjangan sosial terhadap pemerataan ekonomi.

3.3.5 Database Penduduk

Pada pilar ke lima yaitu database kependudukan, memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk



memperkuat ketepatan sasaran pembangunan. Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

1. Penataan dan pengelolaan *database* kependudukan
2. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan
3. Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa
4. Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi

Berikut merupakan penjelasan dari tiap program pada pilar ini yang disertai capaian dan target kinerja program. Penjelasan akan dibedakan dalam 2 aspek yaitu yang pertama mengenai administrasi kependudukan dan yang kedua membahas mengenai publikasi informasi kependudukan.

A. Administrasi Kependudukan

Aspek pertama yang akan dijelaskan yaitu administrasi kependudukan. Pada aspek ini akan dibahas mengenai pendataan penduduk. Terdapat 3 program yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Program Pendaftaran Penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah sangat penting dalam perhitungan kebutuhan daerah tersebut seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Maka data jumlah penduduk harus sesuai dengan kenyataannya. Untuk mencapai angka yang riil maka seluruh penduduk yang mendiami suatu daerah perlu melakukan pendaftaran pada instansi setempat. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program pendaftaran penduduk memiliki indikator yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Berikut data capaian program.

Tabel 3. 19 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	92,63%	100%	98,50%	100%	100%

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 mengalami peningkatan angka Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang cukup signifikan di Kabupaten Ponorogo, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Kemudian pada tahun 2020-2021 kembali terjadi peningkatan angka kepemilikan dokumen kependudukan yang dapat disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran kependudukan dan upaya stakeholder terkait untuk mengajak masyarakat melakukan pendaftaran. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan target capaian indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2022 sebesar 100%, maka hal tersebut merupakan hal yang menjadi tanggungjawab seluruh



stakeholder terkait baik itu masyarakat maupun pemerintah untuk dapat mempertahankan angka tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan angka kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Ponorogo, seperti meningkatkan akses pada fasilitas kependudukan baik online ataupun offline, menyediakan prasarana/ruang pendukung pelayanan kependudukan, pemerataan pelayanan di seluruh wilayah terutama desa, dan sebagainya.

2. Program Pencatatan Sipil

Program kedua yaitu Pencatatan Sipil. Catatan sipil yaitu catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Terdapat 5 peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan penggantian nama. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program pencatatan sipil memiliki indikator yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil. Berikut data capaian program.

Tabel 3. 20 Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	89,83%	90%	93,58%	95%	100%

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan angka Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang cukup stabil di Kabupaten Ponorogo. Hal baik tersebut dapat dipengaruhi oleh sudah tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan target capaian indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2022-2026 sebesar 100%, maka hal tersebut merupakan hal yang menjadi tanggungjawab seluruh stakeholder terkait baik itu masyarakat maupun pemerintah untuk dapat mempertahankan angka tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan angka kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Ponorogo, seperti meningkatkan akses pada fasilitas pencatatan sipil baik online ataupun offline, menyediakan prasarana/ruang pendukung pelayanan pencatatan sipil, pemerataan pelayanan di seluruh wilayah terutama desa, dan sebagainya.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya data dan dokumen kependudukan terus meningkat, maka administrasi kependudukan pada suatu daerah dapat mencapai 100%. Selanjutnya instansi terkait perlu melakukan pengelolaan terhadap informasi kependudukan tersebut. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program pengelolaan informasi administrasi kependudukan memiliki indikator yaitu Persentase Data Kependudukan yang Valid. Data capaian



program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa data kependudukan yang valid telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh data kependudukan yang terdaftar di Kabupaten Ponorogo telah valid. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Ponorogo telah menyadari bahwa kebenaran administrasi kependudukan merupakan hal penting. Target kinerja dari program ini di tahun 2022-2026 juga 100% sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh dan dapat dipertahankan di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo.

B. Publikasi Informasi Kependudukan

Data kependudukan yang telah diolah oleh pemerintah akan dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses dan hak untuk mengetahui informasi kependudukan tersebut. Dengan mengikuti perkembangan zaman, maka publikasi informasi kependudukan tidak hanya berupa dokumen hardcopy namun juga melalui online seperti website pemerintah. Pelayanan publik lain yang harus disediakan pemerintah yaitu penyediaan wadah untuk komunikasi dengan masyarakat mengenai informasi kependudukan. Program mengenai publikasi informasi kependudukan terbagi menjadi 3 program yaitu Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Aplikasi Informatika.

1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Data profil kependudukan masyarakat perlu dikelola dengan bijak oleh stakeholder terkait. Maka dari itu perlu program yang mengatur mengenai pengelolaan profil kependudukan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program pengelolaan profil kependudukan memiliki indikator yaitu Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan. Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh data kependudukan di Kabupaten Ponorogo telah dimanfaatkan dengan bijak. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pemanfaatan data kependudukan telah digunakan untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat. Target kinerja dari program ini di tahun 2022-2026 juga 100% sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh dan dapat dipertahankan di Kabupaten Ponorogo.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Berjalannya kinerja instansi pemerintah tidak hanya 1 arah, namun juga 2 arah sehingga masyarakat juga dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah. Program Informasi dan Komunikasi Publik dimaksudkan sebagai wadah untuk masyarakat agar mendapat hak dalam memperoleh informasi kependudukan dan mengkomunikasikan hal yang berkaitan dengan kependudukan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program informasi dan komunikasi publik memiliki indikator yaitu Persentase Keluhan Masyarakat atas Pelayanan Pemda yang Tertangani. Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo



menunjukkan bahwa keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani telah mencapai 98% yang memiliki arti bahwa hampir seluruh keluhan atas pelayanan Pemda di Kabupaten Ponorogo dapat tertangani. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa keluhan masyarakat ditangani dengan baik dan tidak dihiraukan. Target kinerja dari program ini di tahun 2022-2026 yaitu 98%, tidak terjadi kenaikan presentase dapat dipengaruhi oleh pelayanan atas keluhan ini belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh dan dapat ditingkatkan lagi di Kabupaten Ponorogo supaya seluruh keluhan masyarakat dapat tertangani dengan baik.

3. Program Aplikasi Informatika

Publikasi informasi kependudukan selain melalui dokumen juga perlu melalui online. Selain berisi mengenai publikasi informasi, aplikasi online dapat menjadi fasilitas untuk layanan publik lainnya seperti pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini akan mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor instansi terkait. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program aplikasi informatika memiliki indikator yaitu Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik yang Terintegrasi. Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa aplikasi layanan pemerintah dan publik yang terintegrasi telah mencapai 98% yang memiliki arti bahwa hampir seluruh layanan pemerintah dan publik di Kabupaten Ponorogo telah terintegrasi dalam aplikasi. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik melalui aplikasi telah dilakukan secara optimal. Target kinerja dari program ini di tahun 2022-2026 yaitu 98%, tidak terjadi kenaikan presentase dapat dipengaruhi oleh pelayanan publik melalui aplikasi ini belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh untuk seluruh layanan dan dapat ditingkatkan lagi di Kabupaten Ponorogo supaya seluruh kebutuhan dan layanan yang diperlukan masyarakat melalui online dapat terintegrasi.



BAB IV

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN

4.1 Data Dasar Kependudukan Daerah

4.1.1 Data Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Kabupaten Ponorogo memiliki persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki laki sebesar 49,95% dan perempuan 50,05%. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo berada pada kelompok umur 35-39 dengan komposisi penduduk jenis kelamin laki laki sebesar 35.960 jiwa dan perempuan sebesar 36.206 jiwa.

Tabel 4. 1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	29.436	28.267	57.703
5-9	30.082	28.752	58.834
10-14	30.580	28.524	59.104
15-19	31.246	29.222	60.468
20-24	33.041	31.122	64.163
25-29	34.113	31.869	65.982
30-34	35.660	34.875	70.535
35-39	35.960	36.206	72.166
40-44	33.907	34.357	68.264
45-49	34.796	36.062	70.858
50-54	33.316	34.458	67.774
55-59	30.973	31.838	62.811
60-64	27.594	28.657	56.251
65-69	22.707	23.410	46.117
70-74	16.573	17.397	33.970
75+	17.444	23.395	40.839
Kabupaten Ponorogo	477.428	478.395	955.839

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022

4.1.2 Data Kematian Ibu Berdasarkan Kelompok Umur

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, menderita penyakit tertentu dan lain-lain. Pelayanan kesehatan yang semakin baik serta kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu dan anak menjadi faktor pendukung penurunan angka kematian ibu.



Angka Kematian Ibu yang tercatat di Kabupaten Ponorogo pada lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena keterlambatan diagnosa, keterlambatan merujuk, keterlambatan mendapatkan pelayanan yang adekuat serta karena adanya penyakit penyerta yang memperparah kondisi ibu hamil sampai meninggal. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah untuk mengurangi AKI melalui pengembangan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, rumah bersalin, praktik dokter, apotek, laboratorium, perusahaan farmasi, dan asuransi kesehatan dan pengetahuan ibu tentang kehamilan dan kesehatan ibu dan anak. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan AKI yaitu pengadaan kelas ibu hamil, mendekatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui bidan desa dan poskesdes serta meningkatkan promosi kesehatan melalui media massa dan media sosial. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 salah satunya karena ada penyakit penyerta yang diderita, kemudian setelah dilakukan berbagai upaya sehingga pada tahun 2020 turun menjadi 95,01. Standarnya maksimal 102/100.000 kelahiran hidup.

Tabel 4. 2 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur per Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Lahir Hidup	Kematian Ibu			
		Jumlah Kematian Ibu			
		<20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Total
Ngrayun	572	0	0	0	0
Slahung	595	0	1	1	2
Bungkal	379	0	2	1	3
Sambit	421	0	2	0	2
Sawoo	668	0	1	1	2
Sooko	266	0	0	0	0
Pudak	91	0	0	0	0
Pulung	562	0	2	2	4
Mlarak	379	0	1	0	1
Siman	446	0	0	3	3
Jetis	361	0	1	0	1
Balong	503	0	0	0	0
Kauman	516	0	0	1	1
Jambon	425	0	3	0	3
Badegan	357	0	0	0	0
Sampung	421	0	0	1	1
Sukorejo	585	0	1	0	1
Ponorogo	824	1	2	0	3
Babadan	794	0	2	2	4
Jenangan	565	0	4	0	4
Ngebel	238	0	0	0	0
Total					35

Sumber: Indikator Kerja Dinas Kesehatan, 2021

4.1.3 Data Kelahiran dan Kematian Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin

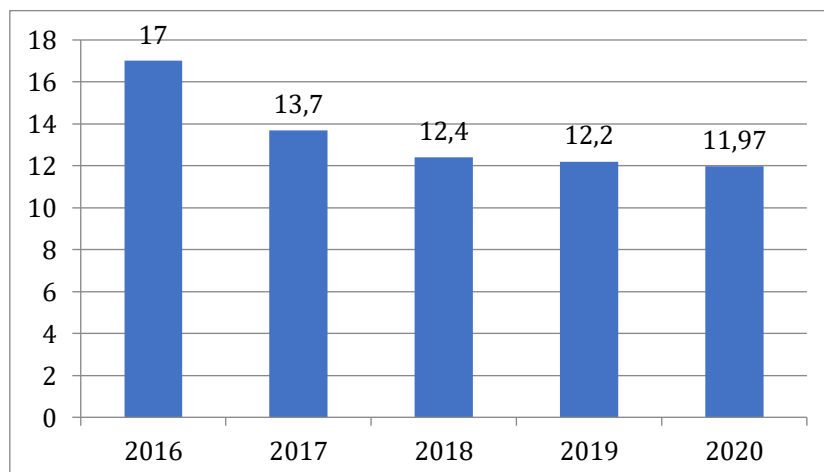
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka Kematian Bayi



merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian Angka Kematian Bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Idealnya untuk AKB paling banyak adalah 23/1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi yang tercatat di Kabupaten Ponorogo pada lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 sempat mengalami kenaikan yang signifikan, namun sampai dengan tahun 2020 semakin menurun. Ada banyak faktor yang memengaruhi AKB, tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis terampil, serta kesediaan masyarakat untuk mengubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap AKB, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usia pernikahan dan kehamilan, ibu hamil dengan komplikasi dan masih berkembangnya mitos-mitos tentang kehamilan di masyarakat.

Pada tahun 2020 AKB sebesar 11,97 menunjukkan bahwa kinerja petugas dalam menurunkan kematian bayi di Kabupaten Ponorogo sudah sangat baik. Faktor yang memengaruhi keberhasilan pengurangan AKB antara lain Pengembangan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, rumah bersalin, praktik dokter, apotek, laboratorium, perusahaan farmasi, dan asuransi kesehatan dan Pengetahuan ibu tentang kehamilan dan kesehatan ibu dan anak. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah pengadaan kelas ibu hamil, mendekatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui bidan desa dan Poskesdes, serta meningkatkan promosi kesehatan melalui media massa dan media sosial.





Gambar 4. 1 Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

Tabel 4. 3 Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Kelahiran					
	Laki-laki			Perempuan		
	Hidup	Mati	Total	Hidup	Mati	Total
Ngrayun	315	1	316	310	2	312
Slahung	277	3	280	250	4	254
Bungkal	186	2	188	169	1	170
Sambit	233	4	237	190	5	195
Sawoo	322	3	325	329	3	332
Sooko	128	0	128	109	1	110
Pudak	57	0	57	49	1	50
Pulung	270	6	276	320	3	323
Mlarak	198	6	204	174	3	177
Siman	288	4	292	216	2	218
Jetis	183	1	184	153	0	153
Balong	238	4	242	244	2	246
Kauman	269	3	272	225	2	227
Jambon	239	1	240	235	2	237
Badegan	184	4	188	141	2	143
Sampung	224	5	229	204	4	208
Sukorejo	321	1	322	288	3	291
Ponorogo	419	8	427	376	5	381
Babadan	411	5	416	308	1	309
Jenangan	296	1	297	298	2	300
Ngebel	109	1	110	126	0	126
Angka Lahir Mati per 1000 kelahiran		12			10,1	

Sumber: Indikator Kerja Dinas Kesehatan, 2021

4.1.4 Data Migrasi Masuk dan Keluar Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam arti luas, migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen (Tjiptoherijanto, 2009). Dalam pengertian yang demikian tersebut tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, serta tidak dibedakan antara migrasi dalam negeri dengan migrasi luar negeri (Lee, 2011). Migrasi penduduk tidak bisa dicegah, bahkan dilarang, karena sama artinya dengan melarang pendatang untuk mencari kesempatan yang lebih baik di wilayah lain. Oleh karenanya, inklusivitas dalam pembangunan wilayah perlu diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan wilayah untuk semua, termasuk bagi para pendatang. Banyaknya lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren berkelas nasional maupun internasional yang khusus mendidik santri laki-laki mengakibatkan arus migrasi masuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan.

Tabel 4. 4 Migrasi Masuk dan Keluar Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Migrasi Masuk		Migrasi Keluar	
	L	P	L	P
Ngrayun	405	355	441	405
Slahung	404	445	402	432
Bungkal	232	229	236	288
Sambit	285	290	249	237
Sawoo	344	348	399	401
Sooko	191	196	203	215
Pudak	42	38	57	53



Kecamatan	Migrasi Masuk		Migrasi Keluar	
	L	P	L	P
Pulung	355	388	411	419
Mlarak	289	324	270	292
Siman	442	495	390	414
Jetis	242	253	245	253
Balong	332	368	309	345
Kauman	352	356	319	350
Jambon	335	336	302	320
Badegan	231	231	216	215
Sampung	251	297	258	273
Sukorejo	402	403	414	441
Ponorogo	916	915	906	931
Babadan	576	602	580	614
Jenangan	458	487	485	485
Ngebek	129	138	143	189
Jumlah/Total 2021	7.213	7.494	7.235	7.572

Sumber: Indikator Kerja Dinas Kesehatan, 2021

4.2 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan suatu cara untuk menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada beberapa asumsi komponen yang bekerja di dalamnya, meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi memegang peranan penting dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan penduduk merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap *demand* pembangunan, baik infrastruktur, perekonomian, dsb. Proyeksi penduduk di Kabupaten Ponorogo akan dihitung menggunakan rumus proyeksi penduduk eksponensial. Penentuan rumus tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan penduduk yang berlangsung terus menerus akan bertambah sedikit demi sedikit seiring dengan adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu. Berikut rumus eksponensial yang digunakan:

Rumus:

$$P_n = P_o \times 1^{r \cdot n}$$

Keterangan:

P_n = Jumlah penduduk tahun ke-n

P_o = Jumlah penduduk tahun dasar (2022)

r = Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ponorogo

n = Tahun ke-n (1, 2, 3, 4, 5, dst)

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ponorogo

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2019-2020	2020-2021
Ngrayun	60.200	0,74	0,75
Slahung	53.720	0,77	0,78
Bungkal	38.420	1,05	1,05
Sambit	39.900	1,05	1,04
Sawoo	61.270	1,04	1,03
Sooko	24.080	0,92	0,92
Pudak	9.230	0,29	0,33
Pulung	51.930	1,12	1,1



Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2019-2020	2020-2021
Mlarak	35.290	0,3	0,22
Siman	48.380	1,39	1,36
Jetis	31.430	0,7	0,71
Balong	47.380	1,21	1,19
Kauman	46.740	1,45	1,41
Jambon	46.090	1,58	1,53
Badegan	33.240	1,24	1,21
Sampung	40.120	1,03	1,02
Sukorejo	57.980	1,45	1,43
Ponorogo	77.220	0,3	0,34
Babadan	70.900	1,14	1,13
Jenangan	61.110	1,6	1,55
Ngebel	21.220	0,96	0,95
Kabupaten Ponorogo	955.840	1,01	1,01

Sumber: BPS, 2022



Tabel 4. 6 Proyeksi Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2035

Kecamatan	Tahun													
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ngrayun	60.200	60.650	61.104	61.561	62.021	62.485	62.952	63.423	63.897	64.375	64.856	65.341	65.830	66.322
Slahung	53.720	54.138	54.559	54.984	55.411	55.843	56.277	56.715	57.156	57.601	58.049	58.501	58.956	59.414
Bungkal	38.420	38.826	39.235	39.649	40.068	40.491	40.918	41.350	41.787	42.228	42.674	43.124	43.579	44.039
Sambit	39.900	40.319	40.743	41.171	41.603	42.040	42.482	42.928	43.379	43.835	44.295	44.761	45.231	45.706
Sawoo	61.270	61.907	62.552	63.202	63.860	64.524	65.195	65.874	66.559	67.252	67.951	68.658	69.372	70.094
Sooko	24.080	24.303	24.527	24.754	24.983	25.214	25.447	25.682	25.919	26.159	26.400	26.644	26.891	27.139
Pudak	9.230	9.259	9.287	9.316	9.345	9.374	9.403	9.432	9.462	9.491	9.521	9.550	9.580	9.610
Pulung	51.930	52.510	53.096	53.688	54.288	54.894	55.506	56.126	56.752	57.386	58.026	58.674	59.329	59.991
Mlarak	35.290	35.382	35.474	35.566	35.659	35.752	35.845	35.938	36.032	36.126	36.220	36.314	36.408	36.503
Siman	48.380	49.050	49.729	50.417	51.115	51.823	52.541	53.268	54.006	54.753	55.511	56.280	57.059	57.849
Jetis	31.430	31.652	31.876	32.102	32.329	32.558	32.788	33.020	33.254	33.489	33.726	33.964	34.205	34.447
Balong	47.380	47.952	48.531	49.117	49.710	50.310	50.917	51.532	52.154	52.784	53.421	54.066	54.718	55.379
Kauman	46.740	47.413	48.096	48.789	49.491	50.204	50.927	51.661	52.405	53.160	53.925	54.702	55.490	56.289
Jambon	46.090	46.812	47.546	48.291	49.048	49.816	50.597	51.390	52.195	53.013	53.844	54.688	55.545	56.416
Badegan	33.240	33.650	34.064	34.484	34.909	35.340	35.775	36.216	36.662	37.114	37.572	38.035	38.504	38.978
Sampung	40.120	40.533	40.951	41.373	41.799	42.230	42.665	43.104	43.548	43.997	44.450	44.908	45.371	45.839
Sukorejo	57.980	58.821	59.674	60.540	61.418	62.309	63.212	64.129	65.059	66.003	66.960	67.931	68.917	69.916
Ponorogo	77.220	77.467	77.716	77.965	78.215	78.465	78.717	78.969	79.222	79.476	79.731	79.987	80.243	80.500
Babadan	70.900	71.709	72.528	73.356	74.193	75.040	75.896	76.763	77.639	78.525	79.422	80.328	81.245	82.172
Jenangan	61.110	62.080	63.066	64.067	65.084	66.117	67.167	68.233	69.316	70.416	71.534	72.670	73.823	74.995
Ngebel	21.220	21.424	21.629	21.837	22.046	22.258	22.471	22.687	22.905	23.125	23.346	23.570	23.797	24.025
Kab. Ponorogo	955.840	965.543	975.344	985.245	995.247	1.005.350	1.015.555	1.025.864	1.036.278	1.046.797	1.057.423	1.068.158	1.079.001	1.089.954

Sumber: Hasil Analisa, 2022



Tabel 4. 7 Proyeksi Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2036 – 2047

Kecamatan	Tahun											
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Ngrayun	66.818	67.318	67.821	68.328	68.839	69.354	69.873	70.395	70.921	71.452	71.986	72.524
Slahung	59.877	60.342	60.812	61.285	61.762	62.242	62.727	63.215	63.706	64.202	64.702	65.205
Bungkal	44.504	44.974	45.448	45.928	46.413	46.903	47.398	47.898	48.404	48.915	49.431	49.953
Sambit	46.186	46.671	47.161	47.657	48.157	48.663	49.175	49.691	50.213	50.741	51.274	51.812
Sawoo	70.823	71.560	72.305	73.057	73.817	74.585	75.361	76.145	76.937	77.738	78.546	79.364
Sooko	27.390	27.643	27.899	28.157	28.417	28.679	28.945	29.212	29.482	29.755	30.030	30.307
Pudak	9.639	9.669	9.699	9.729	9.760	9.790	9.820	9.851	9.881	9.912	9.943	9.974
Pulung	60.661	61.338	62.022	62.715	63.415	64.123	64.838	65.562	66.294	67.034	67.782	68.539
Mlarak	36.598	36.694	36.789	36.885	36.981	37.077	37.174	37.270	37.367	37.465	37.562	37.660
Siman	58.650	59.462	60.285	61.120	61.966	62.824	63.694	64.576	65.470	66.376	67.295	68.227
Jetis	34.690	34.936	35.183	35.432	35.683	35.935	36.189	36.445	36.703	36.963	37.224	37.488
Balong	56.048	56.724	57.409	58.102	58.803	59.513	60.232	60.959	61.695	62.440	63.193	63.956
Kauman	57.100	57.922	58.756	59.603	60.461	61.332	62.215	63.111	64.020	64.942	65.878	66.827
Jambon	57.300	58.198	59.110	60.036	60.977	61.933	62.903	63.889	64.890	65.907	66.940	67.989
Badegan	39.459	39.945	40.437	40.936	41.440	41.951	42.468	42.992	43.521	44.058	44.601	45.151
Sampung	46.311	46.788	47.270	47.757	48.249	48.746	49.248	49.756	50.268	50.786	51.309	51.838
Sukorejo	70.930	71.959	73.003	74.062	75.136	76.226	77.331	78.453	79.591	80.745	81.916	83.104
Ponorogo	80.758	81.017	81.277	81.537	81.798	82.061	82.324	82.588	82.852	83.118	83.384	83.651
Babadan	83.110	84.059	85.019	85.989	86.971	87.963	88.967	89.983	91.010	92.049	93.100	94.162
Jenangan	76.186	77.395	78.624	79.872	81.140	82.428	83.737	85.066	86.416	87.788	89.182	90.597
Ngebel	24.256	24.488	24.723	24.960	25.200	25.442	25.686	25.932	26.181	26.432	26.686	26.942
Kab. Ponorogo	1.101.018	1.112.195	1.123.485	1.134.889	1.146.410	1.158.047	1.169.803	1.181.678	1.193.673	1.205.790	1.218.031	1.230.395

Sumber: Hasil Analisa, 2022



4.3 Analisis Kondisi Ideal Kependudukan

4.3.1 Kuantitas Penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk. Kuantitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan program pembangunan kependudukan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Ponorogo sebanyak 955.840 jiwa. Berikut merupakan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo untuk 25 tahun mendatang.



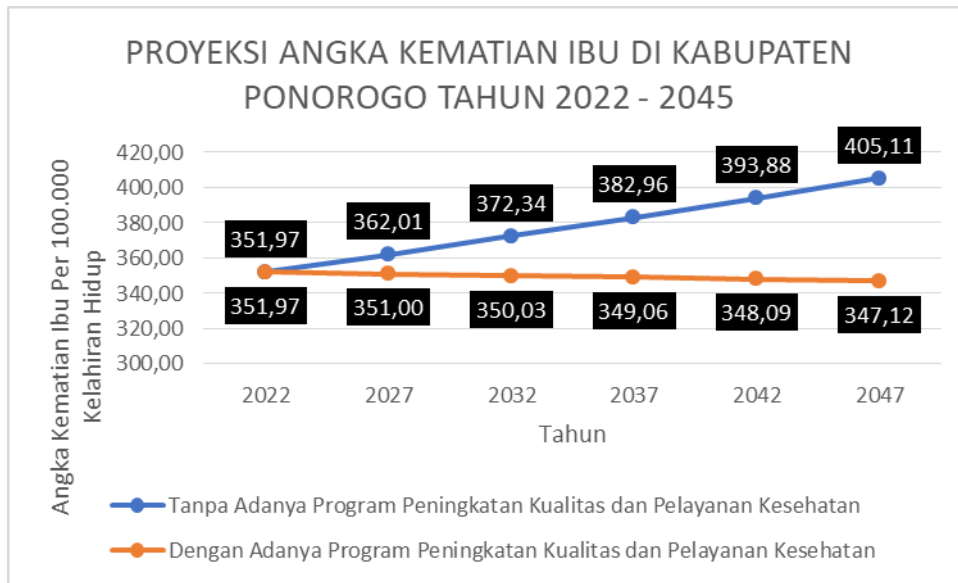
Gambar 4. 2 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2047

Sumber: Hasil Analisis, 2022

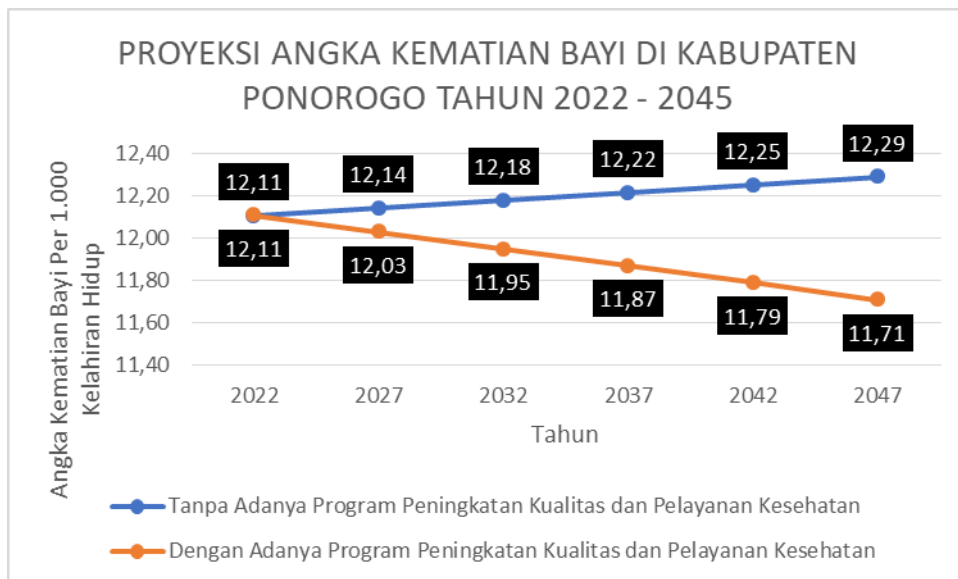
Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk 25 tahun mendatang pada gambar diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk akan terus meningkat. Hal tersebut tentunya perlu suatu program pengelolaan berupa pengendalian kuantitas penduduk yang dimaksudkan supaya pelayanan public lebih optimal dan pembangunan penduduk di suatu wilayah dapat berjalan dengan lebih efektif dan cepat. Pengelolaan kuantitas penduduk dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berkualitas (KB). Kuantitas Penduduk perlu dikendalikan dan dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan dampak buruk yang terjadi dikemudian hari, selain itu kebutuhan dan pelayanan publik dapat terpenuhi dengan optimal. Pengendalian kuantitas penduduk tidak hanya mengenai angka kelahiran namun juga harus memperhitungkan angka kematian yang terjadi pada ibu dan bayi di Kabupaten Ponorogo. Berikut



merupakan proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Ponorogo



Gambar 4. 3 Proyeksi AKI di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2045
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 4. 4 Proyeksi AKB di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2045
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan proyeksi pada kedua gambar di atas, dapat dilihat bahwa menggunakan skenario intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, berupa program peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi di Kabupaten Ponorogo. Intervensi program tersebut nyata-nyata sangat berpengaruh positif terhadap pengendalian mortalitas di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 hingga 2045. Terlihat dalam gambar bahwa, jika tidak ada intervensi program maka angka kematian ibu dan bayi akan terus meningkat. Namun dengan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pada fasilitas kesehatan, angka kematian ibu dan bayi dapat



secara berangsur menurun. Selanjutnya akan dijelaskan program pemerintah yang berkaitan dengan program Keluarga Berkualitas yang disertai capaian dan target program hingga tahun 2026 mendatang.

A. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk diperlukan karena peningkatan kuantitas penduduk yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada beberapa aspek kehidupan seperti lingkungan, ekonomi, keamanan, dll. Program ini sesuai dengan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dengan indikator program yaitu Persentase Kampung KB Aktif. Tujuan umum Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan keluarga berkualitas. Program Keluarga Berkualitas (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan kuantitas penduduk. Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berkualitas meliputi:

6. Pendewasaan usia perkawinan;
7. Pengaturan kehamilan yang diinginkan
8. Pembinaan kesertaan keluarga berencana
9. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan
10. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana

Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa Kampung KB Aktif telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh kampung di Kabupaten Ponorogo telah aktif mengikuti program KB. Target kinerja dari program ini di tahun 2021-2026 juga 100% sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh dan dapat dipertahankan di seluruh kampung Kabupaten Ponorogo. Namun, berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, presentase akseptor KB masih belum mencapai 100%. Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Dengan data tersebut maka pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama. Pemerintah perlu meningkatkan akses terhadap fasilitas KB di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo dan memberi sosialisasi pada masyarakat, di sisi lain masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan manfaat dari program KB.

Tabel 4. 8 Presentase Akseptor KB

Presentase Akseptor KB	Capaian Kinerja					
	2016	2017	2018	2019	2020	
	76,61%	66,71%	66,62%	67,03%	66,75%	
Presentase Akseptor KB	Target Kinerja					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	66,76%	66,77%	66,78%	66,79%	66,80%	66,81%

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana



Salah satu arah kebijakan dari program Keluarga Berkualitas (KB) yaitu Pembinaan Keluarga Berencana. Pada awal pengenalan program pada masyarakat perlu dilakukannya pembinaan supaya dalam prosesnya sesuai dengan yang diharapkan dan program KB berhasil. Hal ini juga penting dilakukan supaya angka presentase akseptor KB dapat meningkat dan mencapai 100%. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026, indikator program ini yaitu Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru. Berikut merupakan capaian kinerja program pembinaan keluarga berencana.

Tabel 3. 21 Presentase Cakupan Pelayanan KB Baru

Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	66,45	66,55	67,03	67,04	67,54

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan presentase cakupan pelayanan KB baru di Kabupaten Ponorogo, namun pada tahun 2019-2020 terjadi kemunduran dalam peningkatan presentasinya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya pada tahun tersebut Indonesia sedang mengalami beberapa masalah karena hadirnya pandemic COVID-19. Masalah yang mempengaruhi Cakupan Pelayanan KB saat pandemic COVID-19 antara lain akseptor takut datang ke faskes karena wabah, faskes tutup sementara, APD belum terdistribusikan dengan menyeluruh, terbatasnya produksi alokon, terganggunya rantai pasok alat dan obat kontrasepsi. Namun pemerintah dan stakeholder terkait cepat menyesuaikan keadaan sehingga pada tahun 2021 angka peningkatan sudah kembali seperti sedia kala.

Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan target capaian indikator Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru pada tahun 2022 sebesar 100%, maka dapat dilihat bahwa terdapat *gap* yang cukup tinggi antara capaian kinerja dengan target kinerja, sehingga perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB baru di Kabupaten Ponorogo, seperti meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana, mengadakan kegiatan pembinaan untuk keluarga berencana, pemerataan pelayanan pembinaan keluarga berencana, dan sebagainya. Meskipun tidak dapat langsung meningkat menjadi 100% namun dengan upaya-upaya tersebut diharapkan kondisi ideal cakupan pelayanan KB secara menyeluruh dapat tercapai.

4.3.2 Kualitas Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Indikator utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kualitas penduduk ialah Indeks



Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

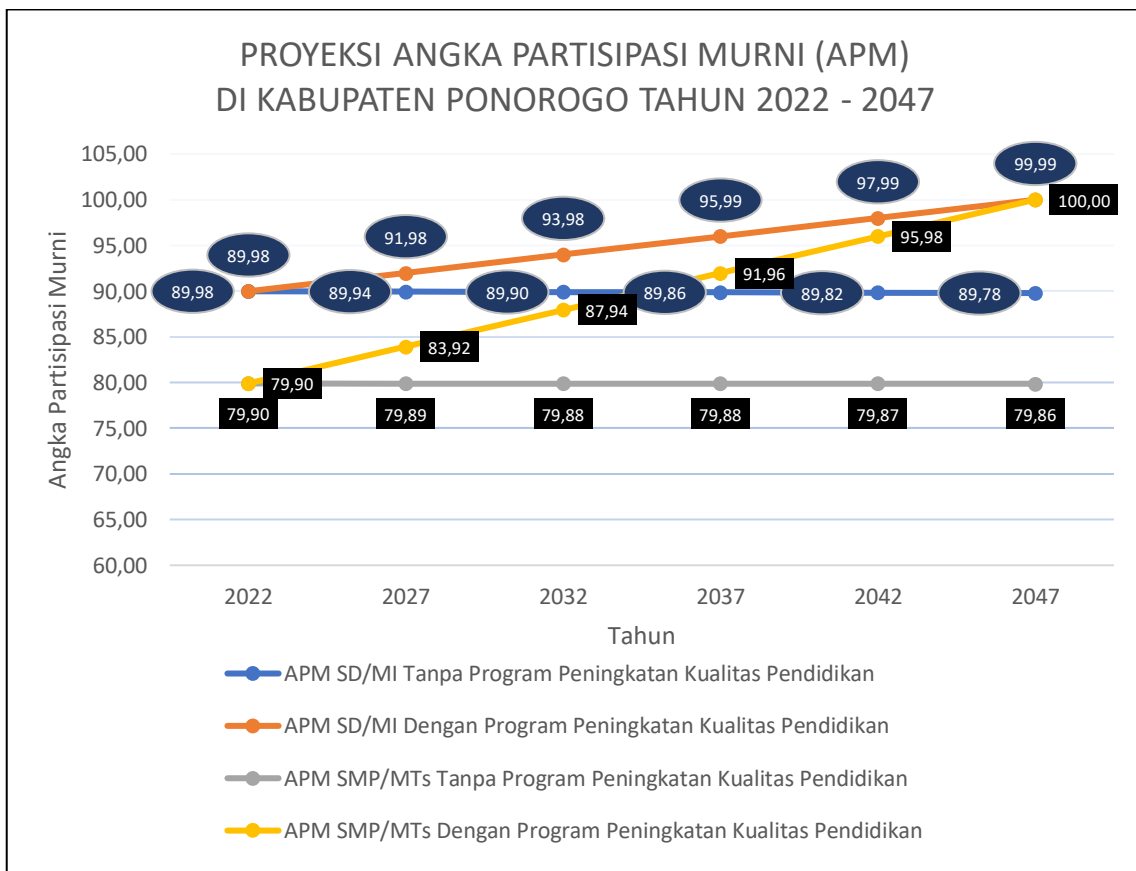
Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam mewujudkan perkembangan suatu wilayah. Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu mewujudkan *Ponorogo Hebat* melalui *Nawa Darma Nyata: Pertanian Hebat, Pendidikan Hebat, Kesehatan Hebat, Perempuan Hebat, Seni Budaya dan Pariwisata Hebat, Pemuda dan Olahraga Hebat, UMKM Hebat, RT Hebat, dan Pemerintahan Amanah*. Semua hal tersebut bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Ponorogo.

A. Pendidikan

Kondisi yang diharapkan melalui peningkatan kualitas penduduk pada dimensi pendidikan ialah meningkatnya indeks pendidikan di Kabupaten Ponorogo yang masih di bawah rata-rata provinsi maupun nasional, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat dua permasalahan utama pada kondisi pendidikan di Kabupaten Ponorogo ialah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah, yaitu 7,54 tahun yang berarti berada pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Harapan Lama Sekolah (HLS). Kondisi tersebut dapat terjadi karena rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Ponorogo. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Berbeda dengan APM yang digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pada jenjang yang sesuai, APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Sehingga, semakin tinggi nilai APK maka semakin banyak anak usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak yang berada di luar usia sekolah. Berikut merupakan proyeksi nilai APK dan APM di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 hingga 2047:



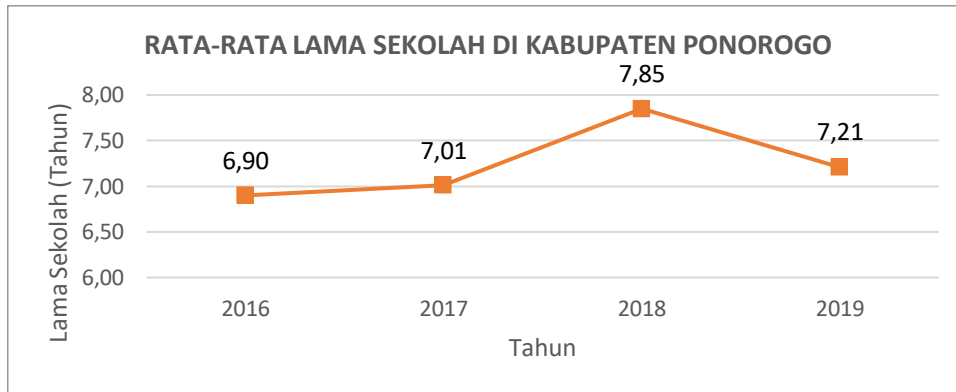
Gambar 4. 5 Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022



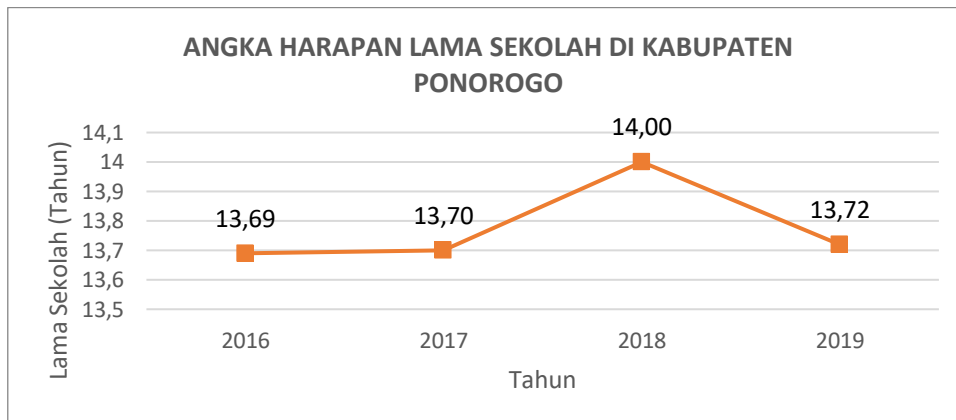
Gambar 4. 6 Proyeksi Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Berdasarkan kedua gambar tersebut, APK dan APM di Kabupaten Ponorogo akan terus mengalami penurunan hingga tahun 2047 atau 25 tahun mendatang. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memperparah angka rata-rata lama sekolah. Pada kedua gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa menggunakan skenario intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, berupa pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan, baik melalui perbaikan aksesibilitas dan sarana, ataupun pada kompetensi tenaga pendidik maka dapat meningkat hingga mencapai 100% atau nilai ideal pada 25 tahun mendatang.



Gambar 4. 7 Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2019
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Ponorogo, 2020



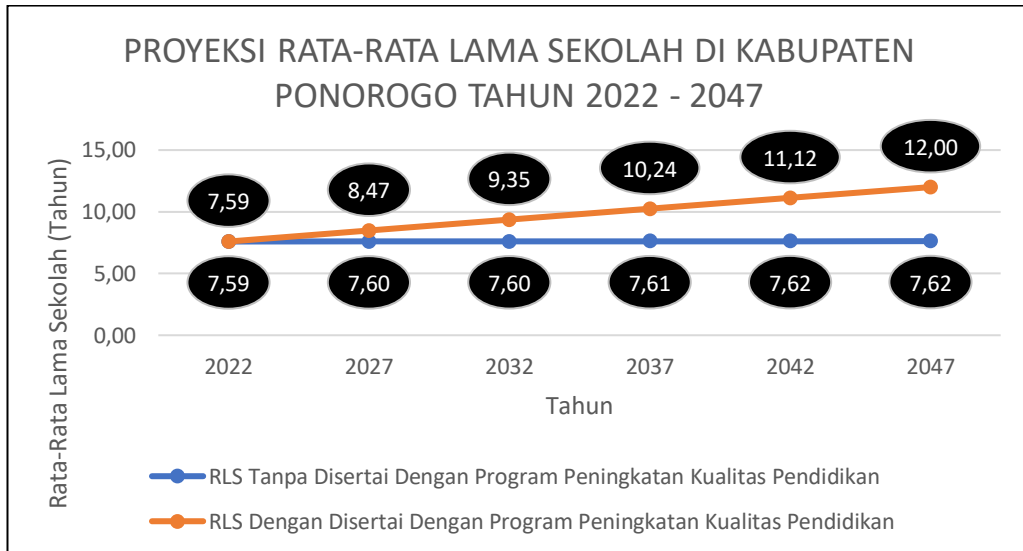
Gambar 4. 8 Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2019
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Ponorogo, 2020

Selanjutnya apabila ditinjau dari tren rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali. Berikut merupakan proyeksi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ponorogo menggunakan dua skenario, yaitu skenario proyeksi tanpa disertai dan skenario proyeksi yang disertai dengan upaya-upaya peningkatan kualitas dan layanan pendidikan. Pada gambar di bawah ini, rata-rata lama sekolah diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga dapat memenuhi angka wajib belajar 12 tahun pada tahun 2047.

Peningkatan rata-rata lama sekolah dan partisipasi sekolah diharapkan dapat terjadi seiring dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta kompetensi pendidik dan tenaga



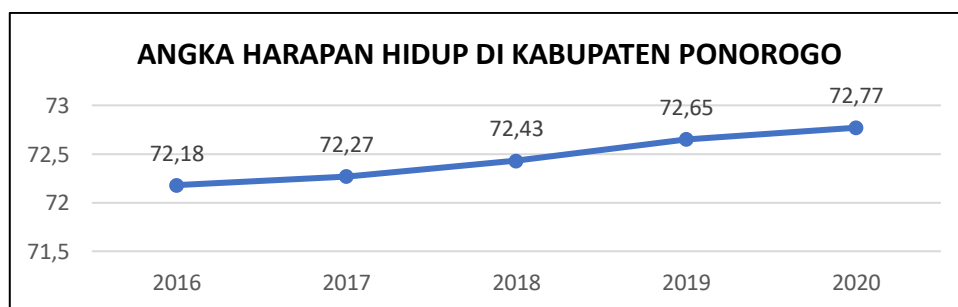
kependidikan yang perlu terus ditingkatkan dari sisi jumlah, kualitas, dan pemerataannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu melakukan beberapa upaya untuk mendorong kenaikan dua indikator tersebut, hingga dapat mencapai target di atas rata-rata provinsi dan nasional pada 5 tahun hingga 25 tahun mendatang



Gambar 4. 9 Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

B. Kesehatan

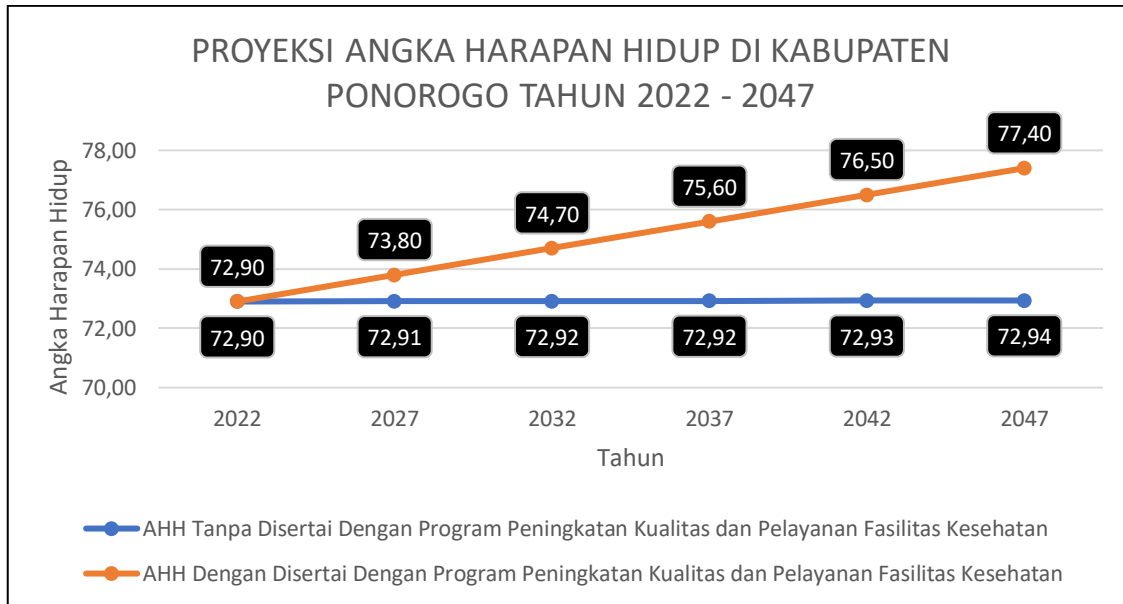
Kondisi yang diharapkan melalui peningkatan kualitas penduduk pada dimensi kesehatan ialah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik pada sarana dan prasarananya, maupun pada tenaga kesehatannya yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar. Peningkatan akses masyarakat selanjutnya akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat melalui Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan UHH menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan. UHH merupakan standar suatu daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.



Gambar 4. 10 Capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ponorogo
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Ponorogo, 2020



Angka UHH Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun memang menunjukkan tren positif dan berada di atas UHH Jawa Timur dan UHH Nasional. Pada tahun 2019, UHH Kabupaten Ponorogo sebesar 72,65 tahun dan pada tahun 2020 naik UHH menjadi 72,77 tahun. Angka tersebut diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan akses kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Berikut merupakan proyeksi angka harapan hidup di Kabupaten Ponorogo menggunakan dua skenario, yaitu skenario proyeksi tanpa disertai dan skenario proyeksi yang disertai dengan upaya-upaya peningkatan kualitas dan layanan kesehatan.



Gambar 4. 11 Proyeksi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Ponorogo dapat ditingkatkan melalui beberapa upaya, seperti:

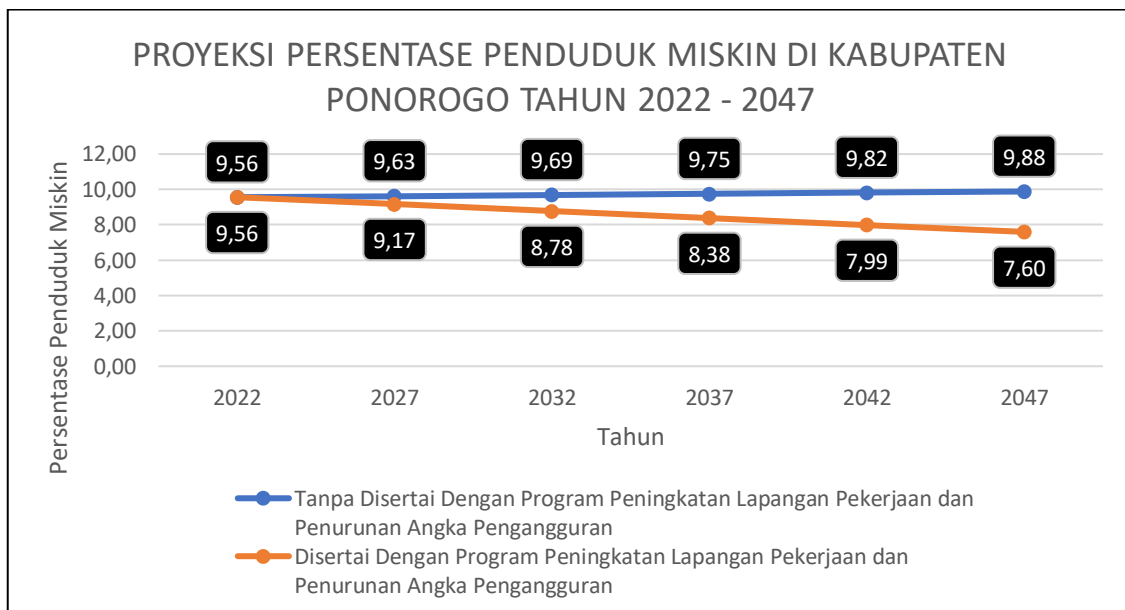
1. Peningkatan akses ke fasilitas kesehatan
2. Penyediaan sarana kesehatan sesuai dengan standar
3. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kesehatan
4. Peningkatan kemudahan pembiayaan fasilitas kesehatan melalui pemanfaatan asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah
5. Pendampingan dan pembinaan untuk pengendalian penyakit dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai gizi
6. Peningkatan layanan kesehatan untuk penduduk lanjut usia

Program-program peningkatan kualitas dan pelayanan fasilitas kesehatan diproyeksikan dapat meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Ponorogo hingga 4,5 tahun. Kondisi tersebut dapat terjadi seiring dengan semakin baiknya derajat kesehatan suatu masyarakat.

C. Standar Hidup Layak (Ekonomi)

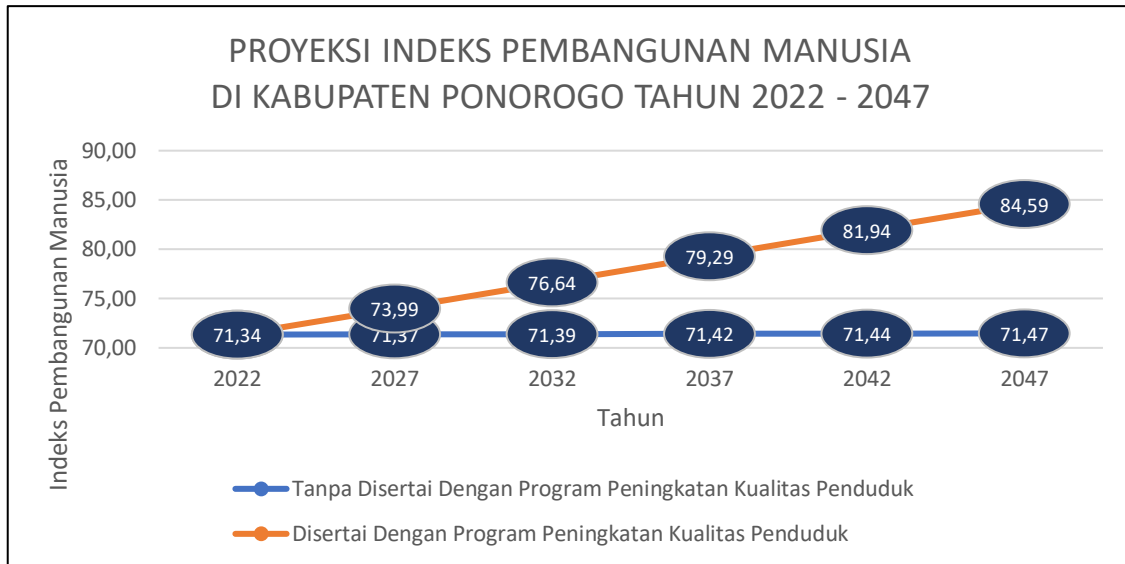


Kondisi yang diharapkan dari peningkatan kualitas penduduk pada dimensi standar hidup layak terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat ialah meningkatnya daya beli masyarakat yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, dan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, penyediaan program pelatihan tenaga kerja, peningkatan hubungan kerjasama, dan beberapa upaya guna mendorong terciptanya kesempatan kerja. Adapun permasalahan mengenai tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo ialah masih kurangnya sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan, rendahnya kualitas kompetensi dan daya saing pencari kerja, rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha karena keterbatasan modal, serta rendahnya kualitas lembaga pelatihan kerja. Namun hal tersebut dapat diatasi melalui pengoptimalan beberapa peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo, seperti kerjasama dengan lembaga swasta dan bursa kerja untuk melaksanakan pelatihan dan perekrutan tenaga kerja, maupun mengembangkan potensi daerah, seperti pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja baru.



Gambar 4. 12 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Penurunan tingkat pengangguran secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat, terutama pada penduduk miskin. Berdasarkan hasil proyeksi, diketahui bahwa jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo akan mengalami penurunan hingga 7,6% pada tahun 2047 seiring dengan semakin banyaknya kesempatan bekerja di Kabupaten Ponorogo dan menurunnya tingkat pengangguran.



Gambar 4. 13 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

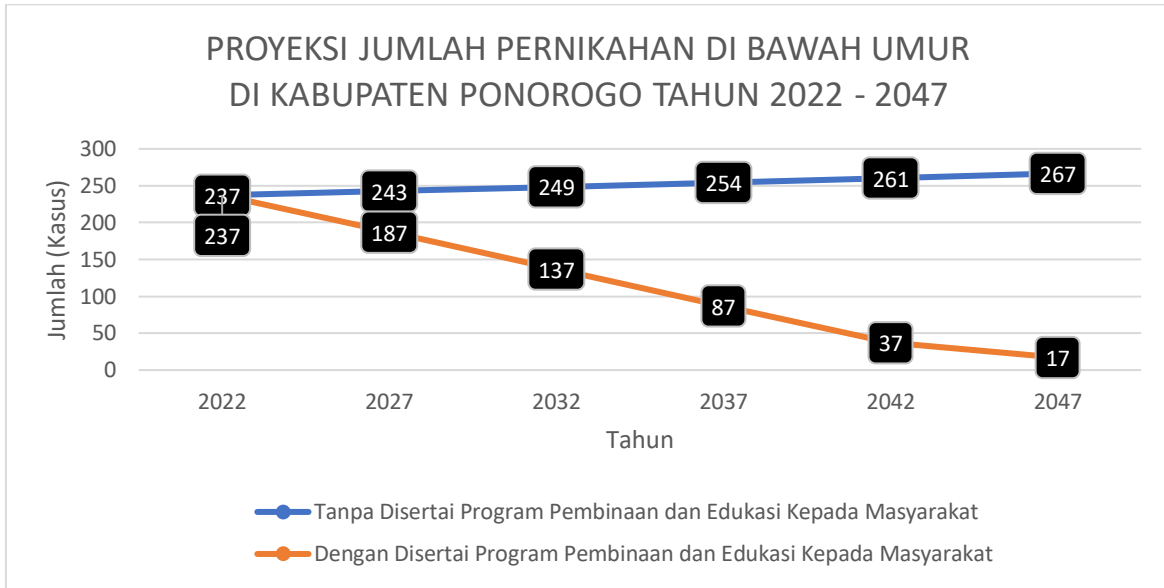
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Berdasarkan hasil proyeksi pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa melalui upaya peningkatan kualitas penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, diharapkan dapat meningkatkan nilai IPM hingga mencapai 84,59 pada tahun 2047. Nilai tersebut tergolong dalam kategori IPM tinggi, sehingga melalui peningkatan IPM yang terjadi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Selain melalui peningkatan ketiga dimensi pembentuk IPM (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak), peningkatan IPM juga dapat didukung oleh kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta pemanfaatan kemajuan teknologi dalam pembangunan wilayah.

4.3.3 Kondisi Keluarga

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu Pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan

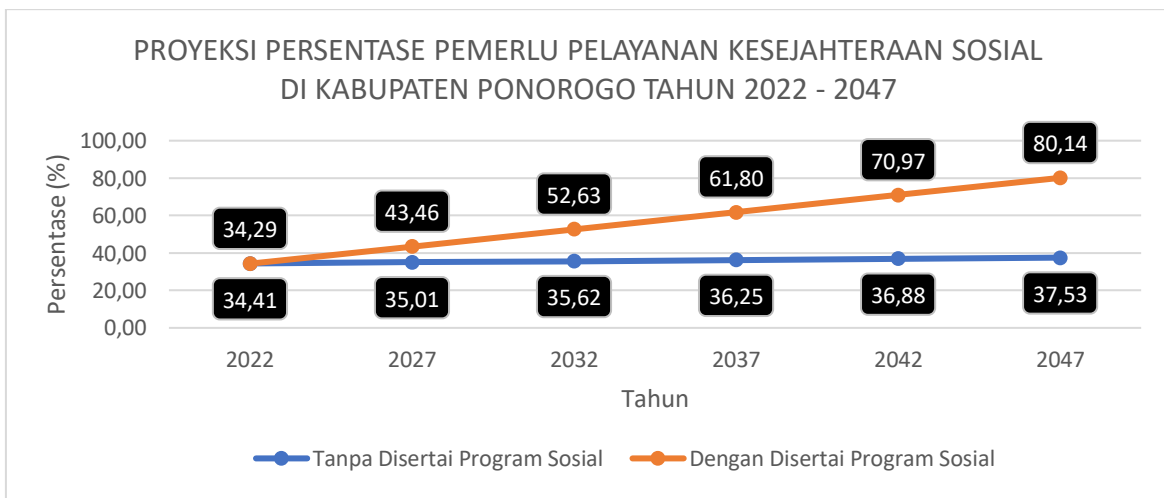


bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Gambar 4. 14 Proyeksi Jumlah Pernikahan Di Bawah Umur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan gambar diatas diketahui jumlah pernikahan di bawah umur akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2047 apabila tidak disertai dengan Progran Pembinaan dan Edukasi Kepada Masyarakat. Kedepannya dikhawatirkan dapat mempengaruhi ketahanan keluarga yang berpengaruh pada kualitas keluarga. Hal tersebut dikarenakan ketika memutuskan untuk menikah di usia yang tergolong dibawah umur maka sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan yang terbatas. Sedangkan apabila disertai dengan pelaksanaan program pembinaan dan edukasi kepada masyarakat jumlah pernikahan di bawah umur akan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut akan mencapai angka ideal pada 25 tahun mendatang.



Gambar 4. 15 Proyeksi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

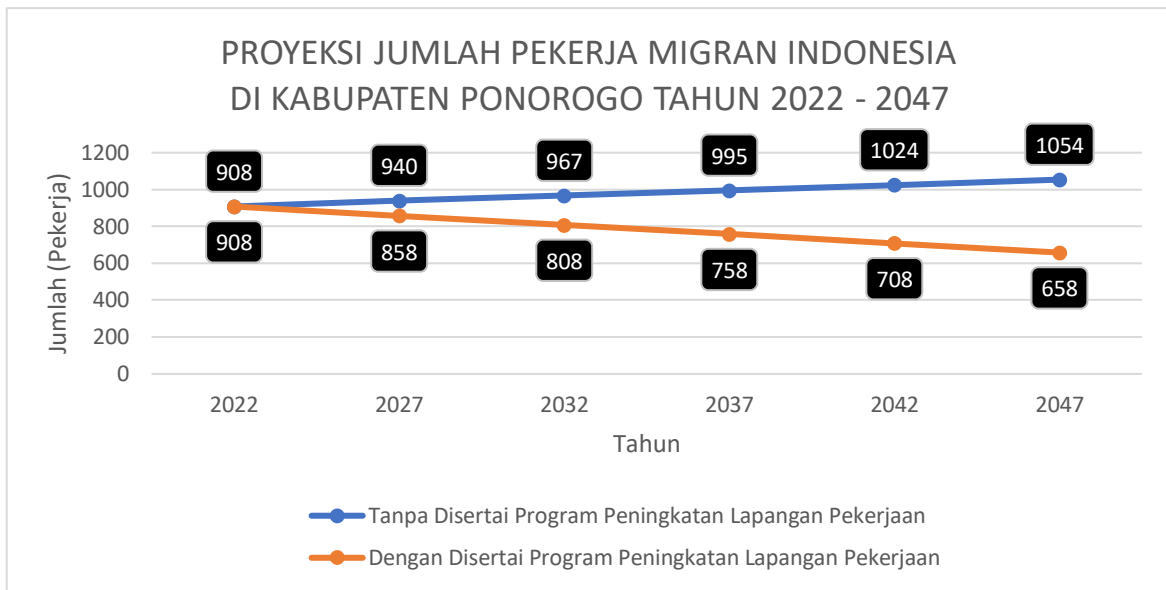


Berdasarkan gambar diatas diketahui persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tertangani terus mengalami peningkatan hingga tahun 2047 apabila disertai dengan Program Sosial. Sedangkan apabila tidak disertai dengan program sosial jumlah PPKS akan mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan tersebut akan mencapai kondisi ideal pada 25 tahun mendatang apabila dilakukan tindakan.

4.3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

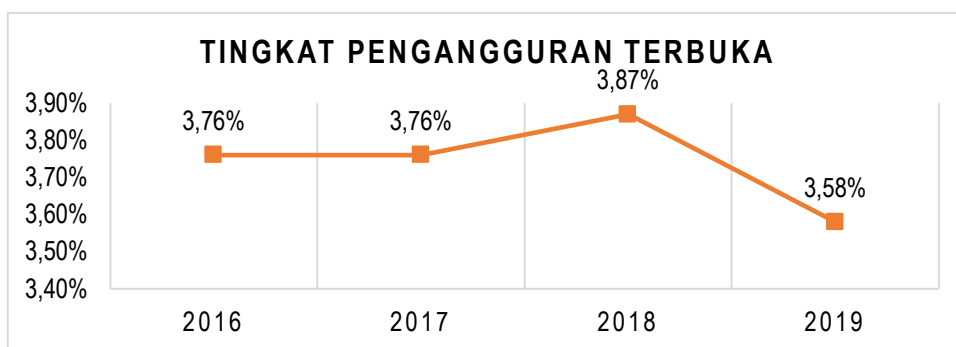
Keputusan Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang seimbang dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya, tentunya menghendaki penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kondisi yang diinginkan ini dapat terwujudkan kawasan-kawasan permukiman sebagai embrio dari wilayah perkotaan (kota-kota kecil) baru. Kawasan permukiman tersebut dapat diwujudkan dalam bermacam-macam skema pembangunan sebagaimana yang diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, membangun keterkaitan desa kota mewujudkan pusat pertumbuhan baru yang bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi.

Sedangkan berdasarkan aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih seimbang antar wilayah di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut bertujuan agar konsentrasi penduduk tidak semakin besar di beberapa kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang memang sudah padat penduduk. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya. Akan tetapi perlu disadari bahwa urbanisasi tidak semata-mata karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena daerah-daerah dengan katagori urban sudah semakin banyak karena fasilitas dan hasil pembangunan yang merata.



Gambar 4. 16 Proyeksi Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan gambar diatas diketahui jumlah PMI di Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan hingga tahun 2047 apabila tidak disertai dengan Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan. Kedepannya hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi persebaran penduduk yang tidak seimbang. Sedangkan apabila disertai dengan pelaksanaan program peningkatan lapangan pekerjaan maka otomatis jumlah PMI di Kabupaten Ponorogo akan mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan penurunan tersebut maka akan tercapai kondisi ideal pada 25 tahun mendatang.

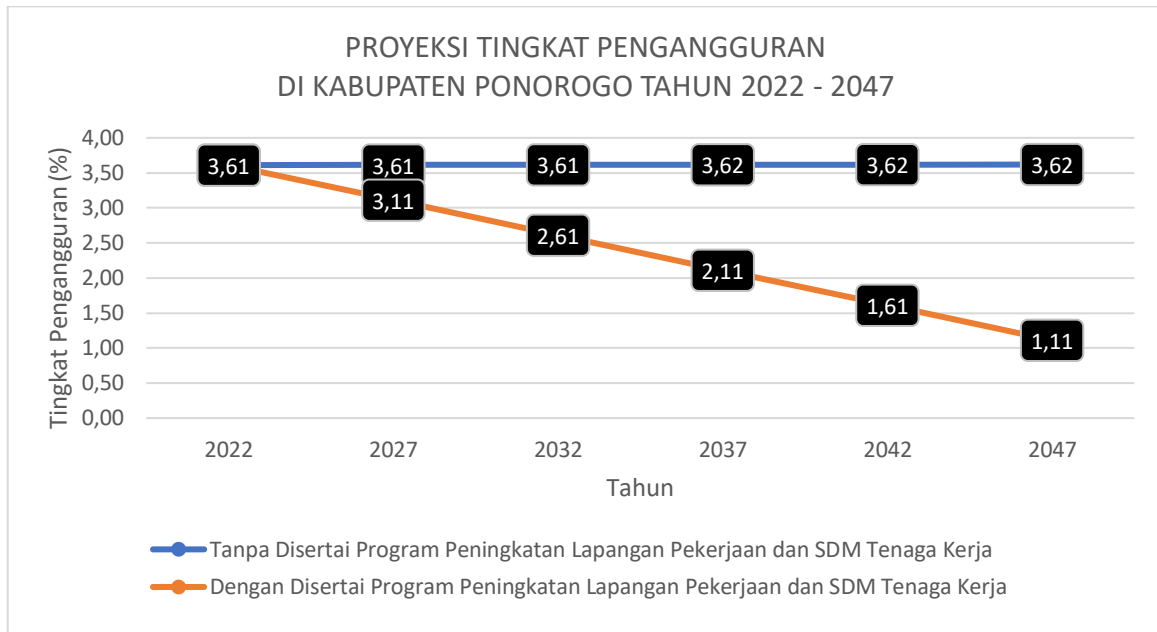


Gambar 4. 17 Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ponorogo
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Ponorogo, 2020

Berdasarkan capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2019. Target tingkat pengangguran terbuka Tahun 2020 adalah 3,80%, sedangkan capaian kinerja pada Tahun 2019 yaitu 3,58% atau melampaui target di Tahun 2020. Berikut merupakan proyeksi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo menggunakan dua skenario, yaitu skenario proyeksi tanpa disertai dan skenario proyeksi dengan disertai upaya penurunan jumlah pengangguran atau upaya peningkatan lapangan pekerjaan. Berikut merupakan grafik proyeksi tingkat pengangguran di Kabupaten Ponorogo sampai dengan Tahun



2047, kondisi tersebut akan mengalami penurunan hingga mencapai angka ideal pada 25 tahun mendatang.



Gambar 4. 18 Proyeksi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan gambar diatas diketahui tingkat pengangguran terus mengalami penurunan setiap tahunnya apabila disertai dengan program peningkatan lapangan pekerjaan dan SDM tenaga kerja. Jika tidak disertai dengan program peningkatan lapangan pekerjaan dan SDM tenaga kerja dikhawatirkan kedepannya menimbulkan masalah kesejahteraan sosial yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penurunan tersebut maka akan tercapai kondisi ideal di 25 tahun mendatang.

4.3.5 Database Kependudukan

Pilar ke lima yaitu database kependudukan, memiliki tujuan utama terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan. Database kependudukan yang terintegrasi juga akan mempermudah jalannya pelayanan publik mengenai kependudukan. Sayangnya saat ini pelayanan publik belum terintegrasi dan masih terpisah antar badan/lembaga pemerintahan yang menyebabkan kinerja program terhambat. Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan dalam database kependudukan meliputi:

5. Penataan dan pengelolaan *database* kependudukan
6. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan
7. Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa
8. Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi



Berikut merupakan penjelasan dari tiap program pada pilar ini yang disertai capaian dan target kinerja program serta bagaimana kondisi ideal yang diharapkan. Penjelasan akan dibedakan dalam 2 aspek yaitu yang pertama mengenai administrasi kependudukan dan yang kedua membahas mengenai publikasi informasi kependudukan.

C. Administrasi Kependudukan

Aspek pertama dalam pilar database kependudukan yaitu administrasi kependudukan. Pada aspek ini akan dibahas mengenai pendataan penduduk. Terdapat 3 program yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

4. Program Pendaftaran Penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah sangat penting dalam perhitungan kebutuhan daerah tersebut seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan selain itu data jumlah penduduk akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Maka data jumlah penduduk harus sesuai dengan kenyataannya. Untuk mencapai angka yang riil maka seluruh penduduk yang mendiami suatu daerah perlu melakukan pendaftaran pada instansi setempat. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program pendaftaran penduduk memiliki indikator yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Berikut data capaian program.

Tabel 3. 22 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	92,63%	100%	98,50%	100%	100%

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 mengalami peningkatan angka Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang cukup signifikan di Kabupaten Ponorogo, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Kemudian pada tahun 2020-2021 kembali terjadi peningkatan angka kepemilikan dokumen kependudukan yang dapat disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran kependudukan dan upaya stakeholder terkait untuk mengajak masyarakat melakukan pendaftaran. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan target capaian indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2022 sebesar 100%, maka hal tersebut merupakan hal yang menjadi tanggungjawab seluruh stakeholder terkait baik itu masyarakat maupun pemerintah untuk dapat mempertahankan angka tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan angka kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Ponorogo, seperti meningkatkan akses pada fasilitas kependudukan baik online ataupun offline, menyediakan prasarana/ruang pendukung pelayanan kependudukan,



pemerataan pelayanan di seluruh wilayah terutama desa, dan sebagainya. Jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik maka kepemilikan dokumen kependudukan akan mencapai kondisi ideal pada 5-25 tahun mendatang.

5. Program Pencatatan Sipil

Catatan sipil yaitu catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Terdapat 5 peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan penggantian nama. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program pencatatan sipil memiliki indikator yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil. Berikut data capaian program.

Tabel 3. 23 Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
	89,83%	90%	93,58%	95%	100%

Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan angka Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang cukup stabil di Kabupaten Ponorogo. Hal baik tersebut dapat dipengaruhi oleh sudah tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan target capaian indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2022-2026 sebesar 100%, maka hal tersebut merupakan hal yang menjadi tanggungjawab seluruh stakeholder terkait baik itu masyarakat maupun pemerintah untuk dapat mempertahankan angka tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan angka kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Ponorogo, seperti meningkatkan akses pada fasilitas pencatatan sipil baik online ataupun offline, menyediakan prasarana/ruang pendukung pelayanan pencatatan sipil, pemerataan pelayanan di seluruh wilayah terutama desa, dan sebagainya.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ponorogo diberikan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan akta kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang. Faktor pendorong peningkatan kualitas pelayanan ini adalah adanya peningkatan kompetensi dan kinerja dari petugas pelayanan. Peningkatan kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil ini juga menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan di Kabupaten Ponorogo telah meningkat. Capaian kinerja pelayanan kependudukan di Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 tersaji dalam tabel berikut.

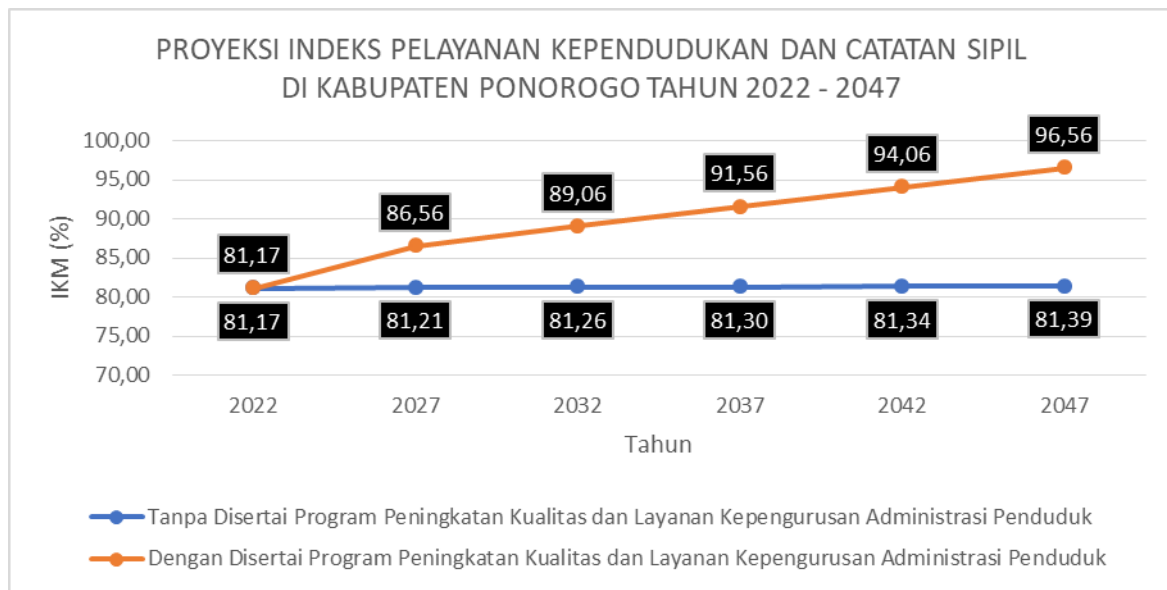
Tabel 4. 9 Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020



Rasio penduduk ber-KTP	73,51	73,15	77,82	78,24	77,07
Rasio bayi berakta kelahiran	86,68	91,19	93,95	96,13	99,33
Rasio pasangan berakta nikah	31,42	35,03	37,68	45,6	51,53
Kepemilikan KTP	92,71	92,63	97,89	98,5	96,78
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	306	383	423	441	482
Presentase anak yang diterbitkan KIA	-	-	-	20%	20%
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Presentase Penduduk yang memiliki e-KTP	71,38	73,51	73,15	77,82	77,07
Presentase kepemilikan Kartu Keluarga	100	100	100	100	100
Presentase Akta Kematian	39,68	31,66	76,2	82,9	91,17
Pemanfaatan Data	0	0	0	0	1

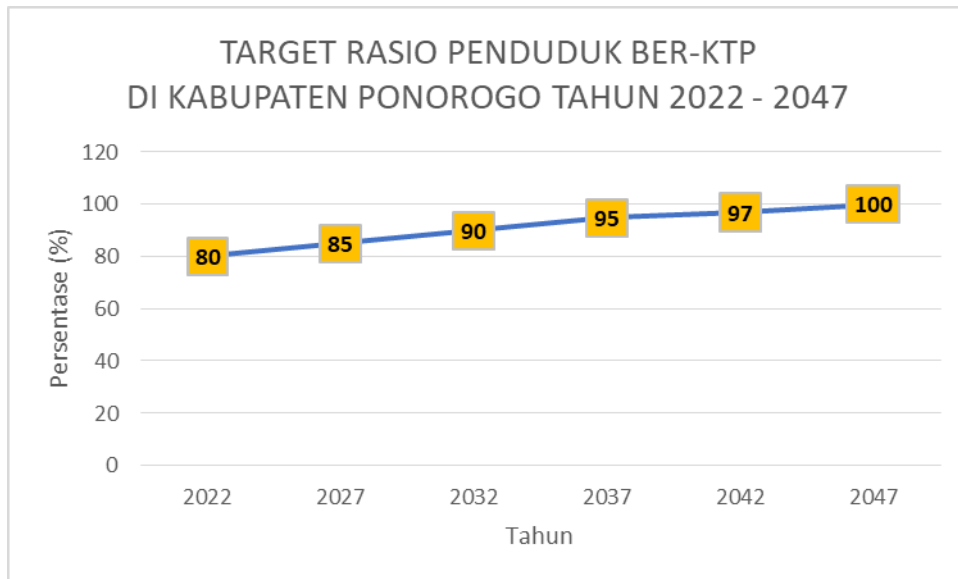
Sumber: RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026



Gambar 4. 19 Proyeksi Indeks Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2047

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan proyeksi pada gambar di atas, terlihat bahwa menggunakan skenario intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, berupa program peningkatan kualitas dan layanan kepengurusan administrasi penduduk di Kabupaten Ponorogo. Intervensi program tersebut sangat berpengaruh positif terhadap indeks pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 hingga 2047. Terlihat dalam gambar bahwa, jika tidak ada intervensi program maka angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan konstan dan terjadi peningkatan namun sangat lambat. Namun dengan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan layanan kepengurusan administrasi penduduk, angka IKM dapat meningkat secara signifikan dalam 25 tahun mendatang.



Gambar 4. 20 Target Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2047

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dalam rangka mendukung program peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, yang salah satunya yaitu Kartu Tanda Penduduk. Maka disusun target rasio penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Ponorogo dalam 25 tahun mendatang. Berdasarkan gambar diatas, target yang diharapkan dalam 25 tahun mendatang kepemilikan KTP akan terus meningkat dan dapat mencapai 100% pada tahun 2047. Target capaian program ini juga didukung dengan peningkatan kualitas dan pelayanan kepengurusan administrasi yang memperhatikan juga Indeks Kepuasan Masyarakat.

6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya data dan dokumen kependudukan terus meningkat, maka administrasi kependudukan pada suatu daerah dapat mencapai 100%. Selanjutnya instansi terkait perlu melakukan pengelolaan terhadap informasi kependudukan tersebut. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program pengelolaan informasi administrasi kependudukan memiliki indikator yaitu Persentase Data Kependudukan yang Valid. Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa data kependudukan yang valid telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh data kependudukan yang terdaftar di Kabupaten Ponorogo telah valid. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Ponorogo telah menyadari bahwa kebenaran administrasi kependudukan merupakan hal penting. Peningkatan kinerja urusan administrasi kependudukan menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan di Kabupaten Ponorogo telah meningkat. Target kinerja dari program ini di tahun 2022-2026 juga 100% sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh, terintegrasi, dan kesadaran masyarakat dapat dipertahankan di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo.

D. Publikasi Informasi Kependudukan



Data kependudukan yang telah diolah oleh pemerintah akan dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses dan hak untuk mengetahui informasi kependudukan tersebut. Dengan mengikuti perkembangan zaman, maka publikasi informasi kependudukan tidak hanya berupa dokumen hardcopy namun juga melalui online seperti website pemerintah yang disebut *e-government*. Pelayanan publik lain yang harus disediakan pemerintah yaitu penyediaan wadah untuk komunikasi dengan masyarakat mengenai informasi kependudukan. Program mengenai publikasi informasi kependudukan terbagi menjadi 3 program yaitu Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Aplikasi Informatika.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Data profil kependudukan masyarakat perlu dikelola dengan bijak oleh stakeholder terkait. Maka dari itu perlu program yang mengatur mengenai pengelolaan profil kependudukan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program pengelolaan profil kependudukan memiliki indikator yaitu Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan. Pemanfaatan data kependudukan dimaksudkan untuk keperluan pemerintah dalam menyusun kebijakan agar sesuai dengan kondisi eksisting penduduknya. Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh data kependudukan di Kabupaten Ponorogo telah dimanfaatkan dengan bijak. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pemanfaatan data kependudukan telah digunakan untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat. Target kinerja dari program ini di tahun 2022-2026 juga 100% sehingga diharapkan program ini dapat mencapai kondisi ideal pada 5-25 tahun kedepan dengan lebih menyeluruh dan dapat dipertahankan di Kabupaten Ponorogo.

5. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Berjalannya kinerja instansi pemerintah tidak hanya 1 arah, namun juga 2 arah sehingga masyarakat juga dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah. Program Informasi dan Komunikasi Publik dimaksudkan sebagai wadah untuk masyarakat agar mendapat hak dalam memperoleh informasi kependudukan dan mengkomunikasikan hal yang berkaitan dengan kependudukan. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut. Berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik.



Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program informasi dan komunikasi publik memiliki indikator yaitu Persentase Keluhan Masyarakat atas Pelayanan Pemda yang Tertangani. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah selama ini. Namun, data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani telah mencapai 98% yang memiliki arti bahwa hampir seluruh keluhan atas pelayanan Pemda di Kabupaten Ponorogo sudah tertangani. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa keluhan masyarakat ditangani dengan baik dan tidak dihiraukan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan aparatur pemerintahan dalam bekerja.

Target kinerja dari program ini di tahun 2022-2026 yaitu 98%, tidak terjadi kenaikan presentase dapat dipengaruhi oleh pelayanan atas keluhan ini belum dapat tertangani secara menyeluruh dan standar pelayanan publik masing-masing unit pelayanan di lingkungan Kabupaten Ponorogo berbeda dan data yang belum terintegrasi. Sehingga diharapkan program ini dapat lebih menangani segala macam keluhan dengan data yang telah terintegrasi dan dapat ditingkatkan lagi di Kabupaten Ponorogo supaya seluruh keluhan-keluhan masyarakat dapat menjadi saran dalam kinerja pemerintah kedepannya.

6. Program Aplikasi Informatika

Publikasi informasi kependudukan selain melalui dokumen juga perlu melalui online. Selain berisi mengenai publikasi informasi, aplikasi online dapat menjadi fasilitas untuk layanan publik lainnya seperti pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini akan mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor instansi terkait. Di era keterbukaan tata kelola pemerintahan saat ini tidak hanya *good governance* yang ingin diwujudkan namun *smart governance*, maka dibutuhkan dukungan teknologi dan informasi beserta kecepatannya. Disrupsi teknologi dan digitalisasi data dalam tata kelola pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan. Namun sampai saat ini penerapan *e-government* di Kabupaten Ponorogo belum optimal mengakibatkan kinerja tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal. Salah satu faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Ponorogo adalah belum terintegrasinya aplikasi *e-government*. Aplikasi-aplikasi tersebut masih parsial di masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 program aplikasi informatika memiliki indikator yaitu Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik yang Terintegrasi. Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa aplikasi layanan pemerintah dan publik yang terintegrasi telah mencapai 98% yang memiliki



arti bahwa hampir seluruh layanan pemerintah dan publik di Kabupaten Ponorogo telah terdigitalisasi. Target kinerja dari program ini di tahun 2022-2026 yaitu 98%, tidak terjadi kenaikan presentase dapat dipengaruhi oleh pelayanan publik melalui aplikasi ini belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh untuk seluruh layanan dan dapat diintegrasikan untuk seluruh perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo supaya seluruh kebutuhan dan layanan yang diperlukan masyarakat melalui online dapat terfasilitasi serta terwujudnya *smart governance*.

4.4 Analisis Potensi Dan Dampak Kependudukan

Dari hasil identifikasi kondisi kependudukan serta analisis kependudukan, diperoleh beberapa potensi dan permasalahan mengenai pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo. Potensi dan permasalahan pada penyusunan *Grand Design Pembangunan Kependudukan* Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 akan diidentifikasi berdasarkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternalnya (peluang dan ancaman), sehingga dapat diketahui arah perencanaan yang sesuai bagi pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 4. 10 SWOT Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ponorogo

Internal		Eksternal	
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
<ul style="list-style-type: none"> Potensi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo cukup tinggi Masyarakat dan kebudayaan memiliki kaitan yang erat Jumlah persentase sarana air minum yang telah memenuhi syarat mencapai angka 86,8% Kabupaten Ponorogo telah memiliki 100% akses terhadap sanitasi yang layak Tingginya nilai capaian jumlah ibu yang ditangani oleh tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ponorogo, yaitu 7,54 tahun Belum optimalnya cakupan pelayanan fasilitas kesehatan Terbatasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Ponorogo Tingginya jumlah PMI di Kabupaten Ponorogo Belum optimalnya sinkronisasi data kependudukan antar OPD Tingginya jumlah pernikahan di bawah umur Rendahnya jumlah rumah tangga mandiri ekonomi Belum meratanya pembangunan di Kabupaten Ponorogo 	<ul style="list-style-type: none"> Telah terdapat program pemberdayaan masyarakat kelompok rentan Telah terdapat program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan ke masyarakat dan pengembangan SIAK Bonus demografi pada 25 tahun mendatang 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan pembiayaan program-program kependudukan Pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun terakhir Belum adanya kesamaan data kependudukan yang digunakan oleh Dinas/Badan/Lembaga lain maupun SKPD terkait sebagai dasar pelayanan publik dan penyusunan perencanaan program pembangunan Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Selanjutnya, masing-masing poin potensi dan permasalahan tersebut akan dilakukan pembobotan untuk penentuan arah pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo.



Pembobotan dilakukan berdasarkan besarnya pengaruh tiap-tiap parameter pada analisa SWOT dalam kondisi kependudukan di Kabupaten Ponorogo. Berikut merupakan bobot dari masing-masing potensi dan permasalahan:

Tabel 4. 11 Pembobotan IFAS EFAS

No.	Parameter	Bobot	Tingkat Pengaruh	Nilai
Internal				
Kekuatan (Strength)				
1.	Potensi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo cukup tinggi	0,20	3	0,60
2.	Masyarakat dan kebudayaan memiliki kaitan yang erat	0,15	1	0,15
3.	Jumlah persentase sarana air minum yang telah memenuhi syarat mencapai angka 86,8%	0,25	2	0,50
4.	Kabupaten Ponorogo telah memiliki 100% akses terhadap sanitasi yang layak	0,25	2	0,50
5.	Tingginya nilai capaian jumlah ibu yang ditangani oleh tenaga kesehatan	0,15	2	0,30
Total		1		2,05
Kelemahan (Weakness)				
1.	Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ponorogo, yaitu 7,54 tahun	0,15	2	0,30
2.	Belum optimalnya cakupan pelayanan fasilitas kesehatan	0,20	3	0,60
3.	Terbatasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Ponorogo	0,10	3	0,30
4.	Tingginya jumlah PMI di Kabupaten Ponorogo	0,15	2	0,30
5.	Belum optimalnya sinkronisasi data kependudukan antar OPD	0,10	2	0,20
6.	Tingginya jumlah pernikahan di bawah umur	0,15	2	0,30
7.	Rendahnya jumlah rumah tangga mandiri ekonomi	0,05	1	0,05
8.	Belum meratanya pembangunan di Kabupaten Ponorogo	0,10	2	0,20
Total		1		2,25
Selisih Kekuatan dan Kelemahan				-0,20
Eksternal				
Peluang (Opportunity)				
1.	Telah terdapat program pemberdayaan masyarakat kelompok rentan	0,25	3	0,75
2.	Telah terdapat program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	0,20	1	0,20
3.	Kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan ke masyarakat dan pengembangan SIAK	0,30	2	0,60
4.	Bonus demografi pada 25 tahun mendatang	0,25	2	0,50
Total		1		2,05
Ancaman (Threats)				
1.	Keterbatasan pembiayaan program-program kependudukan	0,25	2	0,50
2.	Pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun terakhir	0,30	2	0,60
3.	Belum adanya kesamaan data kependudukan yang digunakan oleh Dinas/Badan/Lembaga lain maupun SKPD terkait sebagai dasar pelayanan publik dan penyusunan perencanaan program pembangunan	0,25	2	0,50
4.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan	0,20	1	0,20
Total		1		1,80
Selisih Peluang dan Ancaman				0,25

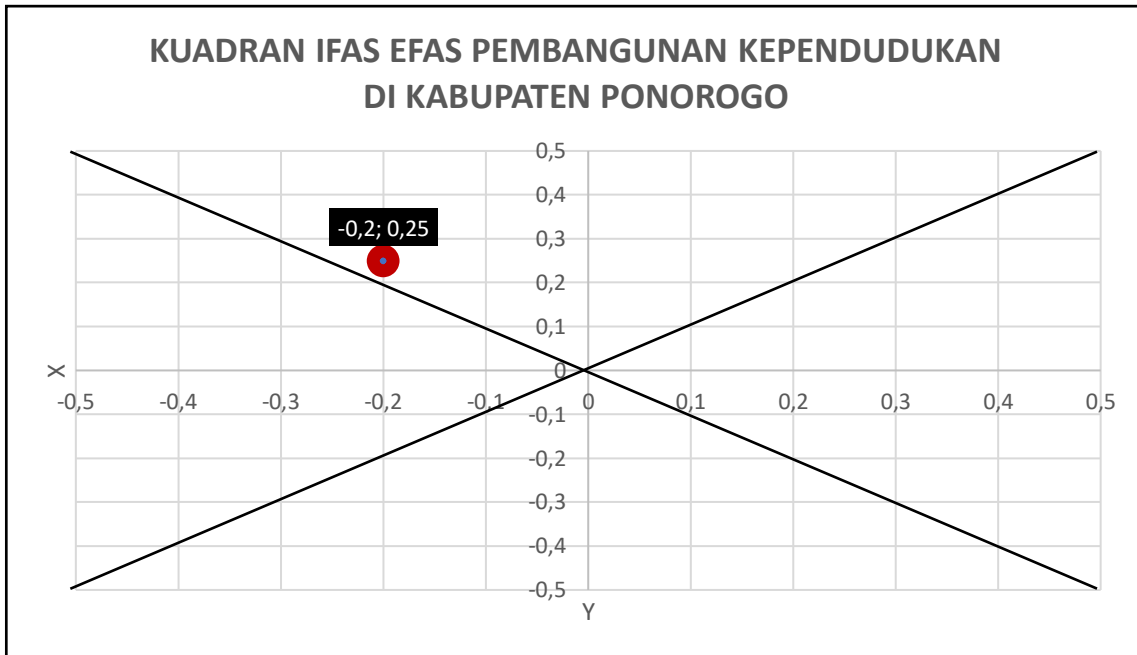
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan matriks pembobotan IFAS-EFAS dapat diketahui hasil kuadran IFAS-EFAS yaitu sebagai berikut:



X = Strength – Weakness
= 2,05 – 2,25
= -0,20

Y = Opportunity – Threats
= 2,05 – 1,80
= 0,25



Gambar 4. 21 Grafik Kuadran IFAS EFAS
Sumber : Hasil Analisis, 2022

Hasil dari analisis IFAS EFAS menunjukkan bahwa grafik berada pada kuadran II di ruang C, sehingga strategi yang dapat dilakukan adalah *Agresif Maintenance Strategy*, yaitu strategi melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki peluang dan kekuatan yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, strategi yang sesuai untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ialah melalui pengoptimalan peluang dan kekuatan, seperti potensi pengembangan sektor pariwisata, pemanfaatan bonus demografi dan kemajuan teknologi, dsb. Adapun beberapa kelemahan yang perlu diatasi, meliputi:

- Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ponorogo, yaitu 7,54 tahun
- Belum optimalnya cakupan pelayanan fasilitas kesehatan
- Terbatasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Ponorogo
- Tingginya jumlah PMI di Kabupaten Ponorogo
- Belum optimalnya sinkronisasi data kependudukan antar OPD
- Tingginya jumlah pernikahan di bawah umur
- Rendahnya jumlah rumah tangga mandiri ekonomi
- Belum meratanya pembangunan di Kabupaten Ponorogo



BAB V

VISI MISI, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

5.1 Isu Strategis Kependudukan 25 Tahun

Isu strategis memuat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Ponorogo karena hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kependudukan di Kabupaten Ponorogo. Isu strategis diperoleh melalui pengolahan data-data isu kependudukan lima pilar dari hasil kuesioner menggunakan analisis *Decision Making Trial and Evaluation Laboratory* (DEMATEL), yaitu suatu teknik analisis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ketergantungan antar kriteria yang sifatnya kompleks (Shen, dkk., 2013). Berikut merupakan beberapa tahap dalam penentuan isu strategis pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 5. 1 Daftar Isu Kependudukan Lima Pilar

Pilar Kependudukan	No	Isu Strategis
Kuantitas Penduduk	1	Stunting Pada Anak
	2	Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi
	3	Peningkatan Angka Kelahiran
	4	Rendahnya Presentase Kepesertaan JKN
	5	Keterbatasan Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan Yang Sesuai Standar
	6	Rendahnya Peserta KB Aktif
	7	Belum Optimalnya Perlindungan Ketenagakerjaan
	8	Tingginya Angka Kematian Akibat Covid-19 Tahun 2020-2021
Kualitas Penduduk	1	Keterbatasan Jumlah Tenaga Kependidikan
	2	Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah
	3	Fenomena Putus Sekolah
	4	Sarana Pendidikan Yang Belum Sesuai Standar
	5	Keterbatasan Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan Yang Sesuai Standar
	6	Tingginya Angka Kesakitan
	7	Peningkatan Tingkat Kemiskinan
	8	Peningkatan Jumlah Pengangguran
	9	Rendahnya Kualitas SDM (Pengetahuan dan Keterampilan) Tenaga Kerja
	10	Rendahnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar
Pembangunan Keluarga	1	Masih Tingginya Jumlah Pernikahan Dini
	2	Pola Pengasuhan Anak Dari Ibu Usia Dini dan PMI
	3	Pemberdayaan Masyarakat untuk Kelompok Rentan Rendah
	4	Keterbatasan Pembiayaan untuk Bantuan Sosial
	5	Fenomena PMI Turun Temurun Dalam Keluarga
	6	Rendahnya Jumlah Rumah Tangga Mandiri Ekonomi
	7	Indeks Keluarga Sehat Masih Belum Memenuhi Target
Persebaran dan Mobilitas Penduduk	1	Rendahnya Jumlah Lapangan Pekerjaan
	2	Kurangnya Program Padat Karya
	3	Tingkat Pemerataan Pembangunan Masih Rendah
	4	Tingginya Jumlah PMI
	5	Fenomena PMI Non Prosedural
	6	Kenyamanan Tinggal
	7	Rendahnya Kemauan/Motivasi Untuk Berwiraswasta Mandiri



Pilar Kependudukan	No	Isu Strategis
Data dan Administrasi Kependudukan	1	Kepedulian masyarakat Terhadap Registrasi Penduduk Masih Relatif Rendah
	2	Keterlambatan Pendaftaran dan Pelaporan Anak
	3	Sinkronisasi Data Kependudukan Antar OPD
	4	Ketersediaan Data Kependudukan
	5	Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Sistem OSS
	6	Data Proyeksi BPS Tidak Sejalan Dengan Kepentingan Lintas Sektor, seperti Data Sasaran Program Kesehatan
	7	Masih Rendahnya Rasio Anak Yang Memiliki KIA
	8	Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan
	9	Keterbatasan Sarana Informasi dan Komunikasi

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Isu-isu tersebut diidentifikasi dan dieliminasi untuk menentukan beberapa isu populer yang ada di Kabupaten Ponorogo dan berdampak secara signifikan terhadap kondisi kependudukan, sehingga perlu untuk segera diatasi. Berikut merupakan isu kependudukan yang populer di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 5. 2 Isu Kependudukan Populer di Kabupaten Ponorogo

Pilar Kependudukan	No	Isu Strategis
Kuantitas Penduduk	A1	Stunting Pada Anak
	A2	Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi
	A3	Keterbatasan Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan Yang Sesuai Standar
Kualitas Penduduk	B1	Sarana Pendidikan Yang Belum Sesuai Standar
	B2	Keterbatasan Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan Yang Sesuai Standar
	B3	Peningkatan Jumlah Pengangguran
Pembangunan Keluarga	C1	Masih Tingginya Jumlah Pernikahan Dini
	C2	Pola Pengasuhan Anak Dari Ibu Usia Dini dan PMI
	C3	Pemberdayaan Masyarakat untuk Kelompok Rentan Rendah
	C4	Rendahnya Jumlah Rumah Tangga Mandiri Ekonomi
Persebaran dan Mobilitas Penduduk	D1	Rendahnya Jumlah Lapangan Pekerjaan
	D2	Tingkat Pemerataan Pembangunan Masih Rendah
	D3	Tingginya Jumlah PMI
	D4	Kenyamanan Tinggal
Data dan Administrasi Kependudukan	E1	Sinkronisasi Data Kependudukan Antar OPD
	E2	Ketersediaan Data Kependudukan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Selanjutnya, isu-isu pada Tabel 5.2 akan dianalisis menggunakan analisis DEMATEL. Secara umum, analisis ini terdiri dari empat tahap, yaitu penyusunan *original impact matrix* berdasarkan skala penilaian 0 sampai 4 yang mempresentasikan besar atau tingkat pengaruh isu terhadap kondisi kependudukan, perhitungan *direct impact matrix*, perhitungan *total impact matrix*, dan perancangan *structural correlations impact diagram*. Berikut merupakan matriks hasil perhitungan analisis DEMATEL yang dilakukan:

Tabel 5. 3 Matriks Perhitungan Analisis DEMATEL

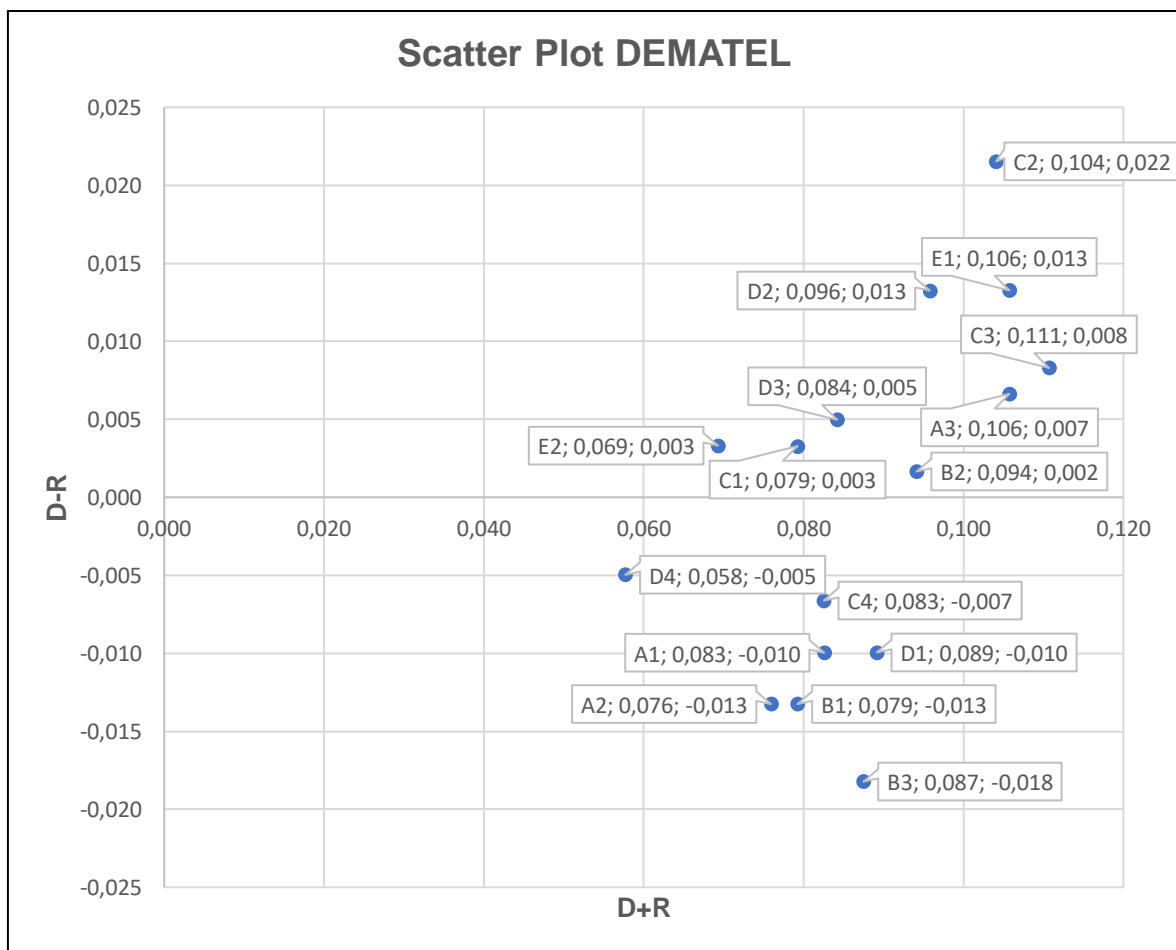
	D	R	D+R	D-R
A1	0,036	0,046	0,083	-0,010
A2	0,031	0,045	0,076	-0,013
A3	0,056	0,050	0,106	0,007
B1	0,033	0,046	0,079	-0,013
B2	0,048	0,046	0,094	0,002



	D	R	D+R	D-R
B3	0,035	0,053	0,087	-0,018
C1	0,041	0,038	0,079	0,003
C2	0,063	0,041	0,104	0,022
C3	0,059	0,051	0,111	0,008
C4	0,038	0,045	0,083	-0,007
D1	0,040	0,050	0,089	-0,010
D2	0,055	0,041	0,096	0,013
D3	0,045	0,040	0,084	0,005
D4	0,026	0,031	0,058	-0,005
E1	0,059	0,046	0,106	0,013
E2	0,036	0,033	0,069	0,003

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Hasil perhitungan analisis DEMATEL selanjutnya akan digambarkan dalam bentuk diagram *scatter plot*, dimana nilai (D+R) dan (D-R) pada Tabel 5.3 akan menjadi acuan titik koordinat pada sumbu horizontal dan vertikal. Berikut merupakan diagram *scatter plot* dari hasil perhitungan analisis DEMATEL:



Gambar 5. 1 Diagram Scatter Plot

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui beberapa isu kependudukan yang menjadi prioritas dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Ponorogo, meliputi:

1. Keterbatasan Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan Yang Sesuai Standar (A3, B2)

Ketersediaan jumlah sarana dan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan akses layanan kesehatan pada masyarakat. Keterbatasan kedua hal tersebut dapat berdampak pada derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat ialah angka harapan hidup. Pada tahun 2019, AHH Kabupaten Ponorogo sebesar 72,65 tahun dan naik menjadi 72,77 tahun pada tahun 2020. Namun, capaian indikator utama bidang kesehatan menunjukkan masih tingginya angka stunting pada anak, tingginya kasus kematian ibu dan bayi, serta tingginya angka kesakitan baik yang disebabkan oleh penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Salah satu penyebab masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ponorogo ialah keterbatasan jumlah sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai standar. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, diketahui bahwa belum terpenuhinya jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar, seperti tenaga dokter gigi, laboratorium, asisten apoteker, gizi, dan sebagainya. Selain itu, masih terdapat beberapa tenaga fungsional yang perlu ditingkatkan kapasitas dan keterampilannya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Sementara itu, untuk fasilitas kesehatan, diketahui bahwa ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan masih terbatas dan belum memenuhi standar, terutama pada rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Ponorogo.

2. Masih Tingginya Jumlah Pernikahan Dini (C1)

Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain rendahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak yang mengakibatkan hamil di luar nikah, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi terutama di daerah pinggiran, serta kemiskinan dan ekonomi keluarga yang membuat orang tua segera menikahkan anaknya masih menjadi faktor utama penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

Tabel 5. 4 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2016	0	0	0
2017	46	22	68
2018	55	15	70
2019	52	41	93
2020	58	176	234

Sumber: Profil Gender dan Anak, P3A, 2021



3. Pola Pengasuhan Anak Dari Ibu Usia Dini dan PMI (C2)

Pada kondisi eksisting, salah satu penyebab tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Kab Ponorogo ialah karena kurangnya pengawasan dan pengasuhan yang dilakukan orang tua, terutama pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Para orang tua yang bekerja sebagai PMI akan menitipkan anak kepada kedua orang tua mereka yang telah lanjut usia, sehingga pola pengasuhan yang dilakukan menjadi terbatas dan tidak optimal. Di sisi lain, pernikahan dini juga memiliki potensi memberikan pola pengasuhan yang kurang baik terhadap perkembangan anak. Berdasarkan Lubis&Nurwati (2020), rata-rata pasangan pernikahan usia dini masih memiliki kesiapan yang rendah dalam merawat dan membesarkan anak, terutama pada respon yang diberikan ibu usia dini dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada anak, seperti ketika anak sakit dan kekurangan gizi karena keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki ibu. [ada jangka panjang dampak pernikahan usia dini dapat menghambat tingkat pendidikan anak akibat kondisi perekonomian pasangan usia dini yang kurang memadai (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018).

4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Kelompok Rentan Rendah (C3)

Penanganan bidang sosial di Kabupaten Ponorogo berfokus pada Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diselenggarakan melalui penanganan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Pada kondisi eksisting, Kabupaten Ponorogo telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi PMKS, seperti meningkatkan keterampilan keluarga miskin dan lansia, fasilitasi manajemen usaha bagi fakir miskin, pembinaan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat melalui TKSK. Namun, upaya tersebut terhambat karena keterbatasan pembiayaan yang menyebabkan program-program yang telah direncanakan menjadi tidak optimal. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2020 sebesar 41,32%, dimana angka tersebut meningkat 9,03% dari tahun sebelumnya. Beberapa jenis PMKS yang paling rendah persentasenya adalah keluarga fakir miskin dan keluarga rumah tidak layak huni sehingga untuk ke depan peningkatan program Penanggulangan Kemiskinan sangat diperlukan baik dari sektor Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemberdayaan masyarakat miskin, maupun bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

5. Tingkat Pemerataan Pembangunan Masih Rendah (D2)

Ketimpangan antar wilayah dapat diukur salah satunya dengan Indeks Disparitas Wilayah, atau dikenal sebagai Indeks Williamson (IW). Indeks ini digunakan untuk mengetahui tingkat



pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. Indeks Williamson (IW) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 diangka 0,584 yang masuk kategori disparitas yang terjadi tergolong tinggi atau penyebaran pembangunan antar wilayah relatif tidak merata.

6. Tingginya Jumlah PMI (D3)

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang menjadi kantong-kantong pekerja migran Indonesia (PMI). Berdasarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, terdapat ±40.000 pekerja aktif yang tersebar di Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Timur Tengah. Jumlah tersebut didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah PMI terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingginya jumlah PMI di Kabupaten Ponorogo, salah satunya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, sehingga sebagian besar masyarakat mencari pekerjaan di luar wilayah.

Tabel 5. 5 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Tahun	Total
2016	8.812
2017	6.882
2018	10.781
2019	10.534
2020	2.475
2021	434

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2022

7. Sinkronisasi Data Kependudukan Antar OPD (E1)

Sebagai salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan, penduduk memiliki peran penting yang digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Pada beberapa kondisi, perencanaan pembangunan terhambat akibat tidak sinkronnya antara dokumen perencanaan pada satu OPD/instansi dengan OPD/instansi lainnya. Hal tersebut memberikan banyak dampak negatif, seperti perencanaan yang tidak tepat sasaran, pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan, dan sebagainya. Salah satu penyebabnya karena perbedaan data kependudukan yang dimiliki, sehingga acuan perhitungan perencanaan yang dilakukan menjadi berbeda-beda dan tidak akurat. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi data kependudukan antar OPS/instansi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan yang dilakukan.

8. Ketersediaan Data Kependudukan (E2)

Selain itu, sinkronisasi data kependudukan antar OPD juga perlu didukung dengan ketersediaan data kependudukan yang memadai dan dapat diakses dengan mudah. Hal tersebut berkaitan dengan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan teknologi dalam penyediaan data yang terintegrasi di Kabupaten Ponorogo masih belum optimal. Berdasarkan RPJMD



Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, indeks pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Ponorogo sebesar 81,15.

5.2 Visi Misi Pembangunan Kependudukan 25 Tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 memiliki visi pembangunan yaitu “**Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)**”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan selama 5 tahun mendatang. Berdasarkan visi RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dirumuskan visi GDPK Kabupaten Ponorogo ialah “**Terwujudnya Penduduk Yang Berkualitas Untuk Mencapai Kabupaten Ponorogo Yang Hebat**”. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 3 (tiga) misi yang terdiri dari:

1. Mewujudkan penduduk yang berkualitas dengan meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan ketahanan keluarga
2. Berkolaborasi dan berkerja sama antar stakeholder dalam menekan angka pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3. Mewujudkan pembangunan kependudukan melalui sistem administrasi yang terintegrasi.

5.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan 25 Tahun

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi, maka disusun strategi dan arah kebijakan kependudukan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan cakupan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja dan pengembangan kualitas tenaga kerja
2. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat mempercepat terwujudnya keluarga yang berkualitas.
3. Pengendalian kuantitas penduduk melalui pengaturan fertilitas, penurunan mortalitas dan pengurangan mobilitas penduduk
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk mengendalikan persebaran dan mobilitas penduduk.
5. Mengoptimalkan pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan melalui sistem data kependudukan yang terintegrasi



BAB VI

ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

6.1 Penetapan Target 25 Tahun

6.1.1 Kuantitas Penduduk

Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Ponorogo mencakup waktu dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2047 dengan periode lima tahunan. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk tersebut dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan awal dapat berjalan dengan sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode. Roadmap pengendalian kuantitas penduduk mengacu pada data kependudukan dan analisis yang telah dilakukan dengan data tersebut. Pada roadmap pengendalian kuantitas penduduk sasaran yang dijadikan target meliputi pengendalian jumlah penduduk berupa pengurangan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Berikut merupakan *roadmap* pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Ponorogo.



Gambar 6. 1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.1.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan program pembangunan kependudukan. Berdasarkan dokumen Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, disebutkan bahwa peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam



memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting yang dibentuk oleh tiga dimensi (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) dan berfungsi untuk mengukur keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tiga dimensi tersebut menjadi landasan dalam penentuan target pada 25 tahun mendatang.

Pada tahun 2045 mendatang, Pemerintah Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu sebuah upaya dalam membangun generasi emas sebagai penerus bangsa Indonesia pada 100 tahun emas Indonesia merdeka. Penyusunan visi tersebut juga dilakukan dalam rangka mewujudkan “Impian Indonesia 2015-2085” yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari empat pilar utama, yaitu:

1. Pembangunan Manusia Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Melalui keempat pilar tersebut, diharapkan pada tahun 2045, Indonesia telah mencapai beberapa target, yaitu:

1. Manusia Indonesia yang Unggul, Berbudaya, serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan
3. Pembangunan yang Merata dan Inklusif
4. Negara yang Demokratis, Kuat, dan Bersih

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan target 25 tahun mendatang pada pengembangan kualitas kependudukan di Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan mengacu kepada visi Indonesia Emas 2045 dan fokus pada penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pada pengembangan kependudukan pilar kualitas penduduk, target 25 tahun mendatang difokuskan kepada tiga dimensi pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berikut merupakan *roadmap* pengembangan kualitas kependudukan di Kabupaten Ponorogo:



Gambar 6. 2 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.1.3 Pembangunan Keluarga

Salah satu misi pembangunan kependudukan 25 tahun Kabupaten Ponorogo ialah *mewujudkan penduduk yang berkualitas dengan meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan ketahanan keluarga* dan diwujudkan melalui strategi ke-2, yaitu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat mempercepat terwujudnya keluarga yang berkualitas. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak-anak untuk belajar tentang kehidupan, sehingga keluarga bertanggung jawab atas terbentuknya perilaku dan karakter anak. Dengan demikian, keluarga yang kuat dan berkarakter menjadi pondasi yang baik bagi perkembangan generasi muda.

Di sisi lain, ketahanan keluarga dalam mengelola sumber daya fisik dan non fisik guna memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dsb) juga menjadi pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan *roadmap* pembangunan keluarga akan mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun Kabupaten Ponorogo, serta mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. *Roadmap* pembangunan keluarga akan terbagi menjadi beberapa tahap dengan interval perencanaan 5 tahun. Berikut merupakan *roadmap* pembangunan keluarga di Kabupaten Ponorogo:



Gambar 6. 3 Roadmap Pembangunan Keluarga di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.1.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

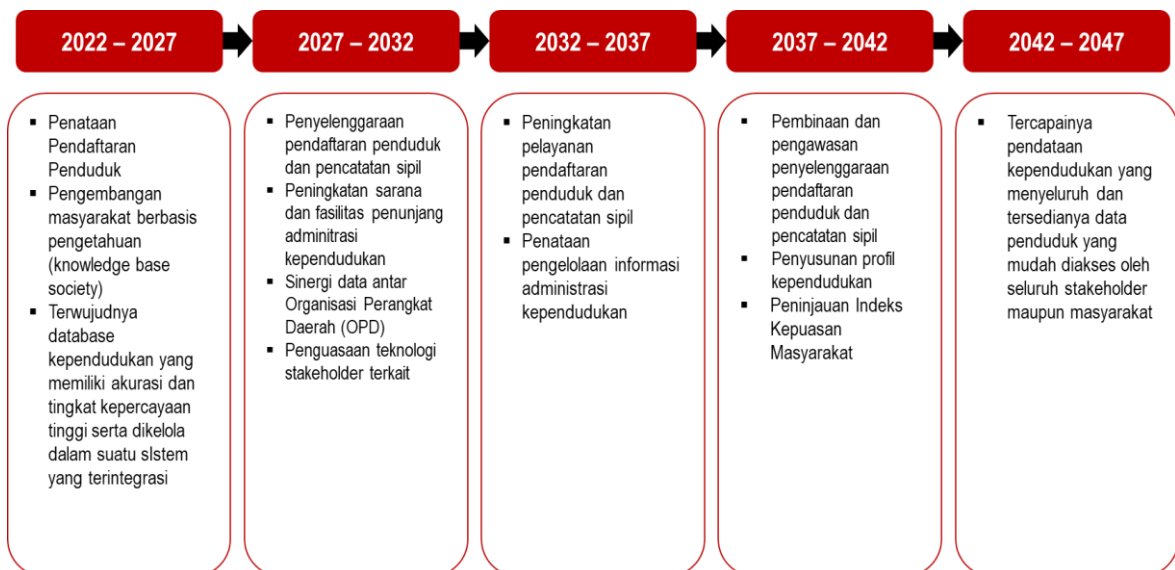
Persebaran dan mobilitas penduduk diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan determinan penting dalam kerangka pengendalian penduduk. Persebaran dan mobilitas penduduk sangat berkaitan dengan aktivitas pembangunan suatu daerah. Perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi antar kawasan dan daerah menjadi alasan utama bagi seseorang untuk melakukan perpindahan atau migrasi. Pada tahun 2019, indeks disparitas wilayah di Kabupaten Ponorogo berada di angka 0,584 yang termasuk kategori disparitas tinggi atau penyebaran pembangunan antar wilayah relatif tidak merata. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah migrasi penduduk yang dapat mempengaruhi keseimbangan penduduk di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui upaya pemerataan pembangunan, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, intervensi penguatan ekonomi masyarakat, dan penyediaan pelayanan sosial. Adapun *roadmap* pengendalian penduduk melalui pengarahannya persebaran dan mobilitas penduduk di Kabupaten Ponorogo 25 tahun mendatang sebagai berikut:



Gambar 6. 4 Roadmap Persebaran dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.1.5 Data dan Administrasi Kependudukan

Roadmap Pengembangan Data dan Adminitrasi Kependudukan akan terbagi menjadi 5 periode dalam 25 tahun yaitu tahun 2022-2047. Setiap periode merupakan tahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan adminitrasi kependudukan. Kondisi yang diinginkan pada pembangunan administrasi kependudukan adalah terwujudnya database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu system yang terintegrasi, mudah diakses oleh seluruh stakeholders terkait maupun masyarakat, serta menjadi bagian dari sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*). Berikut merupakan *roadmap* pengembangan data dan administrasi kependudukan di Kabupaten Ponorogo.



Gambar 6. 5 Roadmap Pengembangan Data dan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047
Sumber: Hasil Analisis, 2022



6.2 Program Pembangunan Kependudukan 5 Pilar

6.2.1 Kuantitas Penduduk

Berdasarkan *roadmap* pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047 yang memuat target-target yang ingin dicapai per lima tahun. Untuk mencapai target-target tersebut, diperlukan beberapa program pengendalian penduduk, meliputi KB dan menekan mortalitas, serta program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Berikut merupakan program-program pengendalian kuantitas penduduk guna mencapai target Kabupaten Ponorogo di tahun 2047.

Tabel 6. 1 Program-Program Pengendalian Kuantitas Penduduk

No.	Program	Indikator	Target				
			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kampung KB Aktif	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase Cakupan Pelayanan KB Baru	68,63%	69,72%	70,81%	71,9%	73%
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	94,04	93,07	92,1	91,13	90,16
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11,89	11,81	11,73	11,65	11,57
2	Program Pengendalian Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,11	0,8	0,5	0,3	0,1
3	Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)	Program Generasi Berencana (GenRe) per 1000 kelahiran	38	43	48	53	58

Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.2.2 Kualitas Penduduk

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai *roadmap* peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047 yang memuat target-target yang ingin dicapai oleh tiga dimensi pembentuk IPM (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak) per lima tahun. Adapun dalam mencapai target-target tersebut, diperlukan beberapa program peningkatan kualitas penduduk, meliputi kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, dan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi standar hidup layak. Berikut merupakan program-program peningkatan kualitas penduduk guna mencapai target Kabupaten Ponorogo di tahun 2047:



Tabel 6. 2 Program-Program Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Program	Indikator	Target				
			2022 - 2027	2027 - 2032	2032 - 2037	2037 - 2042	2042- 2047
A Pendidikan							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI	97,45	98,26	99,,06	99,87	100,68
		APK SMP/MTs	100,46	100,34	100,23	100,11	100,00
		APM SD/MI	91,98	93,98	95,98	97,98	100,00
		APK SMP/MTs	83,92	87,94	91,96	95,98	100,00
2	Program Sosialisasi Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,47	9,35	10,24	11,12	12
		Angka Harapan Lama Sekolah	14,24	14,93	15,62	16,31	17
3	Program Peningkatan Kualitas Sarana Pendidikan	Persentase Jumlah Sarana Pendidikan yang Sesuai dengan Standar	75%	80%	85%	90%	95%
4	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (<i>Teachers Professional Development</i>)	Persentase Jumlah Tenaga Pendidik yang Telah Mengikuti Sertifikasi	68%	71%	74%	77%	80%
B Kesehatan							
1	Program Pemenuhan Akses Layanan Kesehatan	Persentase Jumlah Sarana Kesehatan yang Telah Memenuhi Standar	75%	80%	85%	90%	95%
2	Program Penyediaan Alat Kesehatan Sesuai dengan Standar	Persentase Sediaan Alat Kesehatan yang Sesuai dengan Standar	80%	85%	90%	95%	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan	Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	80%	84%	88%	92%	96%
4	Program Pendampingan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Stunting Anak	16,86	12,64	8,43	4,21	0
5	Program Sosialisasi dan Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	50%	57,5%	65%	72,5%	80%
C Standar Hidup Layak							
1	Program Penguatan Sektor Padat Karya dan Bernilai Tambah	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada Sektor Padat Karya dan Bernilai Tambah	40%	50%	60%	70%	80%



No	Program	Indikator	Target				
			2022 - 2027	2027 - 2032	2032 - 2037	2037 - 2042	2042- 2047
2	Program Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Penguatan Relevansi dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Daerah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	80%	85%	90%	95%	100%
3	Program Penguatan Ekosistem Digital pada Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Digital	5%	7,5%	10%	12,5%	15%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.2.3 Pembangunan Keluarga

Berdasarkan *roadmap* peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2047 yang memuat beberapa target yang ingin dicapai pada pilar pembangunan keluarga per lima tahun, maka diperlukan program-program untuk mencapai target tersebut dan mewujudkan visi misi pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo. Berikut merupakan program-program pembangunan keluarga di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 6. 3 Program-Program Pembangunan Keluarga di Kabupaten Ponorogo

No.	Program	Indikator	Target				
			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Rentan	Persentase Jumlah Keluarga Mandiri Ekonomi	20%	35%	50%	65%	80%
2	Program Pengembangan Ekonomi Digital	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Digital	5,7%	6,2%	6,7%	7,2%	7,7%
3	Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Persentase Jumlah Kepala Keluarga Perempuan Mandiri Ekonomi	40%	50%	60%	70%	80%
4	Program Pendampingan dan Pembinaan Keluarga	Persentase Capaian Peningkatan Akses Informasi, Pendidikan, Penyuluhan, dan Pelayanan tentang Perawatan, Pengasuhan, dan Perkembangan Anak	50%	65%	80%	95%	100%
5	Program Sosialisasi dan	Persentase Capaian Peningkatan Akses	50%	65%	80%	95%	100%



No.	Program	Indikator	Target				
			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047
	Pembinaan Pra Nikah	Informasi, Pengetahuan, dan Kesiapan sebagai Calon Orang Tua					
6	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Partisipasi Keluarga Dalam Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	60%	70%	80%	90%	100%
		Partisipasi Keluarga Dalam Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga	60%	70%	80%	90%	100%
		Partisipasi Remaja Dalam Kegiatan Generasi Berencana	60%	70%	80%	90%	100%
		Persentase Kampung KB Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	50%	65%	80%	95%	100%
7	Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	60%	70%	80%	90%	100%
8	Program Pembinaan Keterampilan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Yang Tertangani	46%	56%	66%	76%	86%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.2.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Berdasarkan *roadmap* pengendalian penduduk melalui pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk di Kabupaten 2022 – 2047 yang memuat beberapa target yang ingin dicapai pada pilar persebaran dan mobilitas penduduk per lima tahun, maka diperlukan program-program untuk mencapai target tersebut dan mewujudkan visi misi pembangunan kependudukan di Kabupaten Ponorogo. Berikut merupakan program-program persebaran dan mobilitas penduduk di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 6. 4 Program-Program Persebaran dan Mobilitas Penduduk



No.	Program	Indikator	Target				
			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047
1	Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Persentase Sarana Dan Prasarana Air Minum Yang Dibangun	83,13%	88,11%	93,11%	98,11%	100%
		Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun	90,80%	93,1%	95,4%	97,7%	100%
		Persentase Ruas Jalan Kabupaten Yang Dibangun	67%	73,06%	79,12%	85,18%	91,24%
		Persentase Kawasan Permukiman Yang Ditangani	9,90%	10,6%	11,3%	12%	12,7%
2	Program Penguatan Keterampilan dan Daya Saing SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,45	3,11	1,77	0,43	0,20
3	Program Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Peningkatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	3,89%	4,11%	4,33%	4,55%	4,77%
4	Program Penanaman Modal Pengembangan Usaha	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	80%	85%	90%	95%	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

6.2.5 Data dan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan *roadmap* pengembangan data dan administrasi kependudukan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2047 yang memuat target-target yang ingin dicapai per lima tahun. Untuk mencapai target-target tersebut, diperlukan beberapa program yaitu program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengelolaan profil kependudukan, Informasi dan Komunikasi Publik, serta aplikasi layanan public yang terintegrasi. Berikut merupakan program-program pengembangan data dan administrasi kependudukan guna mencapai target Kabupaten Ponorogo di tahun 2047.

Tabel 6. 5 Program-Program Pengembangan Data dan Administrasi Kependudukan

No.	Program	Indikator	Target				
			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	80%	85%	90%	95%	100%



No.	Program	Indikator	Target				
			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	2042-2047
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	80%	85%	90%	95%	100%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Valid	80%	85%	90%	95%	100%
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	80%	85%	90%	95%	100%
5	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	78%	83%	88%	93%	98%
6	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik yang Terintegrasi	78%	83%	88%	93%	98%

Sumber: Hasil Analisis, 2022



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut apabila tidak disertai dengan upaya pengendalian penduduk akan memicu timbulnya berbagai permasalahan negatif, seperti kemiskinan, kriminalitas, ketimpangan antar wilayah, dan sebagainya. Selain itu, upaya pengendalian penduduk yang dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan juga diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan kependudukan di masa mendatang, seperti bonus demografi yang akan terjadi 25 tahun ke depan, perkembangan teknologi yang semakin pesat, perubahan kondisi lingkungan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa isu strategis kependudukan di Kabupaten Ponorogo, meliputi: keterbatasan jumlah sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai standar, tingginya jumlah pernikahan di bawah umur, pola pengasuhan anak dari ibu usia dini dan PMI, pemberdayaan masyarakat untuk kelompok rentan rendah, tingkat pemerataan pembangunan masih rendah, tingginya jumlah PMI, sinkronisasi data kependudukan antar OPD, serta ketersediaan data kependudukan. Isu-isu tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Ponorogo.

Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden), dan penajaman dari RPJPN.



7.2 Rekomendasi

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang

Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Regulasi ini secara jelas menunjukkan bahwa kebijakan perkembangan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, bukan hanya pengendalian kuantitas penduduk dan atau keluarga berencana.

Selanjutnya, apabila mengacu pada potensi dan permasalahan, serta isu strategis kependudukan di Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa rekomendasi kegiatan prioritas 5 pilar yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan ataupun memaksimalkan potensi kependudukan di Kabupaten Ponorogo, meliputi:

1. Pemenuhan dan Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan, Terutama Pada Ibu dan Anak, serta Lanjut Usia (Lansia)
2. Pendewasaan Usia Perkawinan
3. Peningkatan Pelayanan Kelompok Kegiatan Keluarga Berkualitas
4. Pelatihan Keterampilan dan Pengetahuan Tenaga Kerja Melalui Penguatan Relevansi dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Daerah
5. Penguatan Ekosistem Digital pada Sektor Ekonomi
6. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
7. Sinergitas Antar OPD dan Penguasaan Teknologi

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan kependudukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas, diperlukan adanya komitmen dari semua pihak terkait untuk melakukan koordinasi dan kerjasama. Koordinasi dan kerjasama dilakukan oleh pelaksana, swasta, LSM, akademisi, masyarakat, dan sebagainya melalui kegiatan sosialisasi, promosi, dan fasilitasi dalam menentukan program-program serta kebijakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Ponorogo diperlukan sebagai acuan bagi kebijakan kependudukan di masa depan dan secara khusus diharapkan dapat sejalan dengan rencana-rencana pembangunan lainnya. Strategi pengendalian penduduk pada dokumen ini diharapkan dapat mewujudkan kondisi penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai SDM Unggul pada tahun 2045 dan Visi Kabupaten Ponorogo, yaitu “*Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan*



Takwa). *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi, advokasi serta monitoring terhadap berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian, dan Pengembangan
Kabupaten Ponorogo
2022